



PROSPEKTUS

KANTOR PUSAT

Gedung Chase Plaza Lantai 15
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920, Indonesia
Telp: (021) 520 0434, Fax: (021) 520 9160
Website : www.bpfi.co.id

JADWAL	
Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa : 29 November 2017	Tanggal Akhir Pencatatan Dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Yang Berhak Atas HMETD : 22 Maret 2018
Permohonan Pencatatan Yang Berasal Dari HMETD Ke BEI : 9 Maret 2018	Tanggal Distribusi Sertifikat Bukti HMETD : 23 Maret 2018
Tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran dari OJK : 12 Maret 2018	Tanggal Pencatatan Saham di BEI : 26 Maret 2018
Tanggal Pengumuman Perubahan dan/atau Tambahan Informasi & Pengumuman Jadwal Pelaksanaan HMETD : 13 Maret 2018	Periode Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD di BEI : 26 Maret - 9 April 2018
Tanggal Cum HMETD pada perdagangan di - Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 19 Maret 2018	Periode Pelaksanaan HMETD : 26 Maret - 9 April 2018
- Pasar Tunai : 22 Maret 2018	Periode Distribusi Saham Hasil Pelaksanaan HMETD : 28 Maret - 11 April 2018
Tanggal Ex HMETD pada perdagangan di - Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 20 Maret 2018	Tanggal Akhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan : 11 April 2018
- Pasar Tunai : 23 Maret 2018	Tanggal Penjatahan Saham : 12 April 2018
	Tanggal Distribusi Saham Hasil Penjatahan : 12 April 2018
	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Pembelian Saham Tambahan : 16 April 2018

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA KETERANGAN, DATA ATAU LAPORANDAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT Batavia Prosperindo Finance Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak Sebagai Perusahaan Pembiayaan
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

Gedung Chase Plaza Lantai 12 & 15
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920, Indonesia
Telp: (021) 520 0434, Fax: (021) 520 9160
Website : www.bpfi.co.id

Kantor Operasional:

Perseroan memiliki 1 kantor pusat,
2 kantor perwakilan dan 68 kantor cabang
yang tersebar di pulau
Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Ambon dan Papua

PENAWARAN UMUM TERBATAS III PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK TAHUN 2018 ("PUT III") KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD")

Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 200.074.475 (dua ratus juta tujuh puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh lima) saham biasa atas nama atau sebanyak-banyaknya 11,22% (sebelas koma dua dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PUT III dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan Harga Penawaran Rp500,- (lima ratus Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya bernilai sebanyak-banyaknya Rp100.037.237.500 (seratus miliar tiga puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah). Saham-saham yang ditawarkan ini seluruhnya merupakan saham yang berasal dari portepel dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("BEI"). Setiap pemegang 791 (tujuh ratus sembilan puluh satu) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 22 Maret 2018 pukul 16.15 WIB berhak atas 100 (seratus) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 pasal 33 tentang HMETD, maka akan diperlakukan pembulatan ke bawah. Pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. HMETD ini diperdagangkan di BEI dan dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari kerja mulai tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Kedudukan saham yang akan diterbitkan dalam PUT III ini dibandingkan dengan kedudukan saham yang telah disetor penuh lainnya memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal yaitu, hak-hak yang berkaitan dengan saham, antara lain hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus dan hak atas HMETD.

PT Batavia Prosperindo Makmur ("BPM") selaku Pemegang Saham Utama telah menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan hak yang dimilikinya dalam PUT III. PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk ("BPI") selaku Pemegang Saham Utama menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan sebagian hak nya sebanyak 18.700.000 saham baru dalam PUT III.

Apabila saham baru yang ditawarkan dalam PUT III ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham HMETD publik lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa HMETD yang belum dilaksanakan, maka terhadap seluruh HMETD yang tersisa tersebut tidak akan dikeluarkan sahamnya dari portepel.

PUT III INI MENJADI EFEKTIF SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN KEPADA OJK DALAM RANGKA PUT III TELAH MENJADI EFEKTIF. DALAM HAL PERNYATAAN EFEKTIF TIDAK DIPEROLEH, MAKA SEGALA KEGIATAN DAN/ATAU TINDAKAN LAIN BERUPA APAPUN JUGA YANG TELAH DILAKSANAKAN DAN/ATAU DIRENCANAKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HMETD SESUAI DENGAN JADWAL TERSEBUT DIATAS MAUPUN DI DALAM PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN RENCANA PUT III DIANGGAP TIDAK PERNAH ADA.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT, DIMANA DEBITUR TIDAK MAMPU UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, BAIK POKOK PINJAMAN MAUPUN BUNGAYANA ATAU KEDUANYA. RISIKO INI TIMBUL JIKA STRUKTUR PEMBIAYAAN KREDIT, KELAYAKAN KONSUMEN DAN PIUTANG TIDAK DIKELOLA SECARA HATI-HATI SEHINGGA MENYEBABKAN KETIDAKLANCARAN PEMBAYARAN ANGSURAN DARI KONSUMEN YANG DAPAT MENGGANGGU KINERJA PERSEROAN SECARA KESELURUHAN. RISIKO LAINNYA DAPAT DIBACA PADA KETERANGAN TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM BAB VI PROSPEKTUS INI.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA DALAM PUT III AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM (DILUSI) YAITU SEBANYAK-BANYAKNYA 11,22% (SEBELAS KOMA DUA DUA PERSEN).

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM TERBATAS III INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH TERBATASNYA JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 2018

PT Batavia Prosperindo Finance Tbk (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut "**Perseroan**") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dengan surat No. 00090/BPF/I/2018 tanggal 23 Januari 2018 sehubungan dengan PUT III dalam rangka penerbitan HMETD kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("Peraturan OJK No.32/2015") dan Peraturan OJK No.33/POJK.04/2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("Peraturan OJK No.33/2015") yang merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "**UUPM**").

Perseroan beserta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PUT III ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, informasi atau fakta material serta kejujuran pendapat, keterangan atau laporan yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan PUT III ini, semua pihak, termasuk setiap pihak yang terafiliasi, tidak diperkenankan memberikan penjelasan atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan di dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut terlibat dalam PUT III ini, dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Sesuai dengan Peraturan OJK No.32/2015, dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan tersebut menjadi milik Perseroan dan akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan.

PUT III INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU SERTIFIKAT BUKTI HMETD, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM ATAU MELAKSANAKAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN, PEMBELIAN SAHAM MAUPUN PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG/PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT ATAU YURIDIS DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN YANG DAPAT MENGAKIBATKAN INFORMASI YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	1
RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	1
KEGIATAN USAHA PERSEROAN	1
STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN	1
KETERANGAN MENGENAI PUT III	2
STRATEGI USAHA PERSEROAN	3
PROSPEK USAHA PERSEROAN	4
IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	4
FAKTOR RISIKO	7
I. PENAWARAN UMUM TERBATAS III	9
STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN	11
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PUT III	15
III. PERNYATAAN UTANG	16
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	30
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	33
VI. FAKTOR RISIKO	60
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	63
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	64
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	64
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	64
2. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	64
3. SUMBER DAYA MANUSIA	77
4. PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)	79
5. PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN	79
6. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	81
7. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN DAN PENGURUSAN	82
8. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM	83
9. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI	87
10. PERJANJIAN DAN KONTRAK PENTING DENGAN PIHAK LAIN	88
11. PERKARA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN	92
12. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP	92
13. ASURANSI	99
14. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)	102

15.	KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN PADA PT. MALACCA TRUST WUWUNGAN INSURANCE	102
16.	KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN PADA PT MALACCA TRUST FINANCE	104
B.	KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	106
1.	UMUM	106
2.	JARINGAN KANTOR OPERASIONAL	106
3.	KEGIATAN USAHA	113
4.	PERSAINGAN USAHA	119
5.	TINGKAT KESEHATAN PERSEROAN	122
6.	TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN	122
7.	FASILITAS PEMBIAYAAN DAN KOLEKTIBILITAS PIUTANG	123
8.	TEKNOLOGI INFORMASI (TI).....	123
9.	PROSPEK USAHA.....	124
IX.	EKUITAS	128
X.	KEBIJAKAN DIVIDEN	130
XI.	PERPAJAKAN	131
XII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM	133
XIII.	TATA CARA PEMESANAN SAHAM	135
XIV.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	140
XV.	INFORMASI TAMBAHAN	141

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

Afiliasi	<p>Berarti pihak sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 butir 1 UUPM, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; (b) hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama; (d) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau (f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
BAE	Berarti Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang ditunjuk Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham dalam rangka PUT III, yang dalam hal ini adalah PT Adimitra Jasa Korpora.
Bank Kustodian	Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari Bapepam atau Bapepam dan LK atau OJK untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
BPM	Berarti PT Batavia Prosperindo Makmur, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
Bursa Efek Indonesia atau BEI	Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya dimana efek dicatatkan.
DPS	Berarti Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh BAE Perseroan.
Emisi	Berarti tindakan Perseroan menerbitkan efek dan menjual kepada Pemegang Saham Perseroan dan/atau pengganti dan penerus haknya dan/atau kepada masyarakat melalui PUT III.
EBITDA	Berarti <i>Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortisation</i> , yaitu laba neto sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi.

Efek	Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek dan setiap derivatif efek.
Emisi	Berarti tindakan Perseroan menerbitkan efek dan menjual kepada Pemegang Saham Perseroan dan/atau pengganti dan penerus haknya dan/atau kepada masyarakat melalui PUT III.
FPE	Berarti Formulir Penyetoran Efek
Harga Pelaksanaan	Berarti harga yang ditawarkan kepada para pemegang saham Perseroan dalam PUT III untuk melaksanakan HMETD-nya yaitu Rp500,- (lima ratus Rupiah) setiap saham.
Hari Bursa	Berarti hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh BEI.
Hari Kalender	Berarti semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Kalender Gregorian tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
Hari Kerja	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
HMETD	Berarti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
Joint Financing	Berarti kerjasama pembiayaan antara Perseroan dengan pihak perbankan dan/atau pihak lainnya.
KAP	Berarti Kantor Akuntan Publik, yang dalam hal ini adalah Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (<i>Member Crowe Horwarth International</i>).
Konfirmasi Tertulis	Berarti laporan konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo efek dalam rekening efek yang diterbitkan oleh KSEI atau perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek.
Konsultan Hukum	Berarti konsultan hukum yang terdaftar di Bapepam atau Bapepam dan LK atau OJK.
KSEI	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan efek berdasarkan perjanjian pendaftaran efek pada Penitipan Kolektif sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.
KTUR	Berarti Konfirmasi Tertulis untuk RUPS.
Kustodian	Berarti pihak yang memberi jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lainnya, termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.

Laba (rugi) - bersih	Berarti laba (rugi) sebelum pajak dikurangi dengan beban pajak bersih dan dikurangi dengan bagian laba (rugi) yang diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali.
Laba (rugi) komprehensif - bersih	Berarti laba (rugi) komprehensif selama periode/tahun berjalan-bersih setelah pajak yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk.
Laporan Posisi Keuangan	Berarti neraca keuangan.
Masyarakat	Berarti perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
Menteri Hukum	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu bernama Menteri Kehakiman Republik Indonesia atau Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) atau pengganti haknya.
NIM	Singkatan dari " <i>Net Interest Margin</i> " yaitu Marjin Pendapatan Bunga Bersih yang merupakan pendapatan bunga bersih dibagi rata-rata Aset Produktif.
NPL	Berarti <i>Non Performing Loan</i> .
OJK	Berarti Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
PSAK	Berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.
Pasar Modal	Berarti Pasar Modal di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam peraturan pasar modal yang berlaku di Indonesia.
Pemegang Rekening	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/ atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Pemegang Saham	Berarti perseorangan dan/atau badan hukum yang telah memiliki saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, yang berhak atas HMETD.
Pemerintah	Berarti Pemerintah Republik Indonesia.
Penawaran Umum Terbatas atau PUT	Berarti kegiatan penawaran efek oleh Perseroan yang dilakukan dalam wilayah Indonesia kepada pemegang saham berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM.
Penawaran Umum Terbatas III atau PUT III	Berarti kegiatan penawaran sebanyak-banyaknya 200.074.475 (dua ratus juta tujuh puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh lima) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham dengan memberikan HMETD.

Penitipan Kolektif	Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Peraturan KSEI	Berarti Peraturan KSEI No.Kep-015/DIR/KSEI/0500 tanggal 15 Mei 2000 tentang Jasa Kustodian Sentral sebagaimana telah disetujui oleh Bapepam sesuai dengan surat keputusan Bapepam No.S-1053/PM/2000 tanggal 15 Mei 2000 perihal Persetujuan Rancangan Peraturan Jasa Kustodian Sentral PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya, dan/atau perubahan-perubahannya di kemudian hari.
Peraturan No.VIII.G.12	Berarti Peraturan Bapepam-LK No.VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjataan Efek atau Pembagian Saham Bonus.
Peraturan IX.E.1	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009.
Peraturan IX.E.2	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Utama, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-614/BL/2011.
Peraturan No.IX.J.1	Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas III PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. No. 67 tanggal 16 Januari 2018 dan Addendum I Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas III PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. No. 81 tanggal 13 Februari 2018 yang keduanya dibuat di hadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Kesanggupan Pembelian Bagian Saham	Berarti Akta Pernyataan Kesanggupan Pembelian Bagian Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas III PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. No. 66 tanggal 16 Januari 2018 dan Addendum I Pernyataan Kesanggupan Pembelian Bagian Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas III PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. No. 91 tanggal 15 Februari 2018 yang keduanya dibuat di hadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta.
Pernyataan Pendaftaran	Berarti Pernyataan Pendaftaran yang diajukan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas III, yang terdiri dari dokumen-dokumen yang wajib diajukan berikut lampiran-lampirannya kepada Ketua OJK termasuk semua perubahan, tambahan serta pembedulannya yang dibuat di kemudian hari guna memenuhi persyaratan OJK.
POJK	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2014	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana Penyelenggaraan rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan HMETD.
Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014	Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2015	Berarti Peraturan OJK No.33/PPOJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan HMETD.
Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015	Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015	Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Perseroan	Berarti PT Batavia Prosperindo Finance Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
Prospektus	Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Efek, yang disusun sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017.
Prospektus Ringkas	Berarti ringkasan Prospektus yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan dan diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
RUPS	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham.
RUPSLB	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	Berarti seluruh saham hasil pelaksanaan HMETD yang merupakan Saham Baru yang diperoleh oleh pemegang HMETD dalam PUT III yaitu sebanyak-banyaknya 200.074.475 (dua ratus juta tujuh puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh lima) Saham Baru.

Sertifikat Bukti HMETD atau SBHMETD	Berarti singkatan dari Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu surat bukti hak atau sertifikat yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Saham yang membuktikan hak memesan efek terlebih dahulu, yang dapat diperdagangkan selama Periode Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD.
Tanggal Efektif	Berarti tanggal dimana Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan oleh Perseroan menjadi efektif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu setelah RUPSLB menyetujui PUT III.
Tanggal Pencatatan di BEI	Berarti tanggal pencatatan PUT III di BEI.
UUPM	Berarti Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
UUPT	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No.106 Tahun 2007, Tambahan No. 4746, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Undang-undang Perpajakan	Berarti Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 (seribu sembilan ratus delapan puluh tiga) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan, sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (seribu sembilan ratus Sembilan puluh empat) tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 (seribu sembilan ratus delapan puluh tiga) tentang Undang-undang dan Tata Cara Perpajakan, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (dua ribu) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 (seribu sembilan ratus delapan puluh tiga) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, serta perubahan lainnya di kemudian hari.
WNA	Berarti Warga Negara Asing.
WNI	Berarti Warga Negara Indonesia.

SINGKATAN UNTUK PEMEGANG SAHAM DAN ENTITAS ASOSIASI

Pemegang Saham Perseroan

PT Batavia Prosperindo Makmur	: “ BPM ”
PT Batavia Prosperindo International Tbk.	: “ BPI ”
UOB Kay Hian Pte Ltd	: “ UOB ”

Entitas Asosiasi Perseroan

PT Malacca Trust Finance	: “ MTF ”
PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk.	: “ MTWI ”

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca bersama-sama dengan keterangan yang lebih terperinci dan ikhtisar data keuangan penting beserta catatan atas ikhtisar data keuangan penting yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan, yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

PT Batavia Prosperindo Finance Tbk ("**Perseroan**") didirikan berdasarkan Akta No. 186 tanggal 12 Desember 1994 yang dibuat di hadapan Djedjem Widjaja SH. MH., Notaris di Jakarta, dengan nama PT Bira Multi Finance. Akta Pendirian ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-18791-HT.01.01.TH.94 tanggal 22 Desember 1994 dan telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah agenda No. 127/A.PT/HKM/1995/PNJAK.SEL tanggal 25 Januari 1995, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 12 tanggal 9 Pebruari 1996, Tambahan No. 1584.

Anggaran Dasar Perseroan pada Akta Pendirian selanjutnya telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas No. 61 tertanggal 5 Juni 2017, yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta. Akta perubahan ini telah dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0144834 tanggal 12 Juni 2017 dan telah didaftarkan pada Tanda Daftar Perseroan No. AHU-0074925.AH.01.11.TAHUN 2017 Tanggal 12 Juni 2017.

Pada tanggal 29 November 2017, Perseroan telah menyelenggarakan RUPSLB yang menyetujui rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sesuai dengan dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015.

KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Sebagaimana termaksud dalam pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan kegiatan Perseroan adalah sebagai perusahaan pembiayaan. Keterangan lengkap dapat dilihat pada Bab VIII mengenai Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, serta Kecenderungan dan Prospek Usaha.

Perseroan memperoleh izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. 90/KMK.017/1995 tanggal 15 Februari 1995 dengan nama PT Bira Multi Finance dan mulai beroperasi secara komersial sejak tahun 1995, dan telah diperbaharui dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-099/KM.10/2007 tanggal 9 Mei 2007 sehubungan dengan perubahan nama Perseroan menjadi PT Batavia Prosperindo Finance dan Perseroan memiliki izin usaha meliputi bidang pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, kegiatan usaha pembiayaan lain atas persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan melakukan sewa operasi. Pada saat ini, Perseroan terutama bergerak dalam bidang pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja dan pembiayaan multiguna.

Perseroan memiliki kantor pusat yang berkedudukan di Gedung Chase Plaza Lantai 12 dan 15, Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920, Indonesia.

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Struktur Permodalan dan Komposisi Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2017 berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora, Biro Administrasi Efek Perseroan, adalah sebagai berikut:

MODAL SAHAM
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama dengan
Nilai Nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham

KETERANGAN	Nilai Nominal per Saham Rp. 100,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.200.000.000	220.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
PT Batavia Prosperindo Makmur	570.555.500	57.055.550.000	36,05%
PT Batavia Prosperindo International Tbk	566.756.100	56.675.610.000	35,81%
UOB Kay Hian Pte Ltd	100.100.000	10.010.000.000	6,33%
Masyarakat	345.177.500	34.517.750.000	21,81%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.582.589.100	158.258.910.000	100,00%
Jumlah Saham Dalam Portepel	617.410.900	61.741.090.000	

RINCIAN PENYERTAAN TERHADAP ENTITAS ASOSIASI PERSEROAN

Tabel berikut merupakan rincian penyertaan Perseroan terhadap Entitas Asosisasi Perseroan terhitung per tanggal 31 Januari 2018 :

No.	Entitas Asosiasi Perseroan	Tahun Penyertaan	Status Operasional	%
1.	PT Malacca Trust Finance	2014	Beroperasi	25,00
2.	PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk.	2011	Beroperasi	19,90

KETERANGAN MENGENAI PUT III

- Jenis Efek yang ditawarkan : Saham biasa atas nama yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, melalui penerbitan HMETD.
- Jumlah HMETD yang ditawarkan : Sebanyak-banyaknya 200.074.475 (dua ratus juta tujuh puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh lima) Saham Biasa Atas Nama
- Nilai Nominal : Rp 100,- (seratus Rupiah) per saham
- Harga Penawaran HMETD : Rp 500,- (lima ratus Rupiah) per saham
- Rasio HMETD (Saham Lama : HMETD) : 791: 100 (791 saham lama mendapat 100 HMETD)
- Tanggal DPS Perseroan yang berhak atas HMETD : 22 Maret 2018
- Tanggal Pencatatan di BEI : 26 Maret 2018
- Periode Perdagangan dan Pelaksanaan HMETD : 26 Maret – 9 April 2018
- HMETD dalam bentuk pecahan : Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*). Dalam hal Pemegang Saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan maka hak atas pecahan efek tersebut menjadi milik Perseroan dan wajib dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya dimasukkan dalam rekening Perseroan

PUT III ini menawarkan sebanyak-banyaknya 200.074.475 Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak-banyaknya 11,22% dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PUT III dengan nilai nominal Rp 100,- setiap saham yang ditawarkan dengan harga Rp 500,- setiap saham sehingga sebanyak-banyaknya bernilai Rp100.037.237.500,-.

1. Dengan asumsi bahwa seluruh Pemegang saham lama dan BPM melaksanakan seluruh HMETD yang dimiliki, dan BPI melaksanakan sebagian HMETD yang dimiliki sejumlah 18.700.000 saham baru, maka secara proforma struktur permodalan sebelum dan sesudah PUT III adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	SEBELUM PUT III			SETELAH PUT III		
	Jumlah	Nominal (Rp. 100)	%	Jumlah	Nominal (Rp. 100)	%
Modal Dasar	2.200.000.000	220.000.000.000		2.200.000.000	220.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
PT Batavia Prosperindo Makmur	570.555.500	57.055.550.000	36,05%	642.686.410	64.268.641.000	36,05%
PT Batavia Prosperindo International Tbk	566.756.100	56.675.610.000	35,81%	585.456.100	58.545.610.000	32,84%
UOB Kay Hian Pte Ltd	100.100.000	10.010.000.000	6,33%	112.754.867	11.275.486.700	6,33%
Masyarakat	345.177.500	34.517.750.000	21,81%	441.766.198	44.176.619.800	24,78%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.582.589.100	158.258.910.000	100,00%	1.782.663.575	178.266.357.500	100,00%
Jumlah Saham Dalam Portepel	617.410.900	61.741.090.000		417.336.425	41.733.642.500	

2. Dengan asumsi bahwa BPM melaksanakan seluruh hak nya dan BPI melaksanakan sebagian hak yang dimiliki sejumlah 18.700.000 saham baru, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah dilaksanakannya PUT III secara proforma adalah sebagai berikut :

KETERANGAN	SEBELUM PUT III			SETELAH PUT III		
	Jumlah	Nominal (Rp. 100)	%	Jumlah	Nominal (Rp. 100)	%
Modal Dasar	2.200.000.000	220.000.000.000		2.200.000.000	220.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
PT Batavia Prosperindo Makmur	570.555.500	57.055.550.000	36,05%	642.686.410	64.268.641.024	38,41%
PT Batavia Prosperindo International Tbk	566.756.100	56.675.610.000	35,81%	585.456.100	58.545.610.000	34,99%
UOB Kay Hian Pte Ltd	100.100.000	10.010.000.000	6,33%	100.100.000	10.010.000.000	5,98%
Masyarakat	345.177.500	34.517.750.000	21,81%	345.177.500	34.517.750.000	20,63%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.582.589.100	158.258.910.000	100,00%	1.673.420.010	167.342.001.024	100,00%
Jumlah Saham Dalam Portepel	617.410.900	61.741.090.000		526.579.990	52.657.998.976	

Pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya dalam PUT III akan mengalami penurunan persentase kepemilikan saham (dilusi) yaitu maksimum 11,22%.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari PUT III ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk meningkatkan modal kerja Perseroan.

Rincian mengenai rencana penggunaan dana dari hasil PUT III dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

STRATEGI USAHA PERSEROAN

Agar pangsa pasar yang sudah ada dapat dipertahankan bahkan dikembangkan, Perseroan menjalankan beberapa strategi usaha yang harus dilakukan untuk tetap bertahan dan berkembang di antara ketatnya persaingan usaha. Strategi usaha Perseroan yang merupakan acuan Perseroan dalam menjalankan usahanya dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Segmen Pasar yang dituju
- b. Jaringan Kerja
- c. Tenaga Marketing yang Handal
- d. Hubungan yang Baik dengan Mitra Bisnis

- e. Pengelolaan Aset dan Liabilitas yang berhati-hati
- f. Pelaksanaan Prinsip *Know Your Customer*
- g. Memperkuat dan memaksimalkan Teknologi Informasi (TI)
- h. Pengembangan Kompetensi Tenaga Kerja demi Meningkatkan Produktivitas

PROSPEK USAHA PERSEROAN

Indonesia saat ini merupakan salah satu negara terbesar di dunia dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari 250 juta jiwa. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik di Indonesia telah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan jumlah penduduk dan ekonomi tersebut telah meningkatkan kebutuhan akan sarana transportasi publik yang memadai. Mengingat masih terbatasnya sarana transportasi publik pada saat ini, maka masyarakat menganggap perlu memiliki kendaraan untuk menunjang aktivitasnya. Akibatnya adalah telah terjadi pertumbuhan yang pesat dalam industri kendaraan bermotor. Pertumbuhan ini juga ditunjang oleh tersedianya fasilitas pembiayaan yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan kendaraan dengan sistem pembayaran yang disesuaikan dengan kemampuannya.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Dibawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk periode-periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dan 2016 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 yang diaudit oleh Akuntan Publik Juninho Widjaja, CPA dari KAP Kosasih, Nurdian, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (*Member Crowe Horwath International*) dengan opini Wajar Tanpa Modifikasi.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Aset	30 September	31 Desember	
	2017	2016	2015
Kas dan setara kas	42.162	15.164	13.868
Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	300	300	-
Piutang sewa pembiayaan-pihak ketiga - neto	31.781	44.822	119.597
Piutang pembiayaan konsumen			
Pihak ketiga - neto	1.068.031	594.888	580.325
Pihak berelasi	13.048	15.545	20.467
Tagihan anjak piutang - pihak ketiga - neto	102.596	177.141	92.528
Piutang lain-lain - pihak ketiga - neto	86.453	58.764	34.861
Uang muka dan beban dibayar di muka	11.127	6.989	7.882
Investasi pada entitas asosiasi	31.827	29.716	27.325
Investasi saham	20.251	20.251	20.251
Aset tetap - neto	76.087	61.941	58.749
Aset pajak penghasilan	3.798	3.333	2.356
Tagihan pajak penghasilan	1.732	-	-
Aset lain-lain	9.538	8.748	3.514
Total Aset	1.498.731	1.037.602	981.723

(dalam jutaan Rupiah)

Liabilitas	30 September	31 Desember	
	2017	2016	2015
Utang bank	436.781	316.840	229.859
Beban masih harus dibayar			
Pihak ketiga	15.289	4.053	4.530
Pihak berelasi	3.447	1.590	4.208
Utang pajak	1.269	2.434	3.266
Efek utang yang diterbitkan - neto	465.123	196.310	229.737
Liabilitas imbalan kerja karyawan	14.449	12.569	10.904
Total Liabilitas	936.358	533.796	482.504

(dalam jutaan Rupiah)

Ekuitas	30 September		31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
Modal saham - nilai nominal Rp 100,- per saham Modal dasar - 2.200.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1.582.589.100 saham pada tanggal 30 September 2017 dan 1.360.627.100 saham pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015	158.259	136.063	136.063	136.063
Tambahan modal disetor - neto	185.025	145.575	145.575	145.575
Saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya	250	250	250	250
Belum ditentukan penggunaannya	195.751	198.545	193.361	193.361
Penghasilan komprehensif lain				
Keuntungan revaluasi aset tetap - neto setelah pajak	23.088	23.373	23.970	23.970
Total Ekuitas	562.373	503.806	499.219	499.219
Total Liabilitas dan Ekuitas	1.498.731	1.037.602	981.723	981.723

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 September		31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
Penghasilan				
Pembiayaan konsumen	138.331	97.274	132.444	140.518
Administrasi	70.370	61.159	84.459	65.284
Anjak piutang	19.860	18.430	25.657	16.554
Sewa pembiayaan	3.980	4.839	5.483	18.424
Lain-lain	16.132	7.450	10.357	9.158
Total Penghasilan	248.673	189.152	258.400	249.938
Beban Usaha				
Beban Keuangan	66.304	43.181	58.742	63.968
Gaji dan tunjangan	59.038	45.046	58.453	52.801
Umum dan administrasi	48.452	32.056	47.893	38.103
Kerugian penurunan nilai	28.580	30.404	32.556	27.791
Beban Pemasaran	15.286	11.348	15.923	11.227
Pajak	-	3.092	3.092	-
Total Beban Usaha	217.660	165.127	216.659	193.890
Laba Usaha	31.013	24.025	41.741	56.048
Bagian atas laba (rugi) entitas asosiasi - neto	2.108	1.755	2.387	(594)
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan	33.121	25.780	44.128	55.454
Beban Pajak Penghasilan	(6.334)	(5.644)	(10.216)	(13.712)
Laba Neto Periode/ Tahun Berjalan	26.787	20.136	33.912	41.742
Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi periode berikutnya :				
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	178	(822)	896	(2.181)
Bagian penghasilan (beban) komprehensif lain atas entitas asosiasi	4	6	4	8
Keuntungan revaluasi aset tetap	-	-	-	24.710
Efek pajak terkait				
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	(44)	206	(224)	545
Bagian penghasilan (beban) komprehensif lain atas entitas asosiasi	(1)	(2)	(1)	(2)
Keuntungan revaluasi aset tetap	-	-	-	-
Total Penghasilan (Beban)Komprehensif Lain	137		675	
Total Laba Komprehensif				
Laba Neto Per Saham Dasar				

RASIO KEUANGAN PENTING

(dalam persentase, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	30 September		31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
Rasio Pertumbuhan				
Aset	44,44	1,68	5,69	(8,03)
Liabilitas	75,41	5,56	10,63	(23,69)
Ekuitas	11,62	(2,06)	0,92	14,73
Penghasilan	31,47	2,78	3,39	11,51
Beban	31,81	28,02	11,74	14,48
Laba Neto	33,03	(51,57)	(18,76)	2,47
Laba Komprehensif	37,90	(53,04)	(46,03)	58,32
Rasio Profitabilitas				
Laba Usaha / Penghasilan	12,47	12,70	16,15	22,42
Laba Tahun Berjalan / Penghasilan	10,77	10,65	13,12	16,70
Laba Komprehensif / Penghasilan	10,83	10,32	13,39	25,64
Imbal Hasil Rata-Rata Aset (ROAA)	1,80	1,31	3,33	6,53
Imbal Hasil Rata-Rata Ekuitas (ROAE)	4,79	3,95	6,87	12,84
<i>Gearing Ratio (x)</i>	1,77	1,10	1,13	1,02
Total Liabilitas / Total Ekuitas (x)	1,67	1,04	1,06	0,97
Total Liabilitas / Total Aset (x)	0,62	0,51	0,51	0,49
<i>Debt Ratio (x)</i>	1,60	0,99	1,02	0,92
<i>Financing to Asset ratio (x)</i>	0,60	0,49	0,49	0,47
Total Ekuitas / Total Modal Disetor (x)	1,64	1,74	1,79	1,77
Laba Usaha / Total Aset	1,79	2,02	3,27	4,25
Laba Usaha / Total Ekuitas	4,76	4,12	6,73	8,36
Aset / Liabilitas	1,60	1,96	1,94	2,03

Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit atau Kewajiban Lainnya dan Pemenuhannya

Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit atau Kewajiban Lainnya	Rasio Keuangan Perseroan pada tanggal 30 September 2017
Total Liabilitas terhadap Total Ekuitas (maksimal 8 : 1)	1,67
NPL (maksimal 3%)	1,35%

FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan tidak lepas dari risiko yang mungkin mempengaruhi hasil usaha Perseroan. Risiko yang disajikan berikut ini telah disusun berdasarkan bobot risiko yang akan memiliki dampak paling besar hingga dampak yang paling kecil bagi Perseroan. Menurut manajemen Perseroan, faktor risiko yang dihadapi Perseroan adalah sebagai berikut:

A. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN USAHA PERSEROAN

1. RISIKO KREDIT
2. RISIKO PENDANAAN
3. RISIKO TEKNOLOGI
4. RISIKO OPERASIONAL
5. RISIKO PERSAINGAN
6. RISIKO MAKROEKONOMI
7. RISIKO PERUBAHAN KURS
8. RISIKO KEBIJAKAN MONETER
9. RISIKO SOSIAL POLITIK

B. Risiko Investasi Bagi Investor

C. Risiko Kemungkinan Tidak Likuidnya Saham

Penjelasan lebih lanjut mengenai risiko-risiko usaha Perseroan tersebut dapat dilihat dalam Bab VI tentang "Faktor Risiko".

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa semua risiko yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dan disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dalam Prospektus.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Perseroan merencanakan akan membagi dividen minimal 25% dari laba bersih konsolidasian setelah pajak untuk tahun buku 2017. Keputusan untuk pembayaran dividen harus disetujui oleh pemegang saham Perseroan dalam RUPS, dimana RUPS akan memberikan persetujuan atas usulan Direksi, usulan mana telah memperhatikan pendapatan, kinerja keuangan, kondisi keuangan, likuiditas, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, serta faktor-faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi. Tidak dapat dipastikan bahwa pendapatan, posisi keuangan, kinerja keuangan masa depan yang diharapkan, aksi korporasi, belanja modal masa depan yang diharapkan dan rencana investasi lainnya akan menyebabkan Perseroan dapat melakukan pembayaran dividen pada tingkatan ini.

Keterangan selengkapnya mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini mengenai Kebijakan Dividen.

PEMESANAN TAMBAHAN DAN SISA SAHAM

Apabila Saham Baru ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD secara proporsional sesuai peraturan yang berlaku.

PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk PT Adimitra Jasa Korpora untuk melaksanakan pengelolaan administrasi saham Perseroan dan bertindak sebagai Agen Pelaksanaan PUT III Perseroan. Keterangan lebih lanjut mengenai persyaratan pemesanan pembelian PUT III dapat dilihat pada Bab XIII Prospektus ini.

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM TERBATAS III

Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 200.074.475 (dua ratus juta tujuh puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh lima) saham biasa atas nama atau sebanyak-banyaknya 11,22% (sebelas koma dua dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PUT III dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan harga Rp 500,- (lima ratus Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya bernilai sebanyak-banyaknya Rp100.037.237.500,-(seratus miliar tiga puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah). Saham-saham yang ditawarkan ini seluruhnya merupakan saham yang berasal dari portepel dan akan dicatatkan di BEI. Setiap pemegang 791 (tujuh ratus sembilan puluh satu) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan pada tanggal 22 Maret 2018 pukul 16.15 WIB berhak atas 100 (seratus) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan Pasal 33 Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015, maka akan diperlakukan pembulatan ke bawah, dan atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. HMETD ini diperdagangkan di BEI dan dilaksanakan selama 10 (sepuluh) Hari Kerja mulai tanggal 26 Maret – 9 April 2018. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Kedudukan saham yang akan diterbitkan dalam PUT III ini dibandingkan dengan kedudukan saham yang telah disetor penuh lainnya, memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal yaitu, hak-hak yang berkaitan dengan saham, antara lain hak suara dalam RUPS, hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus dan hak atas HMETD.

PT Batavia Prosperindo Makmur (“BPM”) selaku Pemegang Saham Utama telah menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan hak yang dimilikinya dalam PUT III. PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk (“BPI”) selaku Pemegang Saham Utama menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan sebagian hak nya sebanyak 18.700.000 saham baru dalam PUT III. Apabila saham baru yang ditawarkan dalam PUT III ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham HMETD publik lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.



PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak Sebagai Perusahaan Pembiayaan
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

Gedung Chase Plaza Lantai 12 dan 15
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920, Indonesia
Telp: (021) 520 0434, Fax: (021) 520 9160
Situs Internet: www.bpfi.co.id

Kantor Operasional:

Perseroan memiliki 1 kantor pusat, 2 kantor perwakilan dan 68 kantor cabang yang tersebar di pulau Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Ambon dan Papua

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT, DIMANA DEBITUR TIDAK MAMPU UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, BAIK POKOK PINJAMAN MAUPUN BUNGANYA ATAU KEDUANYA. RISIKO INI TIMBUL JIKA STRUKTUR PEMBIAYAAN KREDIT, KELAYAKAN KONSUMEN DAN PIUTANG TIDAK DIKELOLA SECARA HATI-HATI SEHINGGA MENYEBABKAN KETIDAKLANCARAN PEMBAYARAN ANGSURAN DARI KONSUMEN YANG DAPAT MENGGANGGU KINERJA PERSEROAN SECARA KESELURUHAN. RISIKO LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PERIHAL “FAKTOR RISIKO” DI DALAM PROSPEKTUS INI.

Pada tanggal 29 November 2017, Perseroan telah menyelenggarakan RUPSLB yang menyetujui rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sesuai dengan dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015.

Sebelum PUT III ini Perseroan telah mencatatkan seluruh sahamnya dan melakukan Penawaran Umum, yaitu sebagai berikut :

Keterangan	Tanggal Pencatatan di BEI	Jumlah Saham	Akumulasi Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp 100,- per saham)
Penawaran Umum Perdana (IPO)	1 Juni 2009	450.000.000	1.000.000.000	100.000.000.000
PUT I	30 Desember 2014	360.627.100	1.360.627.100	136.062.710.000
PUT II	20 Maret 2017	221.962.000	1.582.589.100	63.037.208.000

Keterangan	Tanggal Pencatatan di BEI	Jumlah Obligasi (Rp)	Keterangan
Penawaran Umum Perdana Obligasi Batavia Prosperindo Finance I Tahun 2013	4 Juli 2013	300.000.000.000	Seri A sebesar Rp 20 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% per tahun dan telah jatuh tempo tanggal 3 Juli 2014. Seri B sebesar Rp 50 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% per tahun dan telah jatuh tempo tanggal 3 Juli 2015. Seri C sebesar Rp 230 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,75% per tahun dan telah jatuh tempo tanggal 3 Juli 2016.
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance Tahap I Tahun 2016	28 Juni 2016	200.000.000.000	Seri A sebesar Rp 30 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% per tahun dan telah jatuh tempo tanggal 8 Juli 2017. Seri B sebesar Rp 170 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,00% per tahun dan akan jatuh tempo tanggal 28 Juni 2018.
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance Tahap II Tahun 2017	8 Mei 2017	300.000.000.000	Dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,00% per tahun dan akan jatuh tempo tanggal 5 Mei 2020.

KINERJA SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA

Berikut tabel historis kinerja saham di Bursa Efek Indonesia yang berisi harga tertinggi, harga terendah dan total volume perdagangan, setiap bulan terakhir dalam tahun 2017:

Tahun	Bulan	Harga Saham Tertinggi (Rp)	Harga Saham Terendah (Rp)	Harga Saham Penutupan (Rp)	Volume Perdagangan Pasar Reguler (ribuan lembar)	Volume Perdagangan Total Market (ribuan lembar)
2017	Januari	500	500	500	0,10	0,10
	Februari	500	500	500	0	0
	Maret	500	470	500	11	436
	April	500	500	500	0,20	0,20
	Mei	500	500	500	0	115.000
	Juni	500	500	500	0	0
	Juli	500	500	500	0	0
	Agustus	450	450	450	0,50	0,50
	September	450	450	450	0	0
	Oktober	496	450	490	1	1
	November	500	400	400	9	9
	Desember	510	384	384	67	260.562

Sumber: IDX Monthly Statistics, volume 26 no.1-12

Perdagangan saham Perseroan tidak pernah dihentikan oleh BEI sejak saham Perseroan dicatatkan di BEI hingga prospektus ini diterbitkan.

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Struktur Permodalan dan Komposisi Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2017 berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora, Biro Administrasi Efek Perseroan, adalah sebagai berikut:

MODAL SAHAM
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama dengan
Nilai Nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham

KETERANGAN	Nilai Nominal per Saham Rp. 100,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.200.000.000	220.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
PT Batavia Prosperindo Makmur	570.555.500	57.055.550.000	36,05%
PT Batavia Prosperindo International Tbk	566.756.100	56.675.610.000	35,81%
UOB Kay Hian Pte Ltd	100.100.000	10.010.000.000	6,33%
Masyarakat	345.177.500	34.517.750.000	21,81%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.582.589.100	158.258.910.000	100,00%
Jumlah Saham Dalam Portepel	617.410.900	61.741.090.000	

PUT III ini menawarkan sebanyak-banyaknya 200.074.475 Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak-banyaknya 11,22% dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PUT III dengan nilai nominal Rp 100,- setiap saham yang ditawarkan dengan harga Rp 500,- setiap saham sehingga sebanyak-banyaknya bernilai Rp100.037.237.500,-.

1. Dengan asumsi bahwa seluruh Pemegang saham lama dan BPM melaksanakan seluruh HMETD yang dimiliki, dan BPI melaksanakan sebagian HMETD yang dimiliki sejumlah 18.700.000 saham baru, maka secara proforma struktur permodalan sebelum dan sesudah PUT III adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	SEBELUM PUT III			SETELAH PUT III		
	Jumlah	Nominal (Rp. 100)	%	Jumlah	Nominal (Rp. 100)	%
Modal Dasar	2.200.000.000	220.000.000.000		2.200.000.000	220.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
PT Batavia Prosperindo Makmur	570.555.500	57.055.550.000	36,05%	642.686.410	64.268.641.000	36,05%
PT Batavia Prosperindo International Tbk	566.756.100	56.675.610.000	35,81%	585.456.100	58.545.610.000	32,84%
UOB Kay Hian Pte Ltd	100.100.000	10.010.000.000	6,33%	112.754.867	11.275.486.700	6,33%
Masyarakat	345.177.500	34.517.750.000	21,81%	441.766.198	44.176.619.800	24,78%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.582.589.100	158.258.910.000	100,00%	1.782.663.575	178.266.357.500	100,00%
Jumlah Saham Dalam Portepel	617.410.900	61.741.090.000		417.336.425	41.733.642.500	

2. Dengan asumsi bahwa BPM melaksanakan seluruh hak nya dan BPI melaksanakan sebagian hak yang dimiliki sejumlah 18.700.000 saham baru, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah dilaksanakannya PUT III secara proforma adalah sebagai berikut :

KETERANGAN	SEBELUM PUT III			SETELAH PUT III		
	Jumlah	Nominal (Rp. 100)	%	Jumlah	Nominal (Rp. 100)	%
Modal Dasar	2.200.000.000	220.000.000.000		2.200.000.000	220.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
PT Batavia Prosperindo Makmur	570.555.500	57.055.550.000	36,05%	642.686.410	64.268.641.024	38,41%
PT Batavia Prosperindo International Tbk	566.756.100	56.675.610.000	35,81%	585.456.100	58.545.610.000	34,99%
UOB Kay Hian Pte Ltd	100.100.000	10.010.000.000	6,33%	100.100.000	10.010.000.000	5,98%
Masyarakat	345.177.500	34.517.750.000	21,81%	345.177.500	34.517.750.000	20,63%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.582.589.100	158.258.910.000	100,00%	1.673.420.010	167.342.001.024	100,00%
Jumlah Saham Dalam Portepel	617.410.900	61.741.090.000		526.579.990	52.657.998.976	

Pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya dalam PUT III akan mengalami penurunan persentase kepemilikan saham (dilusi) yaitu maksimum 11,22% setelah PUT III. Saham baru yang berasal dari PUT III ini akan dicatatkan seluruhnya di BEI. Kedudukan saham yang akan diterbitkan dalam PUT III ini dibandingkan dengan kedudukan saham yang telah disetor penuh lainnya, memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen.

Keterangan Tentang HMETD

Saham yang ditawarkan dalam PUT III ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang akan dikeluarkan Perseroan kepada pemegang saham yang berhak. HMETD dapat diperdagangkan selama masa perdagangan melalui Bursa maupun di luar Bursa.

1. Penerima HMETD Yang Berhak

Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan pukul 16.15 WIB berhak untuk membeli saham dengan ketentuan bahwa pemegang 791 (tujuh ratus sembilan puluh satu) Saham Lama berhak atas 100 (seratus) HMETD, dimana setiap 1 HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham sebesar Harga Pelaksanaan sebesar Rp500,- (lima ratus Rupiah) per saham.

2. Pemegang HMETD Yang Sah

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- (i) Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS atau memiliki saham Perseroan di rekening efek perusahaan efek/bank kustodian pada tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan pukul 16.15 WIB, dan yang HMETD-nya tidak dijual sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau
- (ii) Pembeli/pemegang Sertifikat Bukti HMETD terakhir yang namanya tercantum di dalam di dalam kolom endorsemen pada Sertifikat Bukti HMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau
- (iii) Pemegang HMETD yang namanya tercatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

3. Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan Sertifikat Bukti HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan Sertifikat Bukti HMETD yaitu mulai tanggal 26 Maret – 9 April 2018.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut

diperdagangkan, yaitu BEI serta peraturan KSEI. Bila pemegang HMETD mengalami keraguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya berkonsultasi dengan penasehat investasi, manajer investasi atau penasehat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di BEI, sedangkan HMETD yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui Bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI.

Segala biaya dan pajak yang timbul sebagai akibat dari perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

Berdasarkan Surat Keputusan BEI No. KEP-00071/BEI/11-2013, satu satuan perdagangan HMETD ditetapkan sebanyak 100 (seratus) HMETD. Perdagangan yang tidak memenuhi satuan perdagangan HMETD dilakukan di Pasar Negosiasi dengan berpedoman pada harga HMETD yang terbentuk. Perdagangan HMETD dilakukan pada setiap hari bursa dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 12.00 waktu *Jakarta Automated Trading System* ("JATS"), kecuali hari Jumat dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 11.30 waktu JATS. Penyelesaian transaksi bursa atas HMETD dilakukan pada hari bursa yang sama dengan dilakukannya transaksi bursa (T+0) selambat-lambatnya 16.15 WIB.

Pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan HMETD-nya tersebut dapat melaksanakannya melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.

4. Bentuk HMETD

Ada 2 (dua) bentuk HMETD yang akan diterbitkan oleh Perseroan yaitu:

- a. Bagi pemegang saham yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencatumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki dan jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham serta kolom jumlah saham yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar dan jumlah pemesanan saham tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.
- b. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

5. Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD

Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari jumlah yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD yang dimilikinya, maka pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang bersangkutan dapat membuat surat permohonan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD dan memberikan kepada BAE untuk mendapatkan pecahan Sertifikat Bukti HMETD dengan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai tanggal 26 Maret – 9 April 2018.

Sertifikat Bukti HMETD hasil pemecahan dapat diambil dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah permohonan diterima lengkap oleh BAE Perseroan.

6. Nilai HMETD

Nilai bukti HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda antara pemegang HMETD satu dengan yang lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran dari pasar yang ada.

Sebagai contoh, perhitungan nilai HMETD di bawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh adalah nilai HMETD yang sesungguhnya berlaku di pasar. Penjelasan di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai HMETD.

Asumsi:

Harga pasar per saham	:	Rp a
Harga saham yang ditawarkan dalam PUT III	:	Rp r
Jumlah saham yang beredar sebelum PUT III	:	A
Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT III	:	R
Jumlah saham yang beredar sesudah PUT III	:	A + R
Harga teoritis saham baru ex-HMETD	:	

$$\frac{(Rp\ a \times A) + (Rpr \times R)}{(A + R)} = Rp\ X$$

Dengan demikian, Harga HMETD per saham : Rp X – Rp r

7. Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD

Sertifikat bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk membeli saham baru. Sertifikat Bukti HMETD hanya diterbitkan bagi pemegang saham yang belum melakukan konversi saham dan digunakan untuk memesan saham baru. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota BEI dan Bank Kustodiannya.

8. Pecahan HMETD

Berdasarkan Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 pasal 33 tentang HMETD bahwa dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham tersebut akan dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

9. Lain-lain HMETD

Syarat dan kondisi HMETD ini berada dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan hak atas pemindahan HMETD menjadi beban tanggungan pemegang sertifikat bukti HMETD atau calon pemegang HMETD.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PUT III

Dana yang diperoleh dari PUT III ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk meningkatkan modal kerja Perseroan.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil PUT III ini secara berkala kepada OJK dan juga akan mempertanggung jawabkan realisasi penggunaan dana hasil PUT III ini secara periodik sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 dan PP No. 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK, total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 1,46% dari hasil dana PUT III, yang meliputi:

ALOKASI BIAYA	%
Biaya Jasa Penasehat Keuangan (<i>Financial Advisory Fee</i>)	0,50
Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal :	
• Akuntan Publik	0,39
• Konsultan Hukum	0,18
• Notaris	0,07
SUB TOTAL	0,64
• Biaya OJK	0,05
• Biaya BEI	0,10
SUB TOTAL	0,15
Biaya-biaya lain :	
Biro Administrasi Efek	0,09
Percetakan, Iklan, dan <i>Public Expose</i>	0,08
SUB TOTAL	0,17
TOTAL NETT	1,46

Perseroan akan menggunakan dana hasil PUT III ini berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku terutama di bidang pasar modal.

Perseroan akan mempertanggung jawabkan realisasi penggunaan dana hasil PUT III ini kepada para pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan dan secara berkala kepada OJK sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan rencana penggunaan dana hasil PUT III ini, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK dengan mengemukakan alasan dan pertimbangannya dan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan melalui RUPS.

PENGGUNAAN DANA HASIL PUT II

Tidak terdapat sisa dana hasil perolehan Penawaran Umum Terbatas II kepada para pemegang saham dalam rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Perseroan karena telah habis digunakan sesuai dengan rencana penggunaan dana terkait. Penjelasan penggunaan dan tersebut sesuai dengan surat Perseroan yang disampaikan kepada OJK No. 01461/BPF/II/2017 tanggal 10 Juli 2017 mengenai Laporan Berkala Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

III. PERNYATAAN UTANG

Posisi liabilitas Perseroan per tanggal 30 September 2017 yang disajikan berikut ini diambil dari Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Juninho Widjaja, CPA dari KAP Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (*Member Crowe Horwath International*) dengan opini Wajar Tanpa Modifikasi. Saldo liabilitas Perseroan pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar Rp936.358 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Total
Utang bank	436.781
Beban masih harus dibayar	
Pihak ketiga	15.289
Pihak berelasi	3.447
Utang pajak	1.269
Efek utang yang diterbitkan – neto	465.123
Liabilitas imbalan kerja karyawan	14.449
Total Liabilitas	936.358

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak Pemegang Obligasi dan pemegang saham publik.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan tidak ada kewajiban Perseroan yang telah jatuh tempo yang belum dilunasi.

1. Utang Bank

Pada tanggal 30 September 2017, nilai Utang Bank adalah sebesar Rp436.781 juta yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Total
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	161.037
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	101.059
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	65.646
PT Bank Victoria International Tbk	57.510
PT Bank Sinarmas Tbk	43.372
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	6.428
PT Bank MNC International Tbk	1.945
PT Bank Central Asia Tbk	1.815
PT Bank ICBC Indonesia	326
Dikurangi beban transaksi yang belum diamortisasi	(2.357)
Total	436.781

PT Bank Maybank Indonesia Tbk.

Berdasarkan Akta Notaris No. 8 tanggal 4 April 2014 dari Ny. Veronica Nataadmadja, S.H., Notaris di Jakarta, PT Bank Maybank Indonesia Tbk menyetujui permohonan fasilitas kredit baru Pinjaman Berjangka (*Term-loan*) dengan batas maksimum sebesar Rp 100.000.000.000, dengan jangka waktu pembiayaan maksimum 3 tahun sejak pencairan pinjaman. Pinjaman ini dikenakan bunga berkisar antara 12,00% - 12,50% per tahun dan fasilitas-fasilitas pinjaman ini dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen yang diikat secara fidusia sebesar maksimum Rp 125.000.000.000.

Berdasarkan Akta Notaris No. 19 tanggal 25 November 2016 dari Ny. Veronica Nataadmadja, S.H., Notaris di Jakarta, PT Bank Maybank Indonesia Tbk menyetujui permohonan fasilitas kredit baru Pinjaman Berjangka II (*Term-loan II*) dengan batas maksimum sebesar Rp 200.000.000.000, dengan jangka waktu pembiayaan maksimum 4 tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian ini. Pinjaman ini dikenakan bunga berkisar antara 11,00% per tahun dan fasilitas-fasilitas pinjaman

ini dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen yang diikat secara fidusia sebesar maksimum Rp 210.000.000.000.

Nilai tercatat piutang pembiayaan konsumen yang dijadikan jaminan atas fasilitas pinjaman ini sebesar Rp218.971.732.774, Rp47.796.587.700 dan Rp13.778.703.198 pada tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015.

Selama pinjaman belum dilunasi, Perusahaan harus memelihara rasio jumlah utang terhadap jumlah ekuitas tidak melebihi rasio 8:1.

Pada tanggal 30 September 2017 dan 31 Desember 2016 dan 2015 Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian fasilitas pinjaman ini.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Berdasarkan Akta Notaris No. 28 tanggal 13 Juni 2012 dari N.M. Dipo Nusantara PUA UPA, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, Perusahaan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja dengan maksimum limit sebesar Rp 75.000.000.000 untuk tujuan aktivitas sewa guna usaha dan pembiayaan konsumen. Jangka waktu penarikan terhitung mulai tanggal 13 Juni 2012 sampai dengan tanggal 12 Desember 2013. Pinjaman ini dijamin dengan piutang yang diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan maksimum sebesar Rp 78.750.000.000.

Fasilitas pinjaman ini dikenakan bunga tetap per tahun sebagai berikut:

Tenor pinjaman sampai dengan 1 tahun	: 11,50%
Tenor pinjaman > 1 - 2 tahun	: 11,75%
Tenor pinjaman > 2 - 3 tahun	: 12,00%

Berdasarkan Akta Notaris No. 54 tanggal 25 Oktober 2012 dari N.M. Dipo Nusantara PUA UPA, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, Perseroan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja dengan maksimum limit sebesar Rp 75.000.000.000 untuk tujuan aktivitas sewa guna usaha dan pembiayaan konsumen. Jangka waktu penarikan terhitung mulai tanggal 25 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 12 Desember 2013. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 10,50% per tahun dan dijamin dengan piutang yang diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan maksimum sebesar Rp 78.750.000.000.

Berdasarkan Akta Notaris No. 23 tanggal 22 Agustus 2013 dari N.M. Dipo Nusantara PUA UPA, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, Perusahaan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja dengan maksimum limit sebesar Rp 75.000.000.000 untuk tujuan aktivitas sewa guna usaha dan pembiayaan konsumen. Jangka waktu penarikan terhitung mulai tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 21 Februari 2015. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 10,75% per tahun dan dijamin dengan piutang yang diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan maksimum sebesar Rp 78.750.000.000.

Berdasarkan Akta Notaris No. 64 tanggal 17 Desember 2013 dari N.M. Dipo Nusantara PUA UPA, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, Perseroan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja dengan maksimum limit sebesar Rp 75.000.000.000 untuk tujuan aktivitas sewa guna usaha dan pembiayaan konsumen. Jangka waktu penarikan terhitung mulai tanggal 17 Desember 2013 sampai dengan tanggal 21 Februari 2015. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 11,00% per tahun dan dijamin dengan piutang yang diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan maksimum sebesar Rp 78.750.000.000.

Berdasarkan Akta Notaris No. 21 tanggal 9 Juni 2014 dari N.M. Dipo Nusantara PUA UPA, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, Perseroan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja dengan maksimum limit sebesar Rp 75.000.000.000 untuk tujuan aktivitas pembiayaan konsumen dan sewa guna usaha, kecuali alat berat untuk aktivitas pertambangan. Jangka waktu penarikan terhitung mulai tanggal 9 Juni 2014 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019. Pinjaman dikenakan bunga sebesar 12,5% per tahun dan dijamin dengan piutang yang diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan maksimum sebesar Rp 78.750.000.000.

Berdasarkan Akta Notaris No. 81 tanggal 26 November 2014 dari N.M. Dipo Nusantara PUA UPA, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, Perseroan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja dengan maksimum limit sebesar Rp 75.000.000.000 untuk tujuan aktivitas pembiayaan konsumen dan sewa guna usaha, kecuali alat berat untuk aktivitas pertambangan. Jangka penarikan terhitung mulai tanggal 26 November 2014 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 12,5% per tahun dan dijamin dengan piutang yang diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan maksimum sebesar Rp 78.750.000.000.

Berdasarkan Akta Notaris No. 1 tanggal 1 September 2016 dari N.M. Dipo Nusantara PUA UPA, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, Perseroan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja dengan maksimum limit sebesar Rp75.000.000.000 untuk tujuan aktivitas pembiayaan konsumen dan sewa guna usaha, kecuali alat berat untuk aktivitas pertambangan. Jangka penarikan terhitung mulai tanggal 1 September 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 11,00% - 11,5% per tahun dan dijamin dengan piutang yang diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan maksimum sebesar Rp78.750.000.000.

Total nilai tercatat sewa pembiayaan yang dijadikan jaminan atas fasilitas pinjaman ini masing-masing sebesar Rp226.411.500, Rp 28.052.772.949 dan Rp54.288.983.679 pada tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015.

Total nilai tercatat piutang pembiayaan konsumen yang dijadikan jaminan atas fasilitas pinjaman ini masing-masing sebesar Rp140.974.861.525, Rp113.605.908.039 dan Rp53.749.538.789, pada tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015.

Selama pinjaman belum dilunasi, Perseroan harus memelihara rasio jumlah utang terhadap jumlah ekuitas tidak melebihi rasio 9:1.

Pada tanggal 30 September 2017 dan 31 Desember 2016 dan 2015, Perseroan telah memenuhi seluruh persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian fasilitas-fasilitas pinjaman ini.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

Berdasarkan Akta Notaris No. 45 tanggal 9 Mei 2014 dari Herdimansyah Chaidirsyah, S.H., Notaris di Jakarta, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk menyetujui permohonan fasilitas Kredit Modal Kerja dengan batas maksimum sebesar Rp 40.000.000.000. Jangka waktu pembiayaan maksimum 48 bulan sejak tanggal penarikan fasilitas. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 12,25% per tahun dan dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen yang diikat secara fidusia sebesar maksimum Rp 44.000.000.000.

Berdasarkan Akta Notaris No. 21 tanggal 14 April 2015 dari Indra Meidi, S.H., Notaris di Jakarta, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk menyetujui permohonan fasilitas Kredit Modal Kerja dengan batas maksimum sebesar Rp 60.000.000.000. Jangka waktu pembiayaan maksimum 54 bulan sejak tanggal penarikan fasilitas. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 12,50% per tahun dan dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen yang diikat secara fidusia maksimum sebesar Rp 66.000.000.000.

Berdasarkan Akta Notaris No. 14 tanggal 8 September 2016 dari Indra Meidi, S.H., Notaris di Jakarta, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk menyetujui Perjanjian Kredit Modal Kerja bersifat Non-revolving dengan maksimum limit sebesar Rp 40.000.000.000. Fasilitas tersebut memiliki jangka waktu pembiayaan selama 36 bulan dan jangka waktu penarikan selama 6 bulan yang dimulai sejak tanggal penandatanganan perjanjian ini. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 11,50% per tahun dan dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen yang diikat secara fidusia maksimum sebesar Rp 44.000.000.000.

Berdasarkan Surat Persetujuan Kredit No. 2320/JKT-Comm/IX/2016 tanggal 30 September 2016, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk menyetujui Perjanjian Kredit Tambahan Modal Kerja bersifat Nonrevolving dengan maksimum limit sebesar Rp 15.000.000.000. Fasilitas tersebut memiliki jangka waktu kredit selama 1 bulan yang dimulai sejak tanggal penandatanganan perjanjian ini. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 1,50% per bulan dan dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen yang dialihkan. Fasilitas ini telah dilunasi Perseroan pada tanggal 3 Oktober 2016.

Berdasarkan Akta Notaris No. 21 tanggal 21 Juni 2017 dari Indra Meidi, S.H., Notaris di Jakarta, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk menyetujui permohonan fasilitas Kredit Modal Kerja dengan batas maksimum sebesar Rp 35.000.000.000. Jangka waktu pembiayaan maksimum 42 bulan sejak tanggal penarikan fasilitas. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 11,50% per tahun dan dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen yang diikat secara fidusia sebesar maksimum Rp 38.500.000.000.

Total nilai tercatat piutang sewa pembiayaan yang dijadikan jaminan atas fasilitas pinjaman ini sebesar Rp 157.795.000, Rp 97.037.000 dan Rp 371.667.446 pada tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015.

Total nilai tercatat piutang pembiayaan konsumen yang dijadikan jaminan atas fasilitas pinjaman ini masing-masing sebesar Rp 86.843.160.950, Rp 107.042.793.801 dan Rp 85.577.415.165 pada tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015.

Selama pinjaman belum dilunasi, Perseroan harus memelihara rasio jumlah utang terhadap jumlah ekuitas tidak melebihi rasio 8:1.

Pada tanggal 30 September 2017 dan 31 Desember 2016 dan 2015, Perseroan telah memenuhi seluruh persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian fasilitas-fasilitas pinjaman ini.

PT Bank Victoria International Tbk.

Berdasarkan Akta Notaris No. 34 tanggal 9 Mei 2012 dari Suwarni Sukirman S.H., Notaris di Jakarta, Perseroan dan PT Bank Victoria International Tbk menandatangani Perjanjian Kredit Pinjaman Tetap Dengan Angsuran IV (PTDA IV) untuk pembiayaan mobil dengan batas maksimum sebesar Rp 25.000.000.000. Fasilitas tersebut memiliki jangka waktu pembiayaan selama 36 bulan dan jangka waktu penarikan selama 9 bulan yang dimulai tanggal 9 Mei 2012 sampai dengan tanggal 9 Februari 2013.

Fasilitas pinjaman ini dikenakan bunga tetap sebagai berikut:

Tenor pinjaman sampai dengan 1 tahun	: 11,25%
Tenor pinjaman > 1 - 2 tahun	: 11,50%
Tenor pinjaman > 2 - 3 tahun	: 11,75%

Berdasarkan Akta Notaris No. 37 tanggal 9 Mei 2012 dari Suwarni Sukirman S.H., Notaris di Jakarta, Perseroan dan PT Bank Victoria International Tbk menandatangani Perjanjian Kredit Pinjaman Tetap Dengan Angsuran V (PTDA V) untuk pembiayaan alat berat dengan batas maksimum sebesar Rp 25.000.000.000. Fasilitas tersebut memiliki jangka waktu pembiayaan selama 36 bulan dan jangka waktu penarikan selama 9 bulan yang dimulai tanggal 9 Mei 2012 sampai dengan tanggal 9 Februari 2013.

Fasilitas pinjaman ini dikenakan bunga tetap sebagai berikut:

Tenor pinjaman sampai dengan 1 tahun	: 12,25%
Tenor pinjaman > 1 - 2 tahun	: 12,50%
Tenor pinjaman > 2 - 3 tahun	: 12,75%

Berdasarkan Akta Notaris No. 132 tanggal 14 Agustus 2012 dari Suwarni Sukirman S.H., Notaris di Jakarta, Perseroan dan PT Bank Victoria International Tbk menandatangani Perjanjian Kredit Pinjaman Tetap Dengan Angsuran VI (PTDA VI) untuk pembiayaan mobil dengan batas maksimum sebesar Rp 50.000.000.000. Fasilitas tersebut memiliki jangka waktu pembiayaan selama 36 bulan dan jangka waktu penarikan selama 12 bulan yang dimulai tanggal 14 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2013.

Fasilitas pinjaman ini dikenakan bunga tetap sebagai berikut:

Tenor pinjaman sampai dengan 1 tahun	: 12,00%
Tenor pinjaman > 1 - 2 tahun	: 12,25%
Tenor pinjaman > 2 - 3 tahun	: 12,50%

Berdasarkan Akta Notaris No. 281 tanggal 30 April 2013 dari Suwarni Sukirman S.H., Notaris di Jakarta, Perseroan dan PT Bank Victoria International Tbk menandatangani Perjanjian Kredit Pinjaman Tetap Dengan Angsuran VII (PTDA VII) untuk pembiayaan mobil dengan batas maksimum sebesar Rp 75.000.000.000. Fasilitas tersebut memiliki jangka waktu pembiayaan selama 36 bulan dan jangka waktu penarikan selama 12 bulan yang dimulai tanggal 30 April 2013 sampai dengan tanggal 30 April 2014.

Fasilitas pinjaman ini dikenakan bunga tetap sebagai berikut:

Tenor pinjaman sampai dengan 1 tahun : 10,50%
Tenor pinjaman > 1 - 2 tahun : 10,75%
Tenor pinjaman > 2 - 3 tahun : 11,00%

Berdasarkan Akta Notaris No. 3 tanggal 1 Desember 2015 dari Suwarni Sukirman S.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan dan PT Bank Victoria International Tbk menandatangani Perjanjian Kredit Pinjaman Tetap Dengan Angsuran VIII (PTDA VIII) untuk pembiayaan mobil dengan batas maksimum sebesar Rp 100.000.000.000. Fasilitas tersebut memiliki jangka waktu pembiayaan selama 36 bulan dan jangka waktu penarikan selama 12 bulan yang dimulai sejak tanggal penandatanganan perjanjian ini.

Fasilitas pinjaman ini dikenakan bunga tetap sebagai berikut:

Tenor pinjaman s.d. 1 tahun : 11,00%
Tenor pinjaman > 1 - 2 tahun : 11,50%
Tenor pinjaman > 2 - 3 tahun : 11,75%

Berdasarkan Surat Persetujuan kredit No.116/SKM-KPP/VIC/XI/15 tanggal 23 November 2015, PT Bank Victoria International Tbk menyetujui Perjanjian Kredit Demand Loan (*Uncommitted*) dengan batas maksimum sebesar Rp 100.000.000.000. Jangka waktu pembiayaan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penarikan fasilitas.

Berdasarkan Akta Notaris No. 1 tanggal 1 Desember 2015 dari Suwarni Sukirman S.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan dan PT Bank Victoria International Tbk menandatangani Perjanjian Kredit Demand Loan (*Uncommitted*) dengan batas maksimum sebesar Rp 100.000.000.000. Jangka waktu pembiayaan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penarikan fasilitas.

Perjanjian tersebut telah diubah dan dimuat dalam Surat Pengurangan Plafond Fasilitas Kredit - Demand Loan No. 040/SKM/KPP/VIC/III/16 tanggal 14 Maret 2016, dimana PT Bank Victoria International Tbk mengurangi fasilitas kredit yang diberikan dari sebesar Rp 100.000.000.000 diubah menjadi Rp 50.000.000.000.

Berdasarkan Akta Notaris No. 46 tanggal 13 April 2017 dari Suwarni Sukirman, S.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan, PT Magna Finance Tbk dan PT Bank Victoria International Tbk menandatangani Akta Novasi Perjanjian Utang. Berdasarkan akta tersebut Perusahaan, PT Magna Finance Tbk dan PT Bank Victoria International Tbk setuju untuk mengalihkan fasilitas pinjaman PT Magna Finance Tbk kepada Perusahaan sehubungan dengan transaksi akuisisi aset dan liabilitas.

Berdasarkan Akta Notaris No. 47 tanggal 13 April 2017 dari Suwarni Sukirman, S.H., Notaris di Jakarta, fasilitas pinjaman tersebut adalah berupa kredit modal kerja bersifat tetap dengan limit maksimum sebesar Rp 38.845.377.442 dan dengan jangka waktu pembiayaan maksimal 48 bulan. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 12,00% - 15,00% per tahun.

Fasilitas-fasilitas pinjaman ini dijamin dengan piutang sewa pembiayaan dan piutang pembiayaan konsumen yang diikat secara fidusia.

Nilai tercatat piutang sewa pembiayaan yang dijadikan jaminan atas fasilitas pinjaman ini masing-masing sebesar Rp 1.911.140.000 dan Rp 117.381.263 pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

Nilai tercatat piutang pembiayaan konsumen yang dijadikan jaminan atas fasilitas pinjaman ini masing-masing sebesar Rp 74.359.891.118, Rp 94.770.661.000 dan Rp 22.045.208.784 pada tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015.

Selama pinjaman belum dilunasi, Perusahaan harus memelihara rasio jumlah utang terhadap jumlah ekuitas tidak melebihi rasio 8:1.

Pada tanggal 30 September 2017 dan 31 Desember 2016 dan 2015, Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian fasilitas-fasilitas pinjaman ini.

PT Bank Sinarmas Tbk.

Berdasarkan Akta Notaris No. 822 tanggal 26 Mei 2017 dari Hartojo, S.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan dan PT Bank Sinarmas Tbk menandatangani Perjanjian Kredit Term Loan Non Revolving dengan maksimum limit sebesar Rp 100.000.000.000. Jangka waktu penarikan terhitung mulai tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 11,00% per tahun dan dijamin dengan piutang yang diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan maksimum sebesar Rp 105.000.000.000.

Total nilai tercatat piutang pembiayaan konsumen yang dijadikan jaminan atas fasilitas pinjaman ini sebesar Rp 57.305.359.547 pada tanggal 30 September 2017.

Selama pinjaman belum dilunasi, Perusahaan harus memelihara gearing ratio dibawah 10 kali.

Pada tanggal 30 September 2017, Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian fasilitas pinjaman ini.

PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk.

Berdasarkan Akta Notaris No. 18 tanggal 27 Maret 2017 dari Sri Budi Lestariningsih, S.H., Notaris di Jakarta, PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk menyetujui Perjanjian Kredit Pinjaman Tetap Dengan Angsuran dengan batas maksimum sebesar Rp 100.000.000.000. Fasilitas tersebut memiliki jangka waktu selama 48 bulan yang dimulai sejak tanggal penandatanganan perjanjian ini. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 12,00% per tahun dan dijamin dengan piutang yang diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan maksimum sebesar Rp 100.000.000.000.

Total nilai tercatat piutang pembiayaan konsumen yang dijadikan jaminan atas fasilitas pinjaman ini sebesar Rp 8.658.388.846 pada tanggal 30 September 2017.

Selama pinjaman belum dilunasi, Perusahaan harus memelihara *gearing ratio* tidak lebih dari 1000%.

Pada tanggal 30 September 2017, Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian fasilitas pinjaman ini.

PT Bank MNC International Tbk.

Berdasarkan Akta Notaris No. 82 tanggal 29 September 2016 dari Indrasari Kresnadjaja, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta, Perusahaan dan PT Bank MNC Internasional Tbk menandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja dengan maksimum limit sebesar Rp 25.000.000.000 untuk tujuan aktivitas pembiayaan. Jangka waktu penarikan maksimal selama 6 bulan sejak tanggal Perjanjian Kredit ini ditandatangani. Pinjaman ini dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen yang diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan maksimum sebesar Rp 25.004.884.666. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 14,00% per tahun.

Berdasarkan Akta Notaris No. 20 tanggal 21 April 2017 dari Indrasari Kresnadjaja S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, Perusahaan, PT Magna Finance Tbk dan PT Bank MNC International Tbk menandatangani Akta Perjanjian Kredit. Perusahaan, PT Magna Finance Tbk dan PT Bank MNC International Tbk setuju untuk mengalihkan fasilitas pinjaman PT Magna Finance Tbk kepada Perusahaan sehubungan dengan transaksi akuisisi asset dan liabilitas (Catatan 4). Fasilitas pinjaman berupa pinjaman transaksi khusus dengan limit maksimum sebesar Rp 47.578.791.309. Pinjaman ini dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen yang diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan maksimum sebesar Rp 45.744.667.321. Pinjaman ini dikenai bunga sebesar 11,25%-14,50% per tahun.

Total nilai tercatat piutang pembiayaan konsumen yang dijadikan jaminan atas fasilitas pinjaman ini masing-masing sebesar Rp 9.340.218.961 pada tanggal 30 September 2017.

Selama pinjaman belum dilunasi, Perusahaan harus memelihara rasio jumlah utang terhadap jumlah ekuitas tidak melebihi rasio 8:1.

Pada tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015, Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian fasilitas-fasilitas pinjaman ini.

PT Bank Central Asia Tbk.

Berdasarkan Akta Notaris No. 19 tanggal 18 Desember 2013 dari Karin Christiana Basoeki, S.H., Notaris di Jakarta, PT Bank Central Asia Tbk menyetujui pemberian Fasilitas Kredit Lokal maksimum Rp 7.000.000.000 dan Kredit Investasi I maksimum Rp 7.400.000.000 kepada Perusahaan. Jangka waktu selama 3 (tiga) tahun.

Berdasarkan surat No. 0587/SPPJ/SLK-KOM.2016 tanggal 20 Desember 2016 bahwa PT Bank Central Asia Tbk menyetujui perpanjangan Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) kepada Perusahaan dengan jangka waktu sampai dengan 30 Desember 2017.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan aset tetap Perusahaan yang terdiri dari 6 bidang tanah dan bangunan yang terletak di daerah Palembang, Sidoarjo, Semarang, Tegal, Lubuk Linggau dan Denpasar pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015. Berdasarkan Akta Notaris No. 20 tanggal 18 Desember 2013 dari Karin Christiana Basoeki, S.H., Notaris di Jakarta, PT Bank Central Asia Tbk menyetujui pemberian Fasilitas Kredit *Installment Loan* 3 maksimum Rp 52.000.000.000 kepada Perseroan dengan jangka waktu selama 3 (tiga) tahun.

Berdasarkan surat No. 203b/SPPK/SBK-W08/2016 tanggal 24 November 2016 bahwa PT Bank Central Asia Tbk menyetujui perpanjangan Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas *Installment Loan* 3 kepada Perusahaan dengan jangka waktu selama 3 (tiga) tahun.

Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 11,75% per tahun untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

Selama pinjaman belum dilunasi, Perseroan harus memelihara rasio jumlah utang terhadap jumlah ekuitas tidak melebihi rasio 10:1.

Pada tanggal 30 September 2017 dan 31 Desember 2016 dan 2015, Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian fasilitas - fasilitas pinjaman.

PT Bank ICBC Indonesia

Berdasarkan Akta Notaris No. 33 tanggal 17 Juli 2013 dari Deni Thanur, S.E., SH., M.Kn., Notaris di Jakarta, Perseroan dan PT Bank ICBC Indonesia menandatangani Perjanjian Kredit Pinjaman Tetap maksimum pinjaman sebesar Rp 25.000.000.000. Jangka waktu pembiayaan 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal penarikan fasilitas. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 10,50% per tahun dan dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen yang diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan sebesar 110% dari jumlah pinjaman yang ditarik.

Berdasarkan Akta Notaris No. 3 tanggal 8 Agustus 2014 dari Deni Thanur, S.E., SH., M.Kn., Notaris di Jakarta, Perseroan dan PT Bank ICBC Indonesia menandatangani Perjanjian Kredit Pinjaman Tetap maksimum pinjaman sebesar Rp 50.000.000.000. Jangka waktu pembiayaan 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal penarikan fasilitas. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 12,50% per tahun dan dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen yang diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan sebesar 110% dari jumlah pinjaman yang ditarik.

Total nilai tercatat piutang sewa pembiayaan yang dijadikan jaminan atas fasilitas pinjaman ini masing-masing sebesar Rp259.145.908 pada tanggal 31 Desember 2015.

Total nilai tercatat piutang pembiayaan konsumen yang dijadikan jaminan atas fasilitas pinjaman ini masing-masing sebesar Rp3.576.016.000, Rp13.968.782.000 dan Rp39.283.324.905 pada tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015.

Selama pinjaman belum dilunasi, Perseroan harus memelihara rasio jumlah utang terhadap jumlah ekuitas tidak melebihi rasio 10:1.

Pada tanggal 30 September 2017 dan 31 Desember 2016 dan 2015, Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian fasilitas-fasilitas pinjaman ini.

PT Bank Permata Tbk.

Berdasarkan Akta Notaris No. 34 tanggal 19 November 2010 dari Ny. Sjarmeini S. Chandra, S.H., Notaris di Jakarta, PT Bank Permata Tbk memberikan tambahan Fasilitas Pinjaman Atas Piutang Pembiayaan Kendaraan sebesar Rp 20.000.000.000, sehingga maksimum pinjaman menjadi sebesar Rp 50.000.000.000. Fasilitas pinjaman ini berlaku sejak tanggal 19 November 2010 dan berakhir pada tanggal 19 November 2011.

Perjanjian tersebut telah diubah beberapa kali dan perubahan terakhir dimuat dalam Addendum Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK-RF/13/2161/ADD/FI tertanggal 18 November 2013. Dalam addendum tersebut, PT Bank Permata Tbk menyetujui untuk memperpanjang jangka waktu penarikan fasilitas pinjaman tersebut diatas sampai dengan tanggal 19 November 2014.

Fasilitas tersebut bersifat *revolving* dan dikenakan bunga tetap menurut pemberitahuan dari bank pada setiap penarikan dan dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen yang diikat secara fidusia serta Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor(BPKB) milik nasabah yang disimpan di PT Bank Permata Tbk.

Pinjaman ini dikenakan bunga berkisar antara 13,00% - 13,50% per tahun masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Nilai tercatat piutang pembiayaan konsumen yang dijadikan jaminan atas fasilitas pinjaman ini masing-masing sebesar Rp 2.955.062.000 pada tanggal 31 Desember 2014.

Pada bulan Maret 2015, Perseroan telah melunasi seluruh pokok fasilitas dari PT Bank Permata Tbk pada jatuh tempo dan jumlah yang telah ditentukan.

PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk.

Berdasarkan Surat Persetujuan Kredit No. 288/BWSI/LN/IX/2017 tanggal 15 September 2017, PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk menyetujui Perjanjian Kredit Modal Kerja dengan batas maksimum sebesar Rp 50.000.000.000. Fasilitas tersebut memiliki jangka waktu pembiayaan selama 36 bulan. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 11,00% per tahun dan dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen yang diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan sebesar 110% dari jumlah pinjaman yang ditarik. Sampai dengan tanggal laporan keuangan, Perusahaan belum menggunakan fasilitas ini.

PT Bank J Trust Indonesia Tbk.

Berdasarkan Akta Notaris No. 60 tanggal 25 Nopember 2013 dari Indrasari Kresnadjaja, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, Perseroan dan PT Bank J Trust Indonesia Tbk menandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja dengan maksimum pinjaman sebesar Rp 10.000.000.000. Jangka waktu penarikan sampai dengan 25 Nopember 2014 dengan jangka waktu pembiayaan 60 (enam puluh enam) bulan sejak tanggal penarikan fasilitas. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 12,75% per tahun dan dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen yang diikat secara fidusia sebesar nilai maksimum 100% dari maksimum kredit. Sampai dengan tanggal penarikan berakhir, Perseroan tidak menggunakan fasilitas ini.

Rincian batasan maksimum Persentase Kredit Bermasalah per masing-masing bank adalah sebagai berikut:

	Maksimum Persentase Kredit Bermasalah
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	3%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	3%
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	3%
PT Bank Victoria International Tbk	3%
PT Bank Sinarmas Tbk	3%
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	3%
PT Bank MNC International Tbk	3%
PT Bank Central Asia Tbk	3%
PT Bank ICBC Indonesia	3%

Persentase kredit bermasalah Perusahaan pada tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 masing masing sebesar 1,35%, 1,49% dan 0,45% dari total piutang. Pada tanggal 30 September 2017, Perusahaan telah memenuhi persentase yang disyaratkan tersebut.

2. Beban Masih Harus Dibayar

Pada tanggal 30 September 2017, nilai Beban Masih Harus Dibayar adalah sebesar Rp18.735 juta yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Total
Pihak Ketiga	
Premi asuransi	6.480
Bunga	5.485
Lain-lain	3.324
Pihak Berelasi	
Premi asuransi	3.447
Total	18.736

Beban masih harus dibayar kepada pihak Berelasi dari Perseroan dalam hal ini adalah PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk. merupakan estimasi utang premi asuransi yang harus dibayarkan kepada PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk. sehubungan dengan transaksi sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen. Premi asuransi yang masih harus dibayarkan kepada PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk. sampai dengan 30 September 2017 adalah sebesar Rp3.447 juta yang mana mewakili 0,37% dari jumlah liabilitas yang dimiliki Perseroan.

3. Utang Pajak

Utang pajak Perseroan per tanggal 30 September 2017 adalah sebesar Rp1.269 juta yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Pajak Penghasilan	Total
Pasal 4 (2)	62
Pasal 21	266
Pasal 23	11
Pasal 25	930
Total	1.269

4. Efek Utang Yang Diterbitkan

Pada tanggal 30 September 2017, nilai Efek Utang Yang Diterbitkan adalah sebesar Rp465.123 juta yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Total
Obligasi Berkelanjutan IBatavia Prosperindo Finance Tahap I Tahun 2016	
Seri A	-
Seri B	170.000
Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance Tahap II Tahun 2017	300.000
Dikurangi beban emisi efek utang yang belum diamortisasi - neto	(4.877)
Total	465.123

Pada tanggal 3 Juli 2013, Perseroan menerbitkan Obligasi Batavia Prosperindo Finance I Tahun 2013 dengan tingkat bunga tetap, dengan jumlah pokok sebesar Rp 300.000.000.000.

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu dengan adanya 3 (tiga) seri Obligasi yang ditawarkan sebagai berikut:

Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp 20.000.000.000 dengan bunga Obligasi sebesar 9,25% per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 hari kalender sejak tanggal emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% dari Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.

Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp 50.000.000.000 dengan bunga Obligasi sebesar 9,50% per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 2 (dua) tahun sejak tanggal emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% dari Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.

Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp 230.000.000.000 dengan bunga Obligasi sebesar 10,75%. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% dari Pokok Obligasi Seri C pada saat tanggal jatuh tempo.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi. Pembayaran bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2013, sedangkan pembayaran bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing obligasi adalah pada tanggal 13 Juli 2014 untuk Obligasi Seri A, 3 Juli 2015 untuk Obligasi Seri B dan 3 Juli 2016 untuk Obligasi Seri C.

Pada tanggal 20 Juni 2016, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari OJK berdasarkan Surat OJK No. S-306/D.04.2016 untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance kepada masyarakat dengan jumlah pokok sebesar Rp 500.000.000.000.

Dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, Perusahaan telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance Tahap I dengan jumlah pokok sebesar Rp 200.000.000.000. Pada tanggal 28 Juni 2016, seluruh Obligasi tersebut telah dicatat pada Bursa Efek Indonesia dengan beban emisi sebesar Rp 5.026.925.651.

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender sampai dengan 2 (dua) tahun sejak tanggal emisi. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu dengan adanya 2 (dua) seri Obligasi yang ditawarkan sebagai berikut:

Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp 30.000.000.000 dengan bunga Obligasi sebesar 10,50% per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 hari kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% dari Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.

Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp 170.000.000.000 dengan bunga Obligasi sebesar 11,00% per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 2 (dua) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% dari Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan tanggal pembayaran bunga Obligasi. Pembayaran bunga obligasi pertama dilakukan pada tanggal 28 September 2016, sedangkan pembayaran bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 8 Juli 2017 untuk Obligasi Seri A, 28 Juni 2018 untuk Obligasi Seri B.

Kemudian, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance Tahap II Tahun 2017 dengan jumlah pokok sebesar Rp 300.000.000.000 dengan bunga obligasi sebesar 11,00% per tahun. Pada tanggal 8 Mei 2017, seluruh obligasi tersebut tersebut telah dicatat pada Bursa Efek Indonesia dengan biaya emisi sebesar Rp 3.482.943.498.

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan berjangka waktu 36 bulan sejak tanggal emisi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi. Pembayaran bunga Obligasi pertama dilakukan pada tanggal 5 Agustus 2017, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi adalah pada tanggal 5 Mei 2020.

Dalam Perjanjian Perwalianan diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Perseroan antara lain obligasi ini akan dijaminan dengan jaminan fidusia berupa piutang lancar pembiayaan konsumen. Selama pokok dan bunga obligasi belum dilunasi, Perseroan tidak diperkenankan tanpa persetujuan wali amanat, antara lain melakukan penggabungan usaha kecuali dilakukan pada bidang yang sama dan tidak mempunyai dampak negatif.

Berdasarkan surat No. 576/PEF-Dir/IV/2015 tanggal 9 April 2015 dari Pemeringkat Efek Indonesia, peringkat Obligasi Seri C adalah _{id}BBB (Triple B) untuk periode sejak tanggal 9 April 2015 sampai dengan tanggal 1 April 2016.

Berdasarkan surat No. 568/PEF-Dir/III/2016 tanggal 31 Maret 2016 dari Pemeringkat Efek Indonesia, peringkat obligasi "Obligasi Batavia Prosperindo Finance I Seri C" untuk periode sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

Berdasarkan surat No. RC-164/PEF-Dir/III/2017 tanggal 10 Maret 2017 dari Pemeringkat Efek Indonesia, peringkat "Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance Tahap I Tahun 2016" adalah _{id}BBB (Triple B) untuk periode sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 1 Maret 2018. Perseroan telah melakukan pembayaran bunga obligasi sesuai dengan jatuh tempo yang telah ditetapkan dalam perjanjian perwalianan dan telah memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian perwalianan.

Pada tanggal 3 Juli 2015, Perusahaan membayar Obligasi Batavia Prosperindo Finance I Seri B yang jatuh tempo pada tanggal tersebut sebesar Rp 50.000.000.000.

Pada tanggal 3 Juli 2016, Perusahaan membayar Obligasi Batavia Prosperindo Finance I Seri C yang jatuh tempo pada tanggal tersebut sebesar Rp 230.000.000.000.

Pada tanggal 8 Juli 2017, Perusahaan membayar Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance Tahap I Tahun 2016 Seri A yang jatuh tempo pada tanggal tersebut sebesar Rp 30.000.000.000.

5. Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan

Besarnya imbalan kerja karyawan dihitung berdasarkan peraturan yang berlaku, yakni Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Tidak terdapat pendanaan khusus yang disisihkan sehubungan dengan imbalan kerja tersebut.

Perhitungan aktuarial atas imbalan kerja karyawan pada tanggal 30 September 2017 dan 2016 dan 31 Desember 2016 dan 2015, dilakukan oleh PT Binaputera Jaga Hikmah, aktuaris independen, masing-masing tanggal 17 November 2017, 31 Oktober 2016, 26 Januari 2017 dan 29 Januari 2016, dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit".

Pada tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015, jumlah karyawan yang berhak atas manfaat paska kerja tersebut masing-masing sebanyak 587, 532 dan 530 karyawan.

Pada tanggal 30 September 2017, nilai Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan adalah sebesar Rp 14.449 juta yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Total
Saldo awal	12.569
Beban periode berjalan	2.308
Kerugian aktuarial diakui pada penghasilan komprehensif lain	(178)
Pembayaran imbalan periode berjalan	(250)
Saldo Akhir	14.449

Asumsi aktuarial yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

Tingkat diskonto per tahun:	7,27%
Tingkat kenaikan gaji rata-rata per tahun:	8,00%
Usia pensiun normal:	55 Tahun
Tingkat mortalitas:	TMI III 2011
Tingkat cacat:	10% dari tingkat mortalitas
Tingkat Pengunduran diri :	
Usia 18-29	10%
Usia 30-39	5%
Usia 40-44	3%
Usia 45-49	2%
Usia 50-54	1%
Usia >55	0%

6. Fasilitas Pinjaman Yang Telah Di Gunakan Oleh Perseroan Hingga Saat Ini

Bank	Jenis fasilitas	Jumlah fasilitas maksimum	Jumlah fasilitas yang telah digunakan	Jumlah fasilitas yang belum digunakan
PT Bank Victoria International Tbk	Perjanjian Fasilitas Kredit Lokal	10.000.000.000	10.000.000.000	-
	Perjanjian Kredit Tetap Dengan Angsuran - <i>Non Revolving (Uncommitted)</i>	100.000.000.000	100.000.000.000	-
	Perjanjian Kredit Dengan memakai Jaminan - <i>Non Revolving</i>	50.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000
	Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK)	135.000.000.000	135.000.000.000	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) (<i>Non Revolving</i>)	75.000.000.000	75.000.000.000	-
	Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) (<i>Non Revolving</i>)	75.000.000.000	75.000.000.000	-
PT Bank Mutiara (J Trust)	Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) (<i>Non Revolving</i>)	150.000.000.000	150.000.000.000	-
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Perjanjian Fasilitas Pembiayaan Konsumen (<i>Non Revolving</i>)	150.000.000.000	150.000.000.000	-
	Perjanjian Fasilitas Pembiayaan Konsumen (<i>Non Revolving</i>)	150.000.000.000	138.509.785.388	11.490.214.612
PT Bank ICBC Indonesia	Perjanjian Pinjaman Kredit Tetap on <i>Demand</i>	50.000.000.000	50.000.000.000	-
PT Bank Central Asia Tbk	Perjanjian Fasilitas Kredit Lokal	7.000.000.000	-	7.000.000.000
	Perjanjian Fasilitas Kredit <i>Installment Loan</i>	52.000.000.000	2.107.947.248	49.892.052.752
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	Perjanjian Pinjaman Berjangka (<i>Term Loan</i>)	100.000.000.000	100.000.000.000	-
	Perjanjian Pinjaman Berjangka II (<i>Term Loan II</i>)	200.000.000.000	192.185.960.232	7.814.039.768
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	Perjanjian Kredit Modal Kerja Umum pada Perusahaan Pembiayaan	40.000.000.000	40.000.000.000	-
	Perjanjian Kredit Modal Kerja Umum pada Perusahaan Pembiayaan Tahap 2	60.000.000.000	60.000.000.000	-
	Perjanjian Kredit Modal Kerja Umum pada Perusahaan Pembiayaan	40.000.000.000	40.000.000.000	-
	Perjanjian Kredit Modal Kerja Umum pada Perusahaan Pembiayaan	35.000.000.000	17.853.309.680	17.146.690.320

Bank	Jenis fasilitas	Jumlah fasilitas maksimum	Jumlah fasilitas yang telah digunakan	Jumlah fasilitas yang belum digunakan
PT Bank MNC Internasional Tbk	Perjanjian Kerjasama Pemberian Fasilitas Pembiayaan Bersama	50.000.000.000	50.000.000.000	-
	Perjanjian Kerjasama Pemberian Fasilitas Pembiayaan Bersama	25.000.000.000	-	25.000.000.000
	Perjanjian Kredit Modal Kerja	125.000.000.000	125.000.000.000	-
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	Perjanjian Kredit Tetap Dengan Angsuran - <i>Non Revolving (Uncommitted)</i>	100.000.000.000	7.193.172.625	92.806.827.375
PT Bank Sinarmas Tbk	Perjanjian Pinjaman Berjangka (<i>Term Loan</i>) - <i>Non Revolving</i>	100.000.000.000	43.718.373.812	56.281.626.188
PT Bank Woori Saudara	Perjanjian Kredit Modal Kerja	50.000.000.000	-	50.000.000.000

7. Keterangan Tentang Komitmen Dan Kontinjensi

Komitmen sewa operasi – sebagai penyewa atas sewa ruang kantor pada PT Duta Anggada Realty Tbk.

Total pembayaran sewa minimum di masa depan yang tercatat di dalam kontrak dan tidak dapat di batalkan adalah sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

Jangka waktu	30 September 2017
1 tahun	1.727
2-3 tahun	182
Total	1.909

Total pembayaran sewa minimum tersebut tidak diakui sebagai kewajiban karena penagihan dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.

SETELAH TANGGAL 30 SEPTEMBER 2017 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT, DAN YANG TERJADI SEJAK TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT DI ATAS SAMPAI DENGAN TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN PUT III, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN PERIKATAN LAINNYA KECUALI LIABILITAS DAN PERIKATAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS DAN PERIKATAN YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN TERSEBUT DI ATAS YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MEMENUHI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG MERUGIKAN PEMEGANG SAHAM.

SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAU PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan. Angka-angka pada ikhtisar data keuangan penting Perseroan diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk periode-periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dan 2016 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Juninho Widjaja, CPA dari KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (*Member Crowe Horwath International*) dengan opini Wajar Tanpa Modifikasi.

Laporan Keuangan Perseroan per 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan ditandatangani oleh Partner sebagai berikut:

Per Tanggal	Kantor Akuntan Publik	Partner
30 September 2017	Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (<i>Member Crowe Horwath International</i>)	Juninho Widjaja, CPA
31 Desember 2016	Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (<i>Member Crowe Horwath International</i>)	Juninho Widjaja, CPA
31 Desember 2015	Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (<i>Member Crowe Horwath International</i>)	Juninho Widjaja, CPA

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Aset	30 September	31 Desember	
	2017	2016	2015
Kas dan setara kas	42.162	15.164	13.868
Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	300	300	-
Piutang sewa pembiayaan-pihak ketiga - neto	31.781	44.822	119.597
Piutang pembiayaan konsumen			
Pihak ketiga - neto	1.068.031	594.888	580.325
Pihak berelasi	13.048	15.545	20.467
Tagihan anjak piutang - pihak ketiga - neto	102.596	177.141	92.528
Piutang lain-lain - pihak ketiga - neto	86.453	58.764	34.861
Uang muka dan beban dibayar di muka	11.127	6.989	7.882
Investasi pada entitas asosiasi	31.827	29.716	27.325
Investasi saham	20.251	20.251	20.251
Aset tetap - neto	76.087	61.941	58.749
Aset pajak penghasilan	3.798	3.333	2.356
Tagihan pajak penghasilan	1.732	-	-
Aset lain-lain	9.538	8.748	3.514
Total Aset	1.498.731	1.037.602	981.723

(dalam jutaan Rupiah)

Liabilitas	30 September	31 Desember	
	2017	2016	2015
Utang bank	436.781	316.840	229.859
Beban masih harus dibayar			
Pihak ketiga	15.289	4.053	4.530
Pihak berelasi	3.447	1.590	4.208
Utang pajak	1.269	2.434	3.266

Liabilitas	30 September		31 Desember	
	2017	2016	2015	
Efek utang yang diterbitkan - neto	465.123	196.310	229.737	
Liabilitas imbalan kerja karyawan	14.449	12.569	10.904	
Total Liabilitas	936.358	533.796	482.504	

(dalam jutaan Rupiah)

Ekuitas	30 September		31 Desember	
	2017	2016	2015	
Modal saham - nilai nominal Rp 100,- per saham Modal dasar - 2.200.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1.582.589.100 saham pada tanggal 30 September 2017 dan 1.360.627.100 saham pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015	158.259	136.063	136.063	
Tambahan modal disetor - neto	185.025	145.575	145.575	
Saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya	250	250	250	
Belum ditentukan penggunaannya	195.751	198.545	193.361	
Penghasilan komprehensif lain				
Keuntungan revaluasi aset tetap - neto setelah pajak	23.088	23.373	23.970	
Total Ekuitas	562.373	503.806	499.219	
Total Liabilitas dan Ekuitas	1.498.731	1.037.602	981.723	

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 September		31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
Penghasilan				
Pembiayaan konsumen	138.331	97.274	132.444	140.518
Administrasi	70.370	61.159	84.459	65.284
Anjak piutang	19.860	18.430	25.657	16.554
Sewa pembiayaan	3.980	4.839	5.483	18.424
Lain-lain	16.132	7.450	10.357	9.158
Total Penghasilan	248.673	189.152	258.400	249.938
Beban Usaha				
Beban Keuangan	66.304	43.181	58.742	63.968
Gaji dan tunjangan	59.038	45.046	58.453	52.801
Umum dan administrasi	48.452	32.056	47.893	38.103
Kerugian penurunan nilai	28.580	30.404	32.556	27.791
Beban Pemasaran	15.286	11.348	15.923	11.227
Pajak	-	3.092	3.092	-
Total Beban Usaha	217.660	165.127	216.659	193.890
Laba Usaha	31.013	24.025	41.741	56.048
Bagian atas laba (rugi) entitas asosiasi - neto	2.108	1.755	2.387	(594)
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan	33.121	25.780	44.128	55.454
Beban Pajak Penghasilan	(6.334)	(5.644)	(10.216)	(13.712)
Laba Neto Periode/ Tahun Berjalan	26.787	20.136	33.912	41.742
Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain				

Uraian	30 September		31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi periode berikutnya :				
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	178	(822)	896	(2.181)
Bagian penghasilan (beban) komprehensif lain atas entitas asosiasi	4	6	4	8
Keuntungan revaluasi aset tetap	-	-	-	24.710
Efek pajak terkait				
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	(44)	206	(224)	545
Bagian penghasilan (beban) komprehensif lain atas entitas asosiasi	(1)	(2)	(1)	(2)
Keuntungan revaluasi aset tetap	-	-	-	(740)
Total Penghasilan (Beban)Komprehensif Lain	137	(612)	675	22.340
Total Laba Komprehensif	26.924	19.524	34.588	64.082
Laba Neto Per Saham Dasar	17,75	14,80	24,92	30,68

RASIO KEUANGAN PENTING

(dalam persentase, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	30 September		31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
Rasio Pertumbuhan				
Aset	44,44	1,68	5,69	(8,03)
Liabilitas	75,41	5,56	10,63	(23,69)
Ekuitas	11,62	(2,06)	0,92	14,73
Penghasilan	31,47	2,78	3,39	11,51
Beban	31,81	28,02	11,74	14,48
Laba Neto	33,03	(51,57)	(18,76)	2,47
Laba Komprehensif	37,90	(53,04)	(46,03)	58,32
Rasio Profitabilitas				
Laba Usaha / Penghasilan	12,47	12,70	16,15	22,42
Laba Tahun Berjalan / Penghasilan	10,77	10,65	13,12	16,70
Laba Komprehensif / Penghasilan	10,83	10,32	13,39	25,64
Imbal Hasil Rata-Rata Aset (ROAA)	1,80	1,31	3,33	6,53
Imbal Hasil Rata-Rata Ekuitas (ROAE)	4,79	3,95	6,87	12,84
<i>Gearing Ratio (x)</i>	1,77	1,10	1,13	1,02
Total Liabilitas / Total Ekuitas (x)	1,67	1,04	1,06	0,97
Total Liabilitas / Total Aset (x)	0,62	0,51	0,51	0,49
<i>Debt Ratio (x)</i>	1,60	0,99	1,02	0,92
<i>Financing to Asset ratio (x)</i>	0,60	0,49	0,49	0,47
Total Ekuitas / Total Modal Disetor (x)	1,64	1,74	1,79	1,77
Laba Usaha / Total Aset	1,79	2,02	3,27	4,25
Laba Usaha / Total Ekuitas	4,76	4,12	6,73	8,36
Aset / Liabilitas	1,60	1,96	1,94	2,03

Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit atau Kewajiban Lainnya dan Pemenuhannya

Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit atau Kewajiban Lainnya	Rasio Keuangan Perseroan pada tanggal 30 September 2017
Total Liabilitas terhadap Total Ekuitas (maksimal 8 : 1)	1,67
NPL (maksimal 3%)	1,35%

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

1. Umum

PT Batavia Prosperindo Finance Tbk ("**Perseroan**") didirikan berdasarkan Akta No. 186 tanggal 12 Desember 1994 yang dibuat di hadapan Djedjem Widjaja SH. MH., Notaris di Jakarta, dengan nama PT Bira Multi Finance. Akta Pendirian ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-18791-HT.01.01.TH.94 tanggal 22 Desember 1994 dan telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah agenda No. 127/A. PT/HKM/1995/PNJAK.SEL tanggal 25 Januari 1995, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 12 tanggal 9 Pebruari 1996, Tambahan No. 1584.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bira Multi Finance tanggal 5 Maret 1998, yang diaktakan oleh Irawan Soerodjo, SH., Notaris di Jakarta, dengan Akta No. 28 tanggal 5 Maret 1998, pemegang saham menyetujui penurunan modal dasar Perseroan dan perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Akta tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-5-806-HT.01.04.TH98 tanggal 3 Juni 1998, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah agenda No. 795/BH.09.02/III/2000 tanggal 3 Agustus 2000, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 43 tanggal 28 Mei 2002, Tambahan No. 5142.

Dalam Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham pada tanggal 20 Oktober 1999 yang diaktakan oleh Djedjem Widjaja SH. MH., Notaris di Jakarta, dengan Akta No. 42 tanggal 21 Desember 1999, pemegang saham menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Bina Multi Finance. Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Perundangan-undangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-5143-HT.01.04.Th.2000 tanggal 6 Maret 2000 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah agenda No. 760/RUB 09.03/VIII/2000 tanggal 3 Agustus 2000, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 48 tanggal 14 Juni 2000, Tambahan No. 5802.

Dalam Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham pada tanggal 16 Maret 2007 yang diaktakan oleh Sugito Tedjamulja SH, Notaris di Jakarta, dengan Akta No. 71 tanggal 16 Maret 2007, pemegang saham menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Batavia Prosperindo Finance. Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. W7-03581.HT.01.04.TH.2007 tanggal 4 April 2007 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah agenda No. 349/RUB.09.03/V/2007 tanggal 1 Mei 2007 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 43 tanggal 29 Mei 2007, Tambahan No. 5262.

Dalam rangka penyesuaian seluruh anggaran dasar Perseroan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maka seluruh anggaran dasar Perseroan disesuaikan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batavia Prosperindo Finance No. 180 tanggal 29 April 2008, dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, SH., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-32523.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 12 Juni 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU.0047425.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 12 Juni 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 29/2009 tanggal 9 April 2009, Tambahan No. 9996/2009.

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat, Perseroan telah melakukan perubahan anggaran dasarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 156 tanggal 21 Oktober 2008 dari Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, nama Perseroan diubah menjadi PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. Perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0101040.AH.01.09. TAHUN 2008 tanggal 24 Oktober 2008 dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 33 tanggal 29 April 2009, Tambahan No. 11470, mengenai: (i) persetujuan perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka, (ii) persetujuan perubahan nama Perseroan menjadi PT Batavia Prosperindo Finance Tbk, (iii) persetujuan pengeluaran saham baru yang berasal dari simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut kepada

masyarakat melalui penawaran umum, (iv) persetujuan atas penawaran saham yang dimiliki oleh PT Batavia Prosperindo Finance Tbk, kepada masyarakat selama penawaran umum, (v) persetujuan para pemegang saham Perseroan untuk melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham, sehubungan dengan penawaran/penjualan saham dalam penawaran umum sebagaimana disebut dalam butir (iii) dan (iv) tersebut di atas, (vi) persetujuan atas pencatatan saham Perseroan, setelah dilaksanakannya penawaran umum kepada masyarakat melalui pasar modal, dan termasuk saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham Perseroan pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), (vii) pemberian kuasa kepada Direksi untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penawaran umum saham kepada masyarakat melalui pasar modal, (viii) pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penawaran umum saham kepada masyarakat melalui pasar modal, (ix) perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dan (x) perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka penawaran umum kepada masyarakat melalui pasar modal.

Perseroan telah melakukan perubahan anggaran dasarnya dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 45 tanggal 7 Agustus 2009, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo SH, MSi, Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-15264 tanggal 10 September 2009, dengan Daftar Perseroan No. AHU-0059732.AH.01.09. Tahun 2009 tanggal 10 September 2009 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 63 tanggal 6 Agustus 2010, Tambahan No. 679. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 52, tanggal 4 Maret 2015, yang dibuat di hadapan Doktor Irawan Soerodjo, SH, M.Si, Notaris di Jakarta, yang mana akta tersebut telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.03-0015416 tanggal 11 Maret 2015 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-0029099.AH.01.11. Tahun 2015 tanggal 11 Maret 2015, disetujui perubahan Pasal 4 ayat 2 dan 3 dari Anggaran Dasar Perseroan mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas.

Dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2014, Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014, anggaran dasar Perseroan telah diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 262 tanggal 30 April 2015 dari Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, Perubahan tersebut telah dilaporkan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0931398 tanggal 11 Mei 2015 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0931397 tanggal 12 Mei 2015 serta telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0935071.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal 12 Mei 2015.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan yang terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas No. 61 tanggal 5 Juni 2017, yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Perseroan pada tanggal 5 Juni 2017 dalam rangka perubahan ketentuan pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar terkait struktur permodalan Perseroan, Akta mana telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.03-0144834 tertanggal 12 Juni 2017 yang terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0074925.AH.01.11.TAHUN 2017.

Pada tanggal 29 November 2017, Perseroan telah menyelenggarakan RUPSLB yang menyetujui rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sesuai dengan dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015.

Sebagaimana termaktub dalam pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan Perseroan adalah di bidang pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, kegiatan usaha pembiayaan lain atas persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan melakukan sewa operasi. Perseroan memiliki izin usaha meliputi bidang multiguna, infrastruktur, investasi dan pembiayaan berbasis *fee*.

Saat ini Perseroan mengkonsentrasikan kegiatannya kepada pembiayaan konsumen, yaitu pembiayaan kendaraan bermotor, khususnya kendaraan roda empat baru dan bekas, baik berupa kendaraan penumpang maupun kendaraan komersil.

Perseroan menyadari perannya sebagai lembaga pembiayaan konsumen yang harus mudah diakses oleh masyarakat. Pengembangan jaringan kantor senantiasa dilakukan guna menunjang pelayanan kepada nasabah. Perseroan telah melakukan perluasan dan relokasi jaringan Kantor, sehingga sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki 1 kantor pusat, 2 kantor perwakilan dan 68 kantor cabang.

Sumber utama dana Perseroan adalah berasal dari pinjaman bank, pembiayaan bersama (*joint financing*) dengan institusi-institusi keuangan, dan modal sendiri.

Visi Perseroan adalah menjadi salah satu perusahaan pembiayaan terkemuka dan terbaik di Indonesia dengan memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah.

Misi Perseroan adalah menyediakan produk-produk pembiayaan yang unggul disertai penawaran kompetitif yang mengutamakan kecepatan, efisiensi dan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada nasabah serta mitra kerja Perseroan.

Tujuan Perseroan adalah menciptakan nilai bagi pemegang saham serta memberikan kontribusi positif bagi lingkungan masyarakat di mana Perseroan berada dan beroperasi.

Faktor – faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha dan hasil usaha Perseroan antara lain :

- a. Kredit macet diantisipasi dengan menerapkan manajemen risiko secara tepat dan asuransi kredit.
- b. Penyimpangan dalam sistem dan prosedur telah diantisipasi dengan menerapkan Sistem Pengendalian Internal yang dilakukan oleh Internal Audit bersama-sama dengan *Risk Management*.
- c. Kompetisi suku bunga bank diantisipasi dengan cara melakukan diversifikasi sumber pendanaan, antara lain dengan menerbitkan surat hutang baik dalam bentuk obligasi maupun *medium term notes*.
- d. Perkembangan Aktivitas Pemasaran
Untuk mengembangkan aktivitas pemasaran, Perseroan melakukan beberapa hal sebagai berikut:
 1. Membuka Kantor Unit Pelayanan di beberapa daerah yang potensial
 2. Memperluas jangkauan area Perseroan
- e. Pengembangan produk baru lebih diarahkan kepada segmen dimana Perseroan berada sehingga Perseroan dapat memperluas basis konsumen, pangsa pasar dan menghadapi persaingan di masa mendatang.

Perubahan Perilaku Konsumen

Munculnya varian kendaraan dengan fitur teknologi yang lebih baik seperti fitur hemat bahan bakar dan ramah lingkungan yang lebih mendominasi pasar sehingga lebih diminati konsumen. Perseroan senantiasa melakukan *research* atas perubahan perilaku konsumen dan menciptakan produk-produk yang lebih diarahkan untuk mengantisipasi perubahan tersebut.

Kondisi Persaingan yang Dihadapi

Kompetisi pada industri pembiayaan kendaraan bekas di Indonesia saat ini cukup tinggi dengan banyaknya perusahaan yang semula berada pada segmen kendaraan baru kini beralih masuk ke segmen kendaraan bekas.

Perubahan Tingkat Suku Bunga

Terkait dengan tingkat suku bunga bank yang masih cenderung stagnan, Perseroan masih melihat adanya *margin* / peluang didalam penjualan kendaraan bermotor segmen kendaraan bekas.

Dalam hal pendanaan Perseroan selalu menggunakan suku bunga yang tetap (*fixed*) untuk setiap pembiayaan sehingga tidak terpengaruh dengan fluktuasi suku bunga dan juga dalam rangka untuk menyesuaikan dengan suku bunga dan tenor yang dikenakan kepada debitur.

Hutang dalam mata uang asing

Perseroan tidak memiliki hutang dalam mata uang asing oleh karena itu Perseroan tidak melakukan aktivitas lindung nilai dan tidak terpengaruh dengan fluktuasi nilai tukar mata uang asing.

Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah dalam industri kendaraan bermotor sepanjang tahun 2016 mendukung pertumbuhan produksi kendaraan bermotor. Semakin berkembangnya kegiatan produksi mobil di dalam negeri, ditambah kebijakan dan insentif pemerintah untuk memproduksi mobil secara lokal akan menghasilkan pertumbuhan di industri otomotif Indonesia. Sementara itu, harga BBM yang kemungkinan akan naik, khususnya BBM non-subsidi, akan memiliki dampak negatif terhadap permintaan kendaraan bermotor.

Perubahan terhadap nilai tukar dan tingkat suku bunga, Perusahaan menilai yang berdampak langsung hanyalah tingkat suku bunga terhadap perencanaan usaha Perusahaan. Untuk itu, perusahaan menerapkan pengelolaan tingkat bunga secara konsisten dengan menyesuaikan tingkat bunga pinjaman dan beban dana. Perusahaan tidak mempunyai kegiatan surat berharga, kecuali yang disajikan didalam Laporan keuangan Perusahaan dan Perusahaan tidak mempunyai kegiatan usaha Pembiayaan kendaraan bermotor dalam bentuk maupun menggunakan mata uang asing.

Kebijakan akuntansi penting

Kebijakan penerapan PSAK baru telah diberlakukan dalam Perseroan dan tidak memiliki dampak yang signifikan.

Langkah-langkah yang dilakukan Perseroan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, langkah-langkah Perseroan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya adalah sebagai berikut: Fokus kepada *portfolio* dengan tingkat pengembalian yang tinggi, menerapkan manajemen risiko dengan hati-hati, komitmen untuk produktifitas dan efisiensi, menjaga hubungan yang kuat dan erat, meningkatkan pelayanan terhadap konsumen dan *dealer*, perluasan jaringan usaha, dan pengembangan teknologi informasi dan sumber daya manusia.

2. Kondisi Perekonomian dan Pasar di Indonesia

Kondisi perekonomian nasional secara umum berpengaruh terhadap kinerja Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung, diantaranya tingkat pertumbuhan ekonomi nasional yang stabil, tingkat inflasi yang terkendali, tingkat suku bunga yang rendah, serta fluktuasi nilai tukar terhadap mata uang asing yang terkendali. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha dan kondisi keuangan Perseroan antara lain kondisi perekonomian, kompetisi dalam industri pembiayaan dan otomotif, tingkat suku bunga dan variasi produk baru dalam bidang otomotif. Saat ini pasar pembiayaan semakin kompetitif dengan bertambahnya perusahaan pembiayaan serta regulasi/aturan baru yang keluar terkait bisnis pembiayaan. Dengan adanya regulasi serta aturan baru ini, semakin banyak perusahaan-perusahaan pembiayaan baru yang terbentuk di Indonesia. Di samping dengan dukungan regulator yang mendukung lembaga pembiayaan yang ada, jumlah penduduk menengah yang ada di Indonesia menjadi salah satu pemicu munculnya lembaga pembiayaan di Indonesia. Hal ini didukung oleh produk-produk otomotif yang semakin bervariasi dengan design terkini menjadikan lembaga pembiayaan menjadi industri usaha di Indonesia yang memiliki potensi besar untuk terus bertumbuh di masa mendatang.

Perseroan berupaya untuk senantiasa dekat dengan konsumen dan penjual (*dealer*) dengan prinsip menyediakan produk-produk pembiayaan yang unggul dengan penawaran yang kompetitif yang mengutamakan kecepatan, efisiensi dan pelayanan prima kepada nasabah dan mitra kerja adalah misi utama Perseroan. Adapun cara yang Perseroan lakukan adalah dengan menambah jaringan operasional agar lebih dekat dengan nasabah dan *dealer*, membuat produk pembiayaan yang lebih kompetitif di pasar dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.

Kompetisi yang ketat dalam industri pembiayaan dan otomotif membuat kompetitor selalu mengeluarkan berbagai program untuk menarik nasabah dan *dealer*. Sehingga Perseroan dituntut untuk lebih profesional, kreatif dan efisien dalam mengelola Perusahaan agar tetap memiliki *competitive advantage* yang lebih dari para kompetitor. Perseroan memiliki *track record* yang baik sebagai lembaga pembiayaan baik dalam hal perolehan pendanaan maupun pelunasannya. Berdasarkan hal tersebut, Perseroan telah memiliki akses ke lembaga perbankan serta instrumen obligasi sebagai sumber pendanaan usaha. Industri pembiayaan memiliki *nature business* yang amat bergantung pada tingkat suku bunga. Perubahan tingkat suku bunga

sangat mempengaruhi bunga jual Perseroan, sehingga akan mengakibatkan volume penjualan produk pembiayaan Perseroan. Hal yang mempengaruhi lainnya adalah kecepatan pelayanan karena konsumen cenderung mencari alternatif pembiayaan dengan suku bunga yang kompetitif dan servis yang cepat dan memuaskan.

Untuk dapat memberikan pembiayaan dengan suku bunga kompetitif maka Perseroan harus mendapatkan dukungan pembiayaan dari bank maupun kreditur dengan suku bunga pinjaman yang kompetitif pula. Untuk itu Perseroan senantiasa mencari alternatif pendanaan (*funding*) yang terbaik salah satunya adalah penerbitan surat hutang. Di tengah ketatnya kompetisi dengan perusahaan pembiayaan lain, Perseroan dituntut untuk terus meningkatkan dan memperbaiki kinerja untuk dapat menyokong kebutuhan pembiayaan dari masyarakat. Hal-hal yang dilakukan Perseroan dalam menjawab tantangan tersebut diantaranya adalah memahami lebih mendalam kondisi pasar yang sangat fluktuatif dan memberikan variasi produk pembiayaan guna memenuhi keinginan konsumen serta meningkatkan efektifitas kinerja tenaga pemasaran dan tenaga penunjang.

Intensitas persaingan di dalam industri pembiayaan kendaraan bermotor khususnya mobil cukup tinggi, terutama dari perusahaan pembiayaan yang memiliki afiliasi dengan Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) dan yang memiliki afiliasi dengan bank. Untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat di dunia industri pembiayaan kendaraan bermotor, terutama pembiayaan mobil, Perseroan secara konsisten menerapkan strategi meningkatkan hubungan dengan para pemasok (*dealer relationship*) dan keunggulan proses operasional (*operational excellence*) untuk menciptakan proses yang efektif, biaya yang efisien dan sumber daya yang produktif sehingga dapat memberikan nilai terbaik kepada konsumen. Selain itu Perseroan juga selalu berupaya untuk menciptakan program-program yang menarik, kecepatan proses pemberian kredit, suku bunga yang kompetitif, penawaran kembali kepada konsumen dengan historikal yang baik untuk melakukan pembelian ulang.

Perseroan melalui jaringan kerja yang dimiliki, mempunyai posisi yang kuat untuk menyalurkan fasilitas pembiayaan mobil domestik. Jaringan kerja dan sistem data elektronik milik Perseroan memungkinkan untuk memberikan pelayanan hampir di seluruh Indonesia. Sejalan dengan perubahan dan perkembangan dalam hal metode penjualan, Perseroan sangat menyadari bahwa pengembangan jaringan distribusi akan dilaksanakan hingga ke pelosok-pelosok. Dengan adanya pengembangan jaringan atau cabang ini secara otomatis juga akan meningkatkan kinerja tim penjualan. Salah satu cara yang cukup terbukti berhasil adalah dengan melakukan segmentasi pasar berdasarkan komunitas, dimana Perseroan melaksanakan program promosi serta harga khusus untuk segmen (komunitas) tertentu di masyarakat. Perubahan teknologi baru juga akan sangat terasa dalam hal sentuhan serta disain terhadap produk-produk mobil yang akan diluncurkan yang cenderung lebih mementingkan aspek lingkungan, *safety*, *sporty* dan dengan harga yang relatif terjangkau.

Saat ini pemasok mulai melakukan penetrasi ke segmen keluarga, karena disadari trend saat ini terjadi pergeseran ke segmen keluarga. Hal ini dibuktikan dengan munculnya varian-varian baru yang membuat lebih banyak pilihan di pasar mobil yang sesuai dengan kebutuhan baik dari sisi model, harga, dan fungsinya. Hingga saat ini Perseroan melihat bahwa tidak ada masalah ataupun persoalan yang signifikan dengan pemasok, mengingat pemasok senantiasa terus meningkatkan kapasitas produksi antara lain dengan cara membangun pabrik baru serta meningkatkan kapasitas produksi pabrik-pabrik yang sudah ada.

Dalam hal likuiditas, Perseroan berpandangan bahwa “kepercayaan” adalah suatu hal yang mutlak dan harus dijunjung tinggi. Oleh karena itu, Perseroan sangat serius dalam hal menjaga nama baik dan kredibilitasnya. Perseroan telah membuktikan kredibilitasnya pada tahun-tahun sebelumnya yaitu selalu tepat waktu dan tidak pernah gagal bayar dalam memenuhi kewajibannya.

3. Keuangan

Analisis dan pembahasan manajemen di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan, disusun berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk periode-periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dan 2016 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 yang diperoleh dari laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Juninho Widjaja, CPA dari KAP Kosasih, Nurdian, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (*Member Crowe Horwath International*) dengan opini Wajar Tanpa Modifikasi.

(dalam jutaan Rupiah)

URAIAN	30 SEPTEMBER		31 DESEMBER	
	2017	2016	2016	2015
PENGHASILAN	248.673	189.152	258.400	249.938
BEBAN USAHA	(217.660)	(165.127)	(216.659)	(193.890)
LABA USAHA	31.013	24.025	41.741	56.048
BAGIAN ATAS LABA (RUGI) ENTITAS ASOSIASI - NETO	2.108	1.755	2.387	(594)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	33.121	25.780	44.128	55.454
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(6.334)	(5.644)	(10.216)	(13.712)
LABA NETO PERIODE / TAHUN BERJALAN	26.787	20.136	33.912	41.742
PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN	136	(612)	675	22.340
TOTAL LABA KOMPREHENSIF	26.923	19.524	34.588	64.082

a. Penghasilan

Total penghasilan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 sebesar Rp248.673 juta. Penghasilan yang berasal dari pembiayaan konsumen memberikan kontribusi sebesar 55,63% terhadap Total Penghasilan Perseroan. Perseroan berupaya agar total penghasilan selalu terus bertumbuh yang didukung dengan strategi-strategi yang dimiliki. Perseroan juga senantiasa melakukan penelaahan secara berkala untuk menunjang kegiatan usahanya. Perseroan tidak memiliki kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan maupun profitabilitas.

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 September				31 Desember			
	2017	%	2016	%	2016	%	2015	%
Pembiayaan konsumen	138.331	55,63	97.274	51,43	132.444	51,26	140.518	56,22
Administrasi	70.370	28,30	61.159	32,33	84.459	32,69	65.284	26,12
Anjak piutang	19.860	7,99	18.430	9,74	25.657	9,93	16.554	6,62
Sewa pembiayaan	3.980	1,60	4.839	2,56	5.483	2,12	18.424	7,37
Lain-lain	16.132	6,49	7.450	3,94	10.357	4,01	9.158	3,66
Total	248.673	100,00	189.152	100,00	258.400	100,00	249.938	100,00

Penghasilan Pembiayaan Konsumen

Periode 9 (sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 Dibandingkan Dengan Periode 9 (sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2016

Penghasilan pembiayaan konsumen untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar Rp138.331 juta atau sebesar 55,63% dari jumlah Penghasilan Perseroan. Penghasilan ini meningkat 42,21% dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya sebesar Rp97.274 juta. Hal ini disebabkan selain karena pertumbuhan pada aktifitas pembiayaan konsumen, juga dikarenakan oleh kegiatan akuisisi net aset dari PT Magna Finance Tbk (Magna) yang terjadi pada bulan April 2017.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015

Penghasilan pembiayaan konsumen untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 132.444 juta atau sebesar 51,26% dari jumlah Penghasilan Perseroan. Penghasilan ini menurun 5,75% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp 140.518 juta. Penurunan pendapatan pembiayaan konsumen disebabkan karena terjadinya penurunan jumlah fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor yang diberikan Perseroan melalui pembiayaan sendiri, dimana Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 lebih banyak memakai fasilitas pembiayaan bersama yaitu sebanyak 4.828 kontrak dari 10.559 kontrak baru yang dibiayai menggunakan fasilitas pembiayaan bersama. Dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, hanya 2.566 kontrak dari 8.456 kontrak dibiayai menggunakan fasilitas pembiayaan bersama.

Penghasilan Administrasi

Periode 9 (sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 Dibandingkan Dengan Periode 9 (sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2016

Penghasilan administrasi meliputi penghasilan dari administrasi dan denda. Penghasilan administrasi untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar Rp 70.370 juta atau 28,30% dari jumlah penghasilan Perseroan. Penghasilan ini meningkat sebesar 15,06% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 61.159 juta. Hal ini disebabkan oleh adanya realisasi penjualan, yang juga meningkat berkaitan dengan kenaikan nilai pembiayaannya, dimana untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 jumlah kontrak perusahaan sebanyak 8.727 kontrak baru atau naik sebesar 16,55% dibanding periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015

Penghasilan administrasi meliputi penghasilan dari administrasi dan denda. Penghasilan administrasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 84.459 juta atau 32,69% dari jumlah Penghasilan Perseroan. Penghasilan ini meningkat sebesar 29,37% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 65.284 juta. Hal ini disebabkan oleh adanya realisasi penjualan, yang juga meningkat berkaitan dengan kenaikan nilai pembiayaannya, dimana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 jumlah kontrak perusahaan sebanyak 10.559 kontrak baru atau naik sebesar 24,9% dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Penghasilan Anjak Piutang

Periode 9 (sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 Dibandingkan Dengan Periode 9 (sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2016

Penghasilan anjak piutang pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2017 adalah sebesar Rp 19.860 juta atau 7,99% dari jumlah penghasilan Perseroan. Penghasilan ini meningkat sebesar 7,76% dibandingkan dengan periode sembilan bulan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 18.430 juta. Hal ini disebabkan oleh keberhasilan Perseroan dalam menjaga kolektibilitas anjak piutang yang baik.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015

Penghasilan anjak piutang pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 25.657 juta atau 9,93% dari jumlah Penghasilan Perseroan. Penghasilan ini meningkat secara signifikan sebesar 54,99% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 16.554 juta. Hal ini dikarenakan keberhasilan Perseroan dalam memperluas jaringan pemasaran dan kebijakan analisa kredit Perseroan yang baik, sehingga jumlah fasilitas anjak piutang yang dimiliki Perseroan meningkat sebanyak 12 kontrak baru untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan memberikan kontribusi pada penghasilan anjak piutang dan kolektibilitas anjak piutang yang baik.

Penghasilan Sewa Pembiayaan

Periode 9 (sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 Dibandingkan Dengan Periode 9 (sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2016

Penghasilan sewa pembiayaan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2017 adalah sebesar Rp 3.980 juta atau 1,60% dari jumlah pendapatan Perseroan. Penghasilan sewa pembiayaan ini mengalami penurunan sebesar 17,75% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 4.839 juta. Hal ini dikarenakan Perseroan sejak tahun 2015 mulai memfokuskan bisnis Perseroan pada bisnis pembiayaan konsumen.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015

Penghasilan sewa pembiayaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 5.483 juta atau 2,12% dari jumlah Pendapatan Perseroan. Pendapatan ini turun secara sangat signifikan sebesar 70,24% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 18.424 juta. Hal ini dikarenakan Perseroan sejak tahun 2015 mulai memfokuskan bisnis Perseroan pada bisnis pembiayaan konsumen.

Penghasilan Lain-Lain

Periode 9 (sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 Dibandingkan Dengan Periode 9 (sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2016

Penghasilan lain-lain merupakan penghasilan yang diperoleh Perseroan di luar dari seluruh penghasilan utama Perseroan, yang terutama terdiri dari pendapatan piutang yang dihapusbukukan dan penghasilan bunga yang diperoleh Perseroan sehubungan penempatan dana Perseroan di bank dalam bentuk giro maupun deposito berjangka.

Penghasilan lain-lain untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2017 adalah sebesar Rp 16.132 juta atau sebesar 6,49% dari jumlah penghasilan Perseroan. Penghasilan ini meningkat signifikan yaitu sebesar 116,54% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 7.450 juta. Hal ini dikarenakan kenaikan dari pendapatan piutang yang sudah dihapusbukukan sehubungan dengan penghapusan piutang macet yang telah dilakukan Perseroan pada tahun-tahun sebelumnya.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015

Penghasilan lain-lain untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 10.357 juta atau sebesar 4,01% dari jumlah penghasilan Perseroan. Penghasilan ini meningkat sebesar 13,09% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 9.158 juta yang disebabkan kenaikan dari pendapatan piutang yang sudah dihapusbukukan dan peningkatan penghasilan bunga dari penempatan dana Perseroan di bank dalam bentuk giro maupun deposito berjangka.

b. Beban Usaha

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 September				31 Desember			
	2017	%	2016	%	2016	%	2015	%
Beban keuangan	66.304	30,46	43.181	26,15	58.742	27,11	63.968	32,99
Gaji dan tunjangan	59.038	27,13	45.046	27,28	58.453	26,98	52.801	27,23
Umum dan administrasi	48.452	22,26	32.056	19,42	47.893	22,11	38.103	19,65
Kerugian penurunan nilai	28.580	13,13	30.404	18,41	32.556	15,03	27.791	14,34
Beban pemasaran	15.286	7,02	11.348	6,87	15.923	7,35	11.227	5,79
Pajak	-	-	3.092	1,87	3.092	1,42	-	-
Total	217.660	100,00	165.127	100,0	216.659	100,0	193.890	100,00

Beban Keuangan

Periode 9 (sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 Dibandingkan Dengan Periode 9 (sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2016

Beban keuangan meliputi bunga pinjaman dan provisi bank, serta bunga dan beban emisi atas efek utang yang diterbitkan. Beban keuangan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2017 adalah sebesar Rp 66.304 juta atau 30,46% dari jumlah beban Perseroan. Beban ini meningkat sebesar 53,55% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 43.181 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya aktifitas dalam pembiayaan konsumen, dan juga dikarenakan oleh kegiatan akuisisi net aset dari PT Magna Finance Tbk (Magna) yang telah terjadi pada bulan April 2017.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015

Beban keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 58.742 juta atau 27,11% dari jumlah beban Perseroan. Beban ini turun sebesar 8,17% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 63.968 juta. Penurunan ini membuktikan bahwa kebijakan efisiensi keuangan yang dijalankan oleh Perseroan cukup efektif. Selain itu, penurunan ini disebabkan menurunnya suku bunga pinjaman Perseroan ke bank dan telah dilunasinya Obligasi Batavia Prosperindo Finance I Tahun 2013 pada tanggal 3 Juli 2016.

Beban Gaji dan Tunjangan

Periode 9 (sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 Dibandingkan Dengan Periode 9 (sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2016

Gaji dan tunjangan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2017 sebesar Rp 59.038 juta yang merupakan 27,13% dari total beban Perseroan, meningkat sebesar 31,06% dari periode sembilan bulan tahun sebelumnya yang sebesar Rp45.046 juta. Peningkatan ini seiring dengan kenaikan beban gaji dan tunjangan disebabkan karena beban gaji dan tunjangan disebabkan karena kenaikan jumlah karyawan sehubungan untuk mendukung pertumbuhan usaha Perseroan yaitu dengan penambahan beberapa jaringan usaha Perseroan.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015

Gaji dan tunjangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 sebesar Rp58.453 juta yang merupakan 26,98% dari total beban Perseroan, meningkat sebesar 10,70% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp52.801 juta. Peningkatan ini seiring dengan kenaikan beban gaji dan tunjangan disebabkan karena beban gaji dan tunjangan disebabkan karena kenaikan jumlah karyawan sehubungan mendukung pertumbuhan usaha Perseroan yaitu dengan penambahan 6 (enam) jaringan usaha Perseroan.

Beban Umum dan Administrasi

Periode 9 (sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 Dibandingkan Dengan Periode 9 (sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2016

Beban umum dan administrasi terutama terdiri dari perbaikan dan perawatan, telekomunikasi, penyusutan aset tetap, biaya periklanan dan lain-lain yang terkait dengan kegiatan operasional Perseroan. Beban umum dan administrasi untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar Rp 48.452 juta atau sebesar 22,26% dari jumlah beban Perseroan. Beban ini naik 51,14% dibandingkan dengan periode sembilan bulan tahun sebelumnya yang sebesar Rp32.057 juta. Beban umum dan administrasi disebabkan karena penambahan kantor cabang sebanyak 18 kantor cabang di tahun 2017.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015

Beban umum dan administrasi terutama terdiri dari perbaikan dan perawatan, telekomunikasi, penyusutan aset tetap, biaya periklanan dan lain-lain yang terkait dengan kegiatan operasional Perseroan. Beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp47.893 juta atau sebesar 22,11% dari jumlah beban Perseroan. Beban ini naik 25,69% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp38.103 juta. Beban umum dan administrasi disebabkan karena penambahan kantor cabang sebanyak 4 kantor cabang dan juga disebabkan dari meningkatnya aktivitas Perusahaan di tahun 2016.

Kerugian Penurunan Nilai

Periode 9 (sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 Dibandingkan Dengan Periode 9 (sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2016

Kerugian penurunan nilai untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar Rp 28.580 juta atau sebesar 13,13% dari jumlah beban Perseroan. Beban ini mengalami penurunan sebesar 6,00% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan tahun sebelumnya yang sebesar Rp30.404 juta. Hal ini disebabkan oleh baiknya pengelolaan Perseroan atas proses penagihan / *collection* nya dan juga dampak perekonomian yang kurang kondusif pada tahun 2016.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015

Kerugian penurunan nilai untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp32.556 juta atau sebesar 15,03% dari jumlah beban Perseroan. Beban ini mengalami peningkatan sebesar 17,15% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp27.791 juta. Hal ini disebabkan oleh peningkatan piutang perseroan yang macet, sebagai dampak dari perekonomian yang kurang kondusif.

Beban Pemasaran

Periode 9 (sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 Dibandingkan Dengan Periode 9 (sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2016

Beban pemasaran untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar Rp15.286 juta atau sebesar 7,02% dari jumlah beban Perseroan. Beban ini naiksngnifikan sebesar 34,70% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan tahun sebelumnya yang sebesar Rp11.348 juta. Hal ini merupakan hasil dari peningkatan kegiatan Perseroan di bidang pemasaran atas pembiayaan Perseroan dimana sebanyak 8.727 kontrak baru untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 atau naik 16,55% dibanding pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015

Beban pemasaran pada tahun 2016 adalah Rp 15.923 juta atau sebesar 7,35% dari jumlah beban Perseroan. Beban ini naik sebesar 41,83% dibandingkan dengan tahun 2015 yang sebesar Rp 11.227 juta. Hal ini merupakan hasil dari peningkatan kegiatan Perseroan di bidang pemasaran atas pembiayaan Perseroan dimana sebanyak 10.559 kontrak baru untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 atau naik 24,9% dibanding pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Beban Pajak

Periode 9 (sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 Dibandingkan Dengan Periode 9 (sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2016

Beban pajak untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar RpNil juta. Beban ini menurun sebesar 100% dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Hal ini diakibatkan adanya beban pajak atas pajak kurang bayar berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015

Beban pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31Desember 2016 adalah sebesar Rp3.092 juta atau sebesar 1,87% dari jumlah beban Perseroan. Beban ini meningkat sebesar 100% dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Hal ini merupakan beban pajak atas pajak kurang bayar berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa.

c. Total Penghasilan (Baban) Komprehensif lain

Periode 9 (sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 Dibandingkan Dengan Periode 9 (sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2016

Beban Komprehensif Lain Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 sebesar Rp 136 juta, meningkat cukup signifikan sebesar 122,22% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan tahun sebelumnya sebesar Rp (612) juta. Kenaikan ini terutama dikarenakan adanya keuntungan atas pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015

Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016membukukan penghasilan lain sebesar Rp 675 juta menurun sebesar 96,98% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mengalami beban sebesar Rp 22.340 juta. Penurunan total penghasilan komprehensif lain ini dikarenakan keuntungan revaluasi aset tetap Perusahaan yang dicatat pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

d. Total Laba (Rugi) Komprehensif

Periode 9 (sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 Dibandingkan Dengan Periode 9 (sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2016

Labanya komprehensif Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 sebesar Rp 26.924 juta atau mengalami kenaikan sebesar 37,90% dibandingkan dengan periode sembilan bulan tahun sebelumnya yang sebesar Rp19.524 juta. Kenaikan laba komprehensif ini terjadi karena tata kelola yang baik oleh manajemen Perseroan sehingga masih dapat terus melakukan kegiatan pembiayaan, bahkan mengalami peningkatan di tahun 2017 ini.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015

Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 membukukan laba komprehensif sebesar Rp 34.588 juta atau mengalami penurunan sebesar 46,03% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 64.083 juta. Penurunan laba komprehensif ini dikarenakan meningkatnya beban penurunan nilai dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan juga diakibatkan oleh keuntungan dari revaluasi aset tetap Perusahaan yang dicatat pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

e. Aset

Penyajian aset dalam laporan posisi keuangan pada perusahaan pembiayaan tidak dipisahkan ke dalam kategori aset lancar dan aset tidak lancar merujuk pada Formulir 1100 Lampiran I SEOJK No. 3/SEOJK.05/2016 mengenai Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan. Tabel berikut ini menggambarkan Aset Perseroan:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 September		31 Desember			
	2017	%	2016	%	2015	%
Kas dan setara kas	42.162	2,81	15.164	1,46	13.868	1,41
Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	300	0,02	300	0,03	-	-
Piutang sewa pembiayaan -pihak ketiga – neto	31.781	2,12	44.822	4,32	119.597	12,18
Piutang pembiayaan konsumen						
Pihak ketiga – neto	1.068.031	71,26	594.889	57,33	580.325	59,11
Pihak berelasi	13.048	0,87	15.545	1,50	20.467	2,08
Tagihan anjak piutang - pihak ketiga – neto	102.596	6,85	177.141	17,07	92.528	9,43
Piutang lain-lain - pihak ketiga - neto	86.453	5,77	58.764	5,68	34.861	3,55
Uang muka dan beban dibayar di muka	11.127	0,74	6.989	0,67	7.882	0,80
Investasi pada entitas asosiasi	31.827	2,12	29.716	2,86	27.325	2,78
Investasi saham	20.251	1,35	20.251	1,95	20.251	2,06
Aset tetap - neto	76.087	5,08	61.941	5,97	58.749	5,99
Aset pajak tangguhan	3.798	0,25	3.333	0,32	2.356	0,25
Tagihan pajak penghasilan	1.732	0,12	-	-	-	-
Aset lain-lain	9.537	0,64	8.747	0,84	3.514	0,36
Total Aset	1.498.730	100,00	1.037.602	100,00	981.723	100,00

Posisi Tanggal 30 September 2017 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2016

Perseroan pada posisi tanggal 30 September 2017 memiliki total aset sebesar Rp1.498.730 juta atau mengalami kenaikan sebesar 44,44% bila dibandingkan dengan total aset pada tanggal 31 Desember 2016 yang sebesar Rp1.037.602 juta. Hal ini dikarenakan terutama oleh kenaikan piutang pembiayaan konsumen Perseroan yang disebabkan peningkatan aktivitas pembiayaan dan juga dikarenakan oleh kegiatan akuisisi net aset dari PT Magna Finance Tbk (Magna) yang terjadi pada bulan April 2017.

Posisi Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2015

Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 memiliki total aset sebesar Rp1.037.602 juta atau mengalami peningkatan sebesar 5,69% bila dibandingkan dengan total aset pada tanggal 31 Desember 2015 yang sebesar Rp981.723 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya posisi tagihan anjak piutang dan kenaikan piutang lain-lain akibat dari naiknya piutang dalam penyelesaian agunan Perseroan.

Piutang Sewa Pembiayaan - Pihak Ketiga - Neto

Posisi Tanggal 30 September 2017 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2016

Posisi piutang sewa pembiayaan – pihak ketiga – neto Perseroan pada tanggal 30 September 2017 sebesar Rp 31.781 juta atau mengalami penurunan sebesar 29,10% dari posisi 31 Desember 2016 yang sebesar Rp 44.822 juta. Hal ini dikarenakan oleh Perseroan sejak tahun 2015 mulai memfokuskan bisnis Perseroan pada bisnis pembiayaan konsumen.

Posisi Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2015

Posisi piutang sewa pembiayaan - pihak ketiga - neto Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 44.822 juta atau mengalami penurunan yang signifikan sebesar 62,52% dari posisi per 31 Desember 2015 sebesar Rp 119.597 juta. Hal ini dikarenakan oleh Perseroan sejak tahun 2015 mulai memfokuskan bisnis Perseroan pada bisnis pembiayaan konsumen.

Piutang Pembiayaan Konsumen - Pihak Ketiga - Neto

Posisi Tanggal 30 September 2017 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2016

Posisi piutang pembiayaan konsumen – pihak ketiga – neto Perseroan pada tanggal 30 September 2017 sebesar Rp1.068.031 juta atau mengalami kenaikan sebesar 79,53% dari posisi 31 Desember 2016 sebesar Rp594.889 juta. Hal ini dikarenakan meningkatnya aktifitas pembiayaan Perseroan dan juga terkait dengan kegiatan akuisisi net aset dari PT Magna Finance Tbk (Magna) yang terjadi pada bulan April 2017.

Posisi Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2015

Posisi piutang pembiayaan konsumen - pihak ketiga - neto Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp594.889 juta atau mengalami peningkatan sebesar 2,51% dari posisi per 31 Desember 2015 sebesar Rp580.325 juta. Hal ini dikarenakan oleh meningkatnya jumlah kontrak baru pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi 10.559 kontrak dari sebelumnya 8.456 kontrak pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Piutang Pembiayaan Konsumen - Pihak Berelasi

Posisi Tanggal 30 September 2017 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2016

Posisi piutang pembiayaan konsumen – pihak berelasi Perseroan pada tanggal 30 September 2017 sebesar Rp13.048 juta atau mengalami penurunan sebesar 16,06% dari posisi 31 Desember 2016 sebesar Rp15.545 juta. Hal ini dikarenakan oleh tidak adanya penambahan fasilitas baru untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dan pembayaran yang lancar oleh pihak berelasi.

Posisi Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2015

Posisi piutang pembiayaan konsumen - pihak berelasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 15.545 juta atau mengalami penurunan sebesar 24,05% dari posisi per 31 Desember 2015 sebesar Rp 20.467 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh tidak adanya penambahan fasilitas baru untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan pembayaran yang lancar oleh pihak berelasi.

Tagihan Anjak Piutang - Pihak Ketiga - Neto

Posisi Tanggal 30 September 2017 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2016

Posisi tagihan anjak piutang Perseroan pada tanggal 30 September 2017 sebesar Rp102.596 juta atau mengalami penurunan sebesar 42,08% dari posisi per 31 Desember 2016 sebesar Rp 177.141 juta. Hal ini dikarenakan semata-mata karena adanya pelunasan oleh sebagian nasabah anjak piutang Perseroan.

Posisi Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2015

Posisi tagihan anjak piutang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 177.141 juta atau mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 91,45% dari posisi per 31 Desember 2015 sebesar Rp92.528 juta. Hal ini disebabkan karena bertambahnya kontrak baru sebanyak 12 kontrak baru untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Piutang Lain-Lain - Pihak Ketiga - Neto

Posisi Tanggal 30 September 2017 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2016

Posisi piutang lain-lain – pihak ketiga – neto Perseroan pada tanggal 30 September 2017 sebesar Rp 86.453 juta atau mengalami kenaikan sebesar 47,12% dari posisi per 31 Desember 2016 sebesar Rp 58.764 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan pada piutang dalam penyelesaian agunan seiring dengan naiknya piutang macet Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017.

Posisi Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2015

Posisi piutang lain-lain - pihak ketiga - neto Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp58.764 juta atau mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 68,57% dari posisi per 31 Desember 2015 sebesar Rp34.861 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan pada piutang dalam penyelesaian agunan seiring dengan naiknya piutang macet Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Uang Muka dan Beban Dibayar Di Muka

Posisi Tanggal 30 September 2017 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2016

Posisi uang muka dan beban dibayar di muka Perseroan pada tanggal 30 September 2017 sebesar Rp 11.127 juta atau mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 59,21% dari posisi per 31 Desember 2016 sebesar Rp6.989 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan sewa ruko yang dibayar dimuka dan pembayaran uang muka pembelian ruko dalam rangka pembukaan kantor cabang baru Perseroan.

Posisi Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2015

Posisi uang muka dan beban dibayar di muka Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp6.989 juta atau mengalami penurunan sebesar 11,33% dari posisi per 31 Desember 2015 sebesar Rp7.882 juta. Hal ini hanya disebabkan oleh amortisasi dari beban dibayar di muka semata.

Investasi Pada Entitas Asosiasi

Posisi Tanggal 30 September 2017 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2016

Posisi investasi pada entitas asosiasi pada tanggal 30 September 2017 sebesar Rp 31.287 juta atau mengalami kenaikan sebesar 5,29% dari posisi per 31 Desember 2016 sebesar Rp29.716 juta. Hal ini disebabkan oleh penyerapan laba dari PT Malacca Trust Finance.

Posisi Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2015

Posisi investasi pada entitas asosiasi pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 29.716 juta atau mengalami peningkatan sebesar 8,75% dari posisi per 31 Desember 2015 sebesar Rp 27.325 juta. Hal ini disebabkan oleh penyerapan laba dari PT Malacca Trust Finance.

Investasi Saham

Posisi Tanggal 30 September 2017 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2016

Posisi investasi saham pada tanggal 30 September 2017 sebesar Rp20.251 juta atau tidak mengalami perubahan dari posisi per 31 Desember 2016 sebesar Rp20.251 juta.

Posisi Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2015

Posisi investasi saham pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp20.251 juta, jika dibandingkan dari posisi per 31 Desember 2015 sebesar Rp20.251 juta, posisi Investasi Saham Perseroan tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan.

Aset Tetap - Neto

Posisi Tanggal 30 September 2017 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2016

Posisi aset tetap - neto Perseroan pada tanggal 30 September 2017 sebesar Rp76.087 juta atau mengalami peningkatan sebesar 22,84% dari posisi 31 Desember 2016 sebesar Rp61.941 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh penambahan aset tetap terkait dengan penambahan/perluasan jaringan kantor cabang Perseroan.

Posisi Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2015

Posisi aset tetap - neto Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp61.941 juta atau mengalami peningkatan sebesar 5,43% dari posisi per 31 Desember 2015 sebesar Rp58.749 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh penambahan aset tetap sebanyak 4 tanah dan bangunan yang berlokasi di Manado, Banjarmasin, Samarinda dan Baturaja.

Aset Lain-Lain

Posisi Tanggal 30 September 2017 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2016

Posisi aset lain-lain Perseroan pada tanggal 30 September 2017 sebesar Rp9.537 juta atau mengalami peningkatan sebesar 9,03% dari posisi per 31 Desember 2016 sebesar Rp8.747 juta. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya biaya renovasi gedung yang diamortisasi, dikarenakan bertambahnya jaringan kantor cabang Perseroan di tahun 2017.

Posisi Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2015

Posisi aset lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp8.747 juta atau mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 148,95% dari posisi per 31 Desember 2015 sebesar Rp3.514 juta. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jaminan sewa dari Rp575 juta pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp1.001 juta atau meningkat sebesar 74,14%.

f. Liabilitas

Posisi liabilitas Perseroan pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar Rp 936.358 juta. Kegiatan usaha Perseroan dilaksanakan dalam mata uang Rupiah dan tidak banyak menggunakan mata uang asing karena sebagian besar transaksi yang dilakukan oleh Perseroan menggunakan mata uang Rupiah. Dengan demikian Perseroan dapat meminimalisasi dampak fluktuasi kurs valuta asing. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki pinjaman dalam kurs valuta asing dan tidak memiliki pengaturan lindung nilai (*hedging*). Jika Perseroan memiliki utang dalam mata uang asing maka akan meningkatkan risiko fluktuasi kurs valuta asing. Selain itu, perubahan tingkat suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya dan Perseroan juga tidak memiliki utang yang suku bunganya belum ditentukan.

Perseroan tidak memiliki kebutuhan pinjaman musiman. Perseroan selalu melakukan analisis terhadap jatuh tempo pinjaman. Hal ini disebabkan adanya rasio keuangan yang harus dijaga sehubungan adanya Perjanjian Kredit yang dipersyaratkan dengan pihak bank. Perseroan tidak memiliki kebijakan khusus terhadap fasilitas pinjaman dari bank, pembatasan penggunaan pinjaman dan jaminan. Sebagian besar pinjaman bank digunakan untuk mendanai belanja modal Perseroan selain dari arus kas dari operasional, pasar modal maupun pinjaman dari pemegang saham.

Penyajian liabilitas dalam laporan posisi keuangan pada perusahaan pembiayaan tidak dipisahkan ke dalam kategori liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang merujuk pada Formulir 1100 Lampiran I SEOJK No. 3/SEOJK.05/2016 mengenai Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan. Tabel berikut ini menggambarkan liabilitas Perseroan:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 September		31 Desember			
	2017	%	2016	%	2015	%
Utang bank	436.781	46,65	316.840	59,36	229.859	47,64
Beban masih harus dibayar						
Pihak ketiga	15.289	1,63	4.053	0,76	4.530	0,94
Pihak berelasi	3.447	0,37	1.590	0,30	4.208	0,87
Utang pajak	1.269	0,14	2.434	0,46	3.266	0,68
Efek utang yang diterbitkan – neto	465.123	49,67	196.310	36,78	229.737	47,61
Liabilitas imbalan kerja karyawan	14.449	1,54	12.570	2,34	10.904	2,26
Total	936.358	100,00	533.797	100,00	482.504	100,00

Posisi Tanggal 30 September 2017 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2016

Posisi liabilitas Perseroan pada tanggal 30 September 2017 sebesar Rp936.358 juta atau mengalami peningkatan sebesar 75,41% dari posisi per 31 Desember 2016 sebesar Rp533.797 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan adanya kenaikan utang bank sebesar Rp119.941 juta dan kenaikan efek utang yang diterbitkan sebesar Rp268.813 juta dibandingkan posisi tahun sebelumnya.

Posisi Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2015

Posisi liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp533.797 juta atau mengalami peningkatan sebesar 10,63% dari posisi per 31 Desember 2015 sebesar Rp482.504 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan adanya kenaikan utang bank sebesar Rp86.981 juta dan dikompensasi dengan penurunan efek utang yang diterbitkan sebesar Rp33.427 juta dibandingkan posisi tahun sebelumnya.

Utang Bank

Saat ini Perseroan mengandalkan pinjaman perbankan sebagai sumber utama permodalan selain dari setoran modal. Adapun tingkat suku bunga yang Perseroan dapatkan dari pada kreditur sebagian berupa pinjaman dengan Bunga tetap dan sebagian lagi dalam bentuk tingkat bunga mengambang. Secara rata-rata pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir 30 September 2017 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015, tingkat bunga rata-rata dari seluruh pinjaman perbankan yang Perseroan bayarkan adalah sebesar 11,75%-14,00%, 10,50%-14,00%, dan 11,75%-14,00%. Tingkat suku bunga dalam 3 tahun terakhir dalam tren menurun. Seiring dengan menurunnya suku bunga Bank Indonesia.

Dengan tingkat bunga sebesar itu, maka Perseroan yakin dapat membayarkan seluruh kewajibannya dikarenakan tingkat bunga kredit yang Perseroan salurkan diatas dari pinjaman tersebut. Adapun beban bunga terutang Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir 30 September 2017 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp5.485 juta, Rp1.529 juta dan Rp1.406 juta.

Posisi Tanggal 30 September 2017 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2016

Posisi utang bank Perseroan pada tanggal 30 September 2017 sebesar Rp436.781 juta atau mengalami kenaikan sebesar 37,86% dari posisi per 31 Desember 2016 sebesar Rp316.840 juta. Hal ini terutama disebabkan karena Perseroan menggunakan fasilitas utang-utang Bank yang tersedia untuk mengakomodasi peningkatan aktifitas pembiayaan baru.

Posisi Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2015

Posisi utang bank Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp316.840 juta atau meningkat sebesar 37,84% dari posisi per 31 Desember 2015 sebesar Rp229.859 juta. Hal ini disebabkan oleh Perseroan telah melunasi sebagian utang Bank.

Beban Masih Harus Dibayar - Pihak Ketiga

Posisi Tanggal 30 September 2017 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2016

Posisi beban masih harus dibayar – pihak ketiga Perseroan pada tanggal 30 September 2017 sebesar Rp15.289 juta atau mengalami peningkatan sebesar 277,23% dari posisi per 31 Desember 2016 sebesar Rp4.053 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan beban premi asuransi dan bunga yang harus dibayar Perseroan.

Posisi Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2015

Posisi beban masih harus dibayar - pihak ketiga Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp4.053 juta atau mengalami penurunan sebesar 10,53% dari posisi per 31 Desember 2015 sebesar Rp4.530 juta. Hal ini disebabkan oleh penurunan beban premi asuransi yang harus dibayar Perseroan.

Beban Masih Harus Dibayar - Pihak Berelasi

Posisi Tanggal 30 September 2017 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2016

Posisi beban masih harus dibayar Perseroan pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar Rp3.447 juta atau mengalami peningkatan sebesar 116,79% dari posisi per 31 Desember 2016 sebesar Rp1.590 juta. Hal ini terutama disebabkan adanya kenaikan beban premi asuransi yang harus dibayar Perseroan kepada pihak berelasi.

Posisi Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2015

Posisi beban masih harus dibayar - pihak berelasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp1.590 juta atau mengalami penurunan sebesar 62,21% dari posisi pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp4.208 juta. Hal ini terutama disebabkan adanya penurunan beban premi asuransi yang harus dibayar Perseroan kepada pihak berelasi.

Utang Pajak

Posisi Tanggal 30 September 2017 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2016

Posisi utang pajak Perseroan pada tanggal 30 September 2017 sebesar Rp1.269 juta atau mengalami penurunan sebesar 47,86% dari posisi per 31 Desember 2016 sebesar Rp2.434 juta. Hal ini disebabkan oleh penurunan utang pajak penghasilan Perseroan.

Posisi Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2015

Posisi utang pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 2.434 juta atau mengalami penurunan sebesar 25,47% dari posisi pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 3.266 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan utang pajak penghasilan Perseroan, yang juga seiring dengan penurunan laba Perseroan.

Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan

Posisi Tanggal 30 September 2017 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2016

Posisi liabilitas imbalan kerja Perseroan pada tanggal 30 September 2017 sebesar Rp 14.449 juta atau mengalami kenaikan sebesar 14,95% dari posisi per 31 Desember 2016 sebesar Rp12.570 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh perubahan asumsi aktuarial dan juga bertambahnya jumlah karyawan Perseroan.

Posisi Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2015

Posisi liabilitas imbalan kerja Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp12.570 juta atau mengalami peningkatan yang sebesar 15,28% dari posisi per 31 Desember 2015 sebesar Rp10.904 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh perubahan asumsi aktuarial dan juga bertambahnya jumlah karyawan Perseroan.

g. Ekuitas

(dalam jutaan Rupiah)

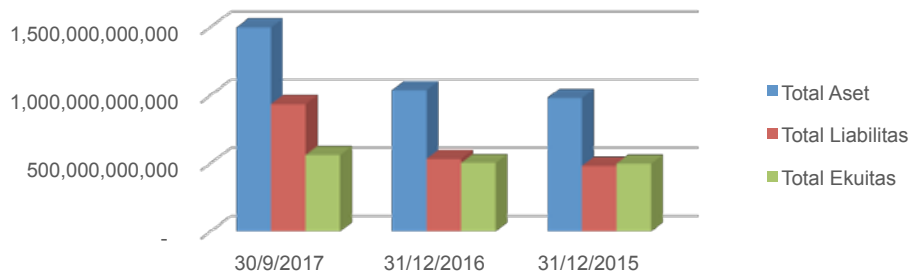
Uraian	30 September		31 Desember			
	2017	%	2016	%	2015	%
Modal dasar - 2.200.000.000 saham	220.000		220.000		220.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1.582.589.100 saham pada tanggal 30 September 2017 dan 1.360.627.100 saham pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015	158.259	28,14	136.063	27,01	136.063	27,26
Tambahan modal disetor – neto	185.025	32,90	145.575	28,90	145.575	29,16
Saldo laba						
Telah ditentukan penggunaannya	250	0,04	250	0,05	250	0,05
Belum ditentukan penggunaannya	195.751	34,81	198.545	39,41	193.361	38,73
Penghasilan komprehensif lain						
Keuntungan revaluasi aset tetap - neto setelah pajak	23.088	4,11	23.373	4,64	23.970	4,80
Total	562.373	100,00	503.806	100,00	499.219	100,00

Posisi Tanggal 30 September 2017 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2016

Posisi ekuitas Perseroan pada tanggal 30 September 2017 sebesar Rp562.373 juta atau mengalami peningkatan sebesar 11,62% dari posisi per 31 Desember 2016 sebesar Rp503.806 juta. Peningkatan jumlah ekuitas ini dikontribusikan oleh kegiatan Penawaran Umum Terbatas (PUT) II Tahun 2017 dan juga dikontribusi oleh saldo laba Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017, dan dikompensasikan dengan pembagian dividen yang berasal dari saldo laba ditahan tahun 2016.

Posisi Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2015

Posisi ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 503.806 juta atau mengalami peningkatan sebesar 0,92% dari posisi per 31 Desember 2015 yang sebesar Rp 499.219 juta. Peningkatan jumlah ekuitas ini dikontribusikan oleh saldo laba Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dan dikompensasikan dengan pembagian dividen yang berasal dari saldo laba ditahan tahun 2015.



Imbal Hasil Atas Aset, Imbal Hasil Atas Ekuitas, Solvabilitas, Likuiditas dan Sumber Pendanaan

(dalam persentase)

Uraian	30 September	31 Desember	
	2017	2016	2015
Return On Average Assets (ROAA)	1,80	3,33	6,53
Return On Average Equity (ROAE)	4,79	6,87	12,84

Imbal Hasil Atas Rata-Rata Aset (Return on Average Assets)

Tingkat imbal hasil atas aset menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba komprehensif dari rata-rata aset sepanjang satu periode yang dimiliki Perseroan, yang diukur dari perbandingan antara laba komprehensif dengan rata-rata jumlah aset yang dimiliki Perseroan.

Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016

Kemampuan Perseroan dalam mempertahankan tingkat imbal hasil atas aset di periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir 30 September 2017 adalah 1,80%, lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang sebesar 3,33%. Hal ini dikarenakan adanya pertumbuhan rata-rata aset yang dimiliki oleh Perseroan lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan laba komprehensif yang dihasilkan Perseroan.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015

Kemampuan Perseroan dalam mempertahankan tingkat imbal hasil atas aset di tahun 2016 adalah 3,33% lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2015 yang sebesar 6,53%. Hal ini dikarenakan oleh pertumbuhan rata-rata aset yang dimiliki oleh Perseroan lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan laba komprehensif yang dihasilkan Perseroan.

Imbal Hasil Atas Rata-Rata Ekuitas (Return on Average Equity)

Tingkat imbal hasil ekuitas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba komprehensif dari rata-rata ekuitas yang ditanamkan sepanjang satu periode, yang diukur dari perbandingan antara laba komprehensif dengan rata-rata jumlah ekuitas.

Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016

Imbal hasil ekuitas Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 adalah 4,79%, lebih rendah dibandingkan tahun 2016 yang sebesar 6,87% disebabkan oleh menurunnya laba komprehensif yang dihasilkan oleh Perseroan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015

Imbal hasil ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah 6,87%, lebih rendah dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 12,84% disebabkan oleh menurunnya laba komprehensif yang dihasilkan oleh Perseroan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Solvabilitas

Solvabilitas adalah kemampuan Perseroan untuk membayar kembali kewajiban pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang yang mengandung beban bunga (*interest bearing*). Salah satu pengukur Solvabilitas ini adalah rasio kewajiban yang mengandung beban bunga terhadap ekuitas (*Gearing Ratio*) atau tingkat pinjaman yang diterima oleh Perseroan dengan ekuitas yang dimiliki oleh Perseroan. Sesuai dengan peraturan yang tertuang dalam KMK No. 84/PMK. 012/2006 pada bab VII, pasal 5 ayat 3 dijelaskan bahwa tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan diukur dengan *gearing ratio* setinggi-tingginya adalah 10 kali. Manajemen akan menambah modal jika rasio utang sudah mencapai 8 kali terhadap modal. Saat ini rasio kewajiban terhadap rata-rata jumlah ekuitas adalah 1 kali.

Perseroan telah memenuhi rasio keuangan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang yang telah diungkapkan Perseroan dalam laporan keuangan Perseroan di dalam Prospektus ini. *Gearing Ratio* Perseroan berturut-turut per tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2017	2016	2015
Pinjaman Yang Diterima	901.904	513.150	459.596
Ekuitas	510.295	453.838	451.642
<i>Gearing Ratio (X)</i>	1,77	1,13	1,02

Kondisi *Gearing Ratio* Perseroan masih jauh di bawah ketentuan Keputusan Menteri Keuangan, hal ini membuktikan bahwa Perseroan telah memenuhi tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan sebagaimana dipersyaratkan oleh OJK.

Likuiditas dan Sumber Pendanaan

Likuiditas dalam perusahaan pembiayaan merupakan gambaran dan kemampuan Perseroan dalam hal mengelola perputaran arus kas dalam jangka pendek, terdiri dari arus kas masuk (*cash inflow*) ataupun arus kas keluar (*cash outflow*).

Arus kas masuk Perseroan yang utama diperoleh dari penerimaan angsuran pelanggan, fasilitas pinjaman bank dan/atau obligasi serta fasilitas pembiayaan bersama dengan bank. Arus kas keluar Perseroan yang utama adalah untuk pembayaran kepada Dealer, pembayaran pinjaman bank, baik pokok maupun bunga serta untuk membayar angsuran yang menjadi porsi dari pembiayaan bersama dengan bank.

Sumber likuiditas material yang belum digunakan berasal dari pinjaman bank (termasuk fasilitas pembiayaan bersama) yang di mana plafon pinjaman belum seluruhnya digunakan oleh Perseroan. Per tanggal 30 September 2017, Perseroan masih memiliki plafon pinjaman yang belum digunakan sebesar Rp 342 miliar dari total plafon seluruhnya sebesar Rp 2,08 triliun. Dalam hal ini, Perseroan wajib mengikuti ketentuan-ketentuan yang tertera dalam Perjanjian Kredit dengan masing-masing pihak bank.

Hingga Prospektus ini diterbitkan, modal kerja Perseroan masih terkendali dengan baik. Perseroan mengelola likuiditasnya melalui kebijakan keuangan yang terpusat dan konsisten khususnya dalam hal penyalarsan waktu antara sumber pendanaan dengan piutang pembiayaan. Sumber pendanaan Perseroan saat ini berasal dari pinjaman bank sebesar Rp 436.781 juta dan modal sendiri sebesar Rp562.373 juta berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 30 September 2017. Untuk mendapatkan modal kerja tambahan, Perseroan dapat memperoleh dari Pasar Modal diantaranya dengan cara menerbitkan Obligasi Berkelanjutan dan Penawaran Umum Terbatas (*Right Issue*).

Analisis Arus Kas dan Belanja Modal (*Capital Expenditure*)

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 September		31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
Arus Kas Neto Yang Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi	(371.340)	46.978	(11.950)	(6.118)
Arus Kas Neto Yang Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	(19.460)	(11.305)	(9.103)	(1.578)
Arus Kas Neto Yang Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan	417.798	(5.606)	22.349	(152.650)

Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2017 Dibandingkan Dengan Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2016

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas operasi Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar Rp (371.340) juta, menurun sebesar 890,46% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 sebesar Rp 46.978 juta. Hal ini terutama dikarenakan meningkatnya pemberian fasilitas pembiayaan baru periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017 jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar Rp (19.460) juta, meningkat sebesar 72,14% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 sebesar Rp (11.305) juta. Hal ini dikarenakan adanya pembelian gedung untuk kantor cabang baru menggantikan gedung yang selama ini disewa.

Arus kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar Rp 471.798 juta, meningkat sebesar 7.552,69% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 sebesar Rp(5.606) juta. Hal ini dikarenakan oleh bertambahnya penarikan fasilitas utang bank sepanjang tahun 2017 dan Perseroan mendapat dana dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance Tahap I Tahun 2017.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp (11.950) juta, meningkat sebesar 95,33% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp (6.118) juta. Hal ini dikarenakan adanya pemberian fasilitas pembiayaan baru pada tahun 2015 yang berdampak pada naiknya penerimaan Perseroan di masa mendatang dan kenaikan fasilitas baru pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 yang berdampak pada naiknya penerimaan atas administrasi yang dibayarkan oleh customer.

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp (9.103) juta, meningkat sebesar 476,87% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp (1.578) juta. Hal ini dikarenakan adanya pembelian gedung untuk kantor cabang baru menggantikan gedung yang selama ini disewa.

Arus kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp22.349 juta, menurun sebesar 114,64% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp(152.650) juta. Hal ini dikarenakan oleh bertambahnya penarikan fasilitas utang bank pada tahun 2016 dan Perseroan mendapat dana dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance Tahap I Tahun 2016.

Belanja Modal (*Capital Expenditure*)

Selama periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 Perseroan melakukan belanja modal yang masing-masing mencapai jumlah keseluruhan Rp20.372 juta, Rp10.478 juta dan Rp 6.388 juta. Pengeluaran belanja modal tersebut dimaksudkan untuk penambahan aset tetap berupa tanah, bangunan, dan inventaris kantor sehubungan dengan penambahan jaringan Kantor Cabang Perseroan. Perseroan tidak melakukan transaksi lindung nilai mata uang asing, hal ini disebabkan Perseroan dan Entitas Anak melakukan sebagian

besar transaksi belanja modal dan memperoleh pendapatan dengan menggunakan mata uang Rupiah, sehingga Perseroan mendapat lindung nilai “*natural hedge*”.

Perseroan tidak memiliki pengikatan sehubungan dengan pengeluaran modal yang belum terealisasi. Perseroan selalu berupaya melakukan peninjauan dan penelaahan untuk melakukan transaksi pembelian yang sesuai dengan tujuannya untuk mendapatkan pendapatan di masa yang akan datang. Apabila pembelian tersebut terdapat masalah yang tidak sesuai dengan pembelian dan tujuannya, Perseroan tetap berkeyakinan bahwa hal ini tidak akan mempengaruhi pendapatan Perseroan yang berdampak signifikan terhadap rencana Perseroan. Hal ini disebabkan karena Perseroan senantiasa berupaya untuk melakukan peninjauan dan penelaahan yang intensif secara menyeluruh serta berupaya untuk mendapatkan syarat-syarat pembelian yang menguntungkan.

Perseroan mengharapkan untuk mendanai belanja modal Perseroan melalui kombinasi arus kas dari operasional, fasilitas pinjaman bank, pasar modal dan pinjaman dari pemegang saham. Realisasi belanja modal Perseroan dapat berbeda dengan apa yang direncanakan sebelumnya karena berbagai faktor, antara lain arus kas Perseroan di masa depan, hasil usaha dan kondisi keuangan, perubahan kondisi perekonomian Indonesia, perubahan peraturan di Indonesia dan perubahan rencana serta strategi bisnis Perseroan.

4. Manajemen Risiko

Perseroan menyadari dan mempunyai komitmen untuk melakukan pengelolaan manajemen risiko secara terintegrasi, optimal dan berkesinambungan. Pengelolaan tersebut diantaranya dilakukan dengan pelaksanaan manajemen risiko yang sistematis seperti identifikasi risiko, penilaian risiko, pengendalian risiko serta pengungkapan risiko. Manajemen risiko ini ditangani oleh satu divisi khusus yaitu Divisi *Risk Management*.

Identifikasi risiko dilakukan Perseroan untuk mengetahui faktor-faktor risiko yang muncul baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Atas dasar identifikasi itu, Perseroan akan melakukan penilaian terhadap masing-masing risiko yang telah teridentifikasi. Untuk risiko-risiko yang mempengaruhi Perseroan dalam menjalankan usahanya, dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini perihal Faktor Risiko.

Pengendalian risiko dilakukan dengan melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk meminimalkan terjadinya risiko tersebut, yaitu:

- **Risiko Kredit, dikelola dengan cara:**

Menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudent underwriting policy*) seperti program “Prinsip Mengenal Nasabah” atau “*Know Your Customer*” dimana Perseroan menerapkan proses pemberian kredit yang ketat dengan melakukan survey kepada calon konsumen, verifikasi data konsumen serta melakukan segmentasi konsumen berdasarkan wilayah, tipe kendaraan dan jenis pekerjaan. Perseroan juga menerapkan strategi penagihan yang efektif dan efisien dengan penanganan kredit bermasalah yang ditangani oleh team khusus.

- **Risiko Pendanaan, dikelola dengan cara:**

Menerapkan strategi diversifikasi sumber pendanaan diantaranya bersumber dari penerimaan pembayaran angsuran konsumen, pinjaman perbankan baik dalam maupun luar negeri, serta penerbitan surat berharga seperti Obligasi sehingga tercapai struktur pendanaan yang optimal serta penyesuaian jangka waktu dan mata uang (*matching fund policy*).

- **Risiko Teknologi, dikelola dengan cara:**

Mengembangkan system teknologi informasi yang *online* dan *integrated* yang tepat guna untuk mendukung peningkatan kinerja, proses dan operasional Perseroan di semua jaringan di seluruh Indonesia. Perseroan juga memiliki DRC (*Data Recovery Center*) untuk penyimpanan data dan pemulihan kegiatan operasional jika terjadi gangguan.

- **Risiko Operasional, dikelola dengan cara:**

Perseroan memiliki Prosedur Operasi Standar (POS) bagi kegiatan operasional dan manajemen risiko serta secara konsisten melaksanakan audit operasional sehingga tercipta kontrol yang baik serta secara berkelanjutan memberikan pelatihan kepada karyawan khususnya karyawan tenaga lapangan untuk meningkatkan kompetensi tenaga lapangan dalam melakukan *survey* atau verifikasi, penagihan (*collection*) hingga penarikan agunan atas kredit yang bermasalah.

- **Risiko Persaingan, dikelola dengan cara:**

Meningkatkan pembiayaan melalui kerjasama yang saling menguntungkan dengan bank serta menyediakan paket pembiayaan yang inovatif serta memperluas jaringan penjualan dan pelayanan bagi seluruh pelanggan dan dealer rekanan yang tersebar di seluruh Indonesia. Agar dapat mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasarnya, Perseroan menerapkan strategi yang inovatif dan kompetitif.

- **Risiko Makro Ekonomi, dikelola dengan cara:**

Memantau perkembangan makro ekonomi secara berkelanjutan terutama terhadap hal-hal yang berkaitan langsung dengan usaha Perseroan seperti pergerakan tingkat inflasi dan suku bunga. Perseroan juga secara konsisten menerapkan strategi pendanaan yang diversifikasi untuk menjaga kelangsungan pendanaan serta untuk menjaga fluktuasi suku bunga.

- **Risiko Perubahan Kurs, dikelola dengan cara:**

Perseroan senantiasa berinovasi mengembangkan produk-produk pembiayaannya yang baru yang mana senantiasa menyesuaikan diri terhadap perubahan daya beli masyarakat yang terjadi seiring dengan perubahan kurs mata uang.

- **Risiko atas Kebijakan Moneter, dikelola dengan cara:**

Memantau perkembangan kebijakan moneter dan menerapkan strategi diversifikasi sumber pendanaan secara berkala sehingga tidak bergantung kepada satu sumber pendanaan saja.

- **Risiko Sosial Politik, dikelola dengan cara:**

Dalam menangani risiko Sosial Politik terutama yang berkaitan dengan ketersediaan dana dari perbankan maupun investor, Perseroan secara konsisten menerapkan strategi diversifikasi sumber pendanaan diantaranya bersumber dari penerimaan pembayaran angsuran konsumen dan pinjaman perbankan sehingga tercapai struktur pendanaan yang optimal serta penyesuaian jangka waktu dan mata uang (*matching fund policy*) serta terus menjalin hubungan yang sehat dan profesional dengan perbankan dan investor sehingga tercipta kepercayaan dari perbankan dan investor.

5. Informasi Keuangan Yang Telah Dilaporkan yang Mengandung Kejadian Yang Sifatnya Biasa Dan Kecil Kemungkinan Akan Berulang Lagi Pada Masa Yang Akan Datang

Dalam Laporan Keuangan Perseroan tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan yang signifikan dari kejadian yang sifatnya luar biasa yang dapat berdampak pada kegiatan usaha dan hasil usaha Perseroan.

6. Kemampuan Manajemen

Perseroan memiliki manajemen yang ditunjang oleh para Direksi dan diawasi oleh jajaran Komisaris yang telah berpengalaman di bidang industri keuangan dan otomotif khususnya di bidang pembiayaan konsumen. Perseroan dalam jajaran pejabat seniornya juga didukung oleh orang-orang yang memiliki kapabilitas dan pengalaman luas dalam industri pembiayaan dan otomotif.

Kerja keras dan komitmen seluruh jajaran manajemen dan karyawan Perseroan untuk selalu mencapai yang terbaik tersebut telah melahirkan beberapa prestasi diantaranya sebagai berikut:

No.	Penghargaan	Lembaga	Tahun
1.	Multifinance Berpredikat "Sangat Bagus" Atas Kinerja Keuangan Selama 2016	Infobank	2017
2.	Indonesia Multifinance Consumer Choice Award 2017 sebagai the Best Financial Performance Multifinance Company Kategori Aset Rp 500 Miliar s.d. Rp 1 Triliun	Warta Ekonomi	2017
3.	Indonesia Multifinance Award V sebagai Peringkat Ke-1 Untuk Kategori Multifinance Terbaik di Indonesia dengan Asset Rp 500 Miliar s.d. Rp 1 Triliun	Economic Review	2017
4.	The Best Analytical CEO - Multifinance of The Year 2016	Economic Review	2016
5.	The Big Nine Multifinance Indonesia 2016	Economic Review	2016
6.	Peringkat Ke-2 Kelompok Usaha Lembaga Pembiayaan sektor Keuangan	Economic Review	2016
7.	Good Corporate Governance Terbaik Perusahaan Tbk (Swasta) di Indonesia	Economic Review	2016
8.	The Best Multifinance 2016 untuk Kategori Dengan Aset Rp 500 Miliar s.d. Rp 1 Triliun	Economic Review	2016
9.	The top 50 Companies for 2016	Forbes Indonesia	2016

No.	Penghargaan	Lembaga	Tahun
10.	Multifinance Berpredikat "Sangat Bagus" Rating 173 Multifinance	Infobank	2016
11.	Indonesia Multifinance Consumer Choice Award 2016 sebagai the Best Financeial Performance Multifinance Company Kategori Aset Rp 500 Miliar s.d. Rp 1 Triliun	Warta Ekonomi	2016
12.	Perusahaan Multifinance Berpredikat "Sangat Bagus" Tahun 2014	Infobank	2015
13.	Perusahaan Multifinance Berpredikat " Sangat Bagus" tahun 2010 – 2014	Infobank	2015
14.	Indonesia Multifinance Award 2015 sebagai Peringkat Ke-2 Untuk Kategori Multifinance-Listed Company	Economic Review	2015
15.	Indonesia Multifinance Award 2015 sebagai Peringkat Ke-3 Untuk Kategori Corporate Social Responsibility	Economic Review	2015
16.	The Best Social CEO (Bp. Markus Dinarto Pranoto)	Economic Review	2015

HASIL USAHA ATAU KEADAAN KEUANGAN PERSEROAN PADA MASA YANG AKAN DATANG MENGHADAPI RISIKO FLUKTUASI KURS ATAU SUKU BUNGA.

Kegiatan usaha Perseroan dilaksanakan dalam mata uang Rupiah dan tidak banyak menggunakan mata uang asing, karena sebagian besar transaksi yang dilakukan oleh Perseroan dan berada di Indonesia. Dengan demikian Perseroan dapat meminimalisasi dampak fluktuasi kurs valuta asing. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki pinjaman dalam kurs valuta asing dan tidak memiliki pengaturan lindung nilai (*hedging*). Jika Perseroan berutang dalam mata uang asing maka akan meningkatkan risiko fluktuasi kurs valuta asing karena sebagian besar kegiatan usaha Perseroan berada di Indonesia.

KUALITAS PENGHASILAN

Penghasilan Perseroan terutama berasal dari pembiayaan konsumen dan selisih bunga neto dari kerjasama pembiayaan bersama (*joint financing*). Untuk mempertahankan kualitas Penghasilan, Perseroan menerapkan beberapa strategi usaha, yakni:

a. Segmen Pasar yang dituju

Perseroan memfokuskan kegiatan pembiayaan konsumen yang dapat memberikan hasil pengembalian yang lebih tinggi. Saat ini Perseroan memfokuskan kegiatan usahanya pada pembiayaan mobil bekas yang memiliki tingkat margin yang lebih tinggi dan memiliki nilai jual kembali (*resale value*) yang baik dibandingkan dengan mobil baru. Sampai saat ini, Portofolio pembiayaan yang diberikan oleh Perseroan berkisar 92,33% pada pembiayaan mobil bekas sedangkan sisanya berkisar 7,67% pada pembiayaan mobil baru. Perseroan saat ini juga melakukan diversifikasi dan memperluas usaha jasa pembiayaannya ke bidang pembiayaan multiguna dan lainnya, termasuk pengembangan usaha pembiayaan rumah.

b. Pangsa Pasar Perseroan

Besarnya pangsa pasar yang dimiliki Perseroan pada 30 September 2017 berdasarkan jumlah pembiayaan sebesar Rp 714 miliar atau sebanyak 8.447 unit, naik sebanyak 2,45% dibandingkan tahun 2016 yang sebanyak 8.245 unit mobil. Total pembiayaan yang dilakukan Perseroan dibandingkan dengan pasar masih relatif kecil sehingga Perseroan melakukan upaya-upaya untuk dapat meningkatkan pangsa pasar yaitu dengan membuka lebih banyak cabang, meningkatkan penetrasi pasar dan melebarkan usaha ke bidang pembiayaan multiguna dan lainnya, termasuk pengembangan usaha pembiayaan rumah.

c. Jaringan Kerja

Sebagai perusahaan pembiayaan yang berorientasi kepada nasabah perseorangan, maka keberadaan perusahaan menjadi tolak ukur keberhasilan kegiatan usaha. Pada saat ini Perseroan telah memiliki 1 (satu) kantor pusat, 2 (dua) kantor perwakilan dan 68 (enam puluh delapan) kantor cabang. Perseroan berupaya untuk terus mengembangkan jaringan kerjanya dengan membuka cabang-cabang baru. Setiap kantor cabang yang dikepalai oleh seorang pimpinan cabang berfungsi untuk melayani kebutuhan pembiayaan dalam wilayah kerjanya. Pimpinan cabang yang didukung oleh tenaga-tenaga marketing dan karyawan-karyawan operasional bertanggung jawab terhadap target pembiayaan yang telah ditetapkan sesuai dengan potensi wilayah kerja yang bersangkutan.

Selain beroperasi di daerah pusat kota, seperti Kemayoran, Kelapa Gading, Pecenongan, Mangga Dua dan daerah potensi lainnya di mana sentra-sentra penjualan mobil bekasnya memiliki potensi pasar yang sangat besar, Perseroan juga beroperasi di daerah-daerah pinggiran kota misalnya Bekasi, Tangerang, Depok dan Bogor.

Untuk memenuhi permintaan pasar yang ada (pasar yang dituju) tenaga marketing Perseroan dialokasikan ke wilayah-wilayah tertentu (*mapping*). Dengan cara ini, diharapkan tidak akan terjadi tumpang tindih kegiatan pemasaran di wilayah kerja yang sama sehingga tenaga marketing dapat lebih memfokuskan kegiatan pemasarannya pada wilayah kerjanya masing-masing. Disamping itu, Perseroan juga meneruskan kebijakan pasar pembiayaan melalui pembukaan cabang di wilayah yang berpotensi.

d. Tenaga Marketing yang Handal

Perseroan selalu berupaya untuk memiliki tenaga-tenaga marketing yang profesional baik di kantor pusat maupun kantor cabang. Dengan adanya pembukaan cabang-cabang baru, Perseroan juga berencana untuk menambah jumlah *marketing officer* yang dituntut untuk memiliki komitmen yang tinggi agar memenuhi target yang telah ditetapkan. Sebagai motivasi, tenaga marketing akan diberikan insentif yang menarik atas transaksi yang berhasil dilakukannya.

e. Hubungan yang Baik dengan Mitra Bisnis

Perseroan berupaya melakukan kerjasama yang baik dengan *dealer/showroom* dan nasabah. Perseroan menyadari pentingnya hubungan baik dengan para pihak dalam pengembangan usahanya, oleh sebab itu Perseroan selalu berusaha untuk membina hubungan baik yang berkesinambungan dengan bank, lembaga pembiayaan dan kreditur lainnya, perusahaan asuransi, *dealer/showroom*, Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), serta konsumen.

Perseroan akan mengupayakan program-program yang inovatif, pemberian insentif dan bonus yang menarik kepada *dealer/showroom* serta nasabah. Contoh: *point reward* kepada *dealer/showroom* akan dibagikan sesuai dengan jumlah kontrak pembiayaan yang dapat dicapai sehingga *dealer/showroom* lebih terpacu untuk mendapatkan kontrak pembiayaan yang lebih banyak. Sedangkan *point reward* untuk nasabah dapat berupa point undian yang akan diundi pada waktu tertentu. Nasabah yang pernah menunggak angsuran maupun yang memiliki status pembayaran tidak lancar pada saat pengundian akan kehilangan haknya dalam pengundian hadiah.

Sebagai tambahan, jajaran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah berpengalaman di bidang usaha pembiayaan dan keuangan serta memiliki jaringan mitra bisnis yang luas. Dengan telah berkecimpungnya manajemen dalam bisnis ini sebelumnya, Perseroan telah memiliki hubungan yang baik dengan para *dealer/showroom*.

f. Pengelolaan Aset dan Liabilitas yang berhati-hati

Beberapa hal yang diterapkan dalam pengelolaan aset dan liabilitas adalah:

- Kesesuaian jangka waktu pendanaan dengan jangka waktu pembiayaan,
- Kepedulian atas tingkat suku bunga pinjaman bank/sumber dana lain dengan suku bunga pembiayaan,
- Mengembangkan kerja sama yang menguntungkan dengan pihak perbankan melalui program *joint financing* ataupun *channeling*,
- Selalu mengusahakan alternatif-alternatif baru dalam pembiayaan.

g. Pelaksanaan Prinsip Know Your Customer

Perseroan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usahanya. Prinsip ini diterapkan sejak dari awal proses pemberian pembiayaan kepada calon konsumen. Survey atas kemampuan dan keberadaan konsumen serta kewajiban bagi konsumen untuk memberikan uang muka (*down payment*) merupakan bentuk lain dari perwujudan sikap kehati-hatian Perseroan. Survey yang mendalam baik internal maupun eksternal (*outsourcing*) akan menyeleksi calon-calon konsumen yang memang layak untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Perseroan.

Perseroan berupaya menjaga kualitas piutang melalui seleksi calon nasabah secara menyeluruh serta melakukan pemantauan terhadap ketepatan pembayaran uang muka, pemilihan tipe mobil dan pengelolaan dokumen yang baik.

h. Memperkuat dan memaksimalkan Teknologi Informasi (TI)

Usaha pembiayaan yang terus tumbuh memerlukan dukungan TI yang baik dan berkualitas. Oleh karena itu, Perseroan melakukan investasi yang berkesinambungan untuk mengembangkan TI sebagai salah satu tulang punggung pengembangan usaha Perseroan mendatang. Salah satunya adalah pengadaan dan penerapan sistem *online* yang memberikan kemudahan mendapatkan informasi atau data yang dapat diakses secara terus menerus baik data yang berada di kantor pusat maupun kantor cabang secara akurat dan terkini. Perseroan telah menetapkan kualitas dan standard operasional yang tinggi melalui komputersasi *frontline* sampai *back-office* dan sistem *online* antara cabang dengan kantor pusat. Perseroan senantiasa secara terus-menerus melakukan perbaikan proses bisnis dan penyediaan sistem TI yang terkini dan andal demi meningkatkan pelayanan konsumen di masa kini dan di masa-masa yang akan datang.

i. Pengembangan Kompetensi Tenaga Kerja demi Meningkatkan Produktivitas

Demi memperkuat kompetensi dari sumber daya manusia yang dimilikinya, Perseroan senantiasa melakukan program pengembangan karyawan dengan harapan dapat meningkatkan produktivitas dan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas proses dalam kegiatannya sebagai penyedia jasa pembiayaan konsumen bagi masyarakat.

7. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi yang diterapkan konsistendengan tahun keuangan sebelumnya, kecuali untuk penerapan PSAK dan ISAK baru dan revisi yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2017. Perubahan kebijakan akuntansi Perseroan telah dibuat sesuai kebutuhan, sesuai dengan ketentuan transisi yang relevan dalam PSAK dan ISAK masing-masing.

PSAK baru dan revisi dan ISAK baru yang telah diterbitkan tetapi belum berlaku efektif

Standar baru, amandemen dan interpretasi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2017 yang mungkin berdampak pada laporan keuangan adalah sebagai berikut:

Efektif berlaku pada atau setelah 1 Januari 2018

- PSAK 69 - "Agrikultur".
- Amandemen PSAK 2 (2016): "Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan".
- Amandemen PSAK 13: "Properti Investasi".
- Amandemen PSAK 16 (2015) - "Agrikultur: Tanaman Produktif".
- Amandemen PSAK 46 (2016): "Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak
- Tanggahan untuk Rugi yang Belum Direalisasi".
- PSAK 15 (Penyesuaian 2017) - "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama".
- PSAK 67 (Penyesuaian 2017) - "PSAK 67: Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain".

Efektif berlaku pada atau setelah 1 Januari 2019

- ISAK 19 - "Transaksi Valuta Asing dan Imbalan Muka";

Efektif berlaku pada atau setelah 1 Januari 2020

- PSAK 71 - "Instrumen Keuangan";
- PSAK 72 - "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan".
- PSAK 73 - "Sewa".
- Amandemen PSAK 62 - "Kontrak Asuransi - Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi".
- Amandemen PSAK 15 - "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama".
- Amandemen PSAK 71 - "Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif".

Perusahaan sedang mengevaluasi dan belum menentukan dampak dari standar-standar tersebut terhadap laporan keuangan Perusahaan.

VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan usahanya Perseroan tidak lepas dari risiko yang mungkin mempengaruhi hasil usaha Perseroan. Risiko yang disajikan berikut ini telah disusun berdasarkan bobot risiko yang akan memiliki dampak paling besar hingga dampak yang paling kecil bagi Perseroan. Menurut manajemen Perseroan, faktor risiko yang dihadapi Perseroan adalah sebagai berikut:

A. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko Kredit

Perseroan menghadapi risiko kredit, dimana debitur tidak mampu untuk membayar kembali fasilitas pembiayaan yang diberikan, baik pokok pinjaman maupun bunganya atau keduanya. Risiko ini timbul jika struktur pembiayaan kredit, kelayakan konsumen dan piutang tidak dikelola secara hati-hati sehingga menyebabkan ketidاكلancaran pembayaran angsuran dari konsumen yang dapat mengganggu kinerja Perseroan secara keseluruhan. Sampai saat ini penyaluran kredit terbesar yang dilakukan oleh Perseroan ialah pembiayaan kendaraan bermotor bekas.

2. Risiko Pendanaan

Sebagai suatu perusahaan yang bergerak di bidang usaha pembiayaan konsumen, kemampuan Perseroan untuk mendapatkan sumber dana yang sesuai dengan target pembiayaan Perseroan adalah faktor yang sangat penting. Tidak tersedianya sumber dana akan berdampak pada turunya kemampuan Perseroan memberikan pembiayaan baru yang berakibat menurunnya pertumbuhan Perseroan. Selain jumlah pendanaan, faktor lainnya yang turut menentukan adalah jangka waktu pendanaan dan tingkat bunga yang kompetitif. Mengingat jangka waktu pembiayaan yang bervariasi, maka sumber pendanaan harus disesuaikan dengan jangka waktu pembiayaan. Ketidakmampuan Perseroan mendapatkan dana dengan jangka waktu yang sesuai dengan pembiayaan akan mengakibatkan ketidaksesuaian pendanaan yang selanjutnya mempengaruhi kinerja Perseroan. Sedangkan tingkat bunga yang tidak kompetitif akan menyebabkan turunya margin usaha Perseroan dan penetrasi pasar.

3. Risiko Teknologi

Risiko teknologi muncul seiring dengan semakin pentingnya peranan teknologi dalam proses analisa calon konsumen yang kompleks dan proses kredit yang cepat, akurat dan terkontrol. Hal ini dipicu oleh semakin ketatnya persaingan antar perusahaan pembiayaan baik dalam menawarkan pembiayaan yang kompetitif maupun memberikan berbagai pelayanan kepada konsumen, dimana aspek teknologi mempunyai peranan yang cukup besar dalam pelayanan tersebut. Ketidakmampuan Perseroan untuk terus meningkatkan sarana dan prasana di bidang teknologi, telekomunikasi dan informasi akan mengakibatkan risikohilangnya kesempatan merebut dan mempertahankan pasar. Teknologi yang tidak mendukung dapat berakibat turunya kualitas piutang dan hilangnya kesempatan untuk menarik konsumen karena pelayanan yang diharapkan konsumen tidak dapat dipenuhi. Selain itu kerusakan atau gangguan atas teknologi yang telah diterapkan dapat mengakibatkan turunya pelayanan kepada konsumen yang pada akhirnya menurunkan Penghasilan dan margin usaha Perseroan.

4. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang dihadapi Perseroan sehubungan dengan sistem operasional dan prosedur maupun kontrol yang tidak menunjang perkembangan kebutuhan perubahan pembiayaan. Risiko ini berpengaruh menurunkan kinerja operasi dalam memproses transaksi usaha yang mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi dan kualitas pelayanan kepada konsumen dan mitra usaha yang berakibat turunya kinerja Perseroan.

5. Risiko Persaingan

Sektor usaha pembiayaan konsumen, terutama untuk pembiayaan kendaraan bermotor, makin diminati oleh para investor, mengingat masih besarnya pangsa pasar pada sektor usaha pembiayaan ini. Beralihnya fokus bisnis beberapa perusahaan pembiayaan dengan menitikberatkan pada sektor usaha pembiayaan konsumen atas kendaraan bermotor serta diizinkan bank-bank untuk langsung memberikan fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor, hal ini akan menimbulkan tingkat persaingan yang semakin ketat di sektor usaha pembiayaan kendaraan bermotor yang mengakibatkan penurunan margin usaha perseroan.

6. Risiko Makro Ekonomi

Risiko perekonomian adalah risiko yang timbul sehubungan dengan perubahan kondisi perekonomian nasional secara umum yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Perseroan, yaitu:

- Tingkat suku bunga, dalam kondisi tingkat suku bunga yang tinggi akan dapat menurunkan kinerja usaha Perseroan karena tingkat suku bunga yang berdampak akan meningkatkan beban operasional khususnya biaya dana dan sekaligus juga dapat mengakibatkan tidak bersaingnya produk Perseroan yang akan menurunkan nilai pembiayaan.
- Tingkat pertumbuhan ekonomi nasional, adanya perubahan kondisi perekonomian nasional yang tidak kondusif dan melemahnya sektor riil akan mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat dan permintaan pembiayaan mobil.
- Tingkat inflasi, faktor ini sangat berpengaruh terhadap naik turunnya tingkat suku bunga atau biaya dana serta daya beli dan kemampuan konsumen untuk mengangsur.
- Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, perubahan yang signifikan di pasar seperti devaluasi yang pada akhirnya menurunkan daya beli konsumen sehingga juga akan menurunkan kinerja Perseroan. Perubahan harga mobil yang signifikan akibat perubahan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing menurunkan jumlah penjualan mobil yang pada akhirnya menurunkan pertumbuhan pembiayaan Perseroan.

7. Risiko Perubahan Kurs

Dengan adanya perubahan nilai tukar mata uang Rupiah terhadap valuta asing lainnya dalam jangka waktu yang relatif lama akan berdampak langsung terhadap sebagian harga kendaraan bermotor. Apabila terjadi kenaikan harga akibat dari perubahan nilai tukar tersebut maka hal ini mempengaruhi daya beli masyarakat terutama masyarakat menengah ke bawah yang merupakan pangsa pasar Perseroan. Sebagai akibat dari semakin melemahnya daya beli tersebut akan berdampak kepada kegiatan pembiayaan Perseroan.

8. Risiko Kebijakan Moneter

Sumber dana maupun penggunaannya dipengaruhi oleh kebijakan moneter. Kegagalan dalam mengantisipasi perubahan kebijakan Pemerintah akan mempengaruhi kinerja Perseroan secara negatif. Kebijakan uang ketat akan mengakibatkan mengecilnya sumber dana yang kemudian dapat mengakibatkan naiknya tingkat suku bunga, yang berujung pada menurunnya aktivitas Perseroan.

9. Risiko Sosial Politik

Sebagai bagian dari industri keuangan nasional, kegiatan usaha pembiayaan yang dilakukan Perseroan bergantung pada kondisi perekonomian dan sosial politik nasional. Dengan demikian, apabila terjadi ketidakstabilan politik yang berdampak pada distorsi kondisi perekonomian secara umum, kinerja usaha Perseroan pun akan terpengaruh secara negatif.

B. RISIKO INVESTASI BAGI INVESTOR

Harga perdagangan saham Perseroan dapat terus berfluktuasi. Harga saham Perseroan termasuk saham baru dapat meningkat atau menurun sebagai respons terhadap sejumlah peristiwa dan faktor, termasuk hasil usaha Perseroan, peraturan Pemerintah, kondisi ekonomi di Indonesia, perubahan kebijakan akuntansi dan faktor lainnya.

C. RISIKO KEMUNGKINAN TIDAK LIKUIDNYA SAHAM

Keterbatasan jumlah pemegang saham Perseroan akan mempengaruhi volume transaksi pembelian dan penjualan atas saham Perseroan. Kondisi ini akan berpengaruh pada likuiditas saham Perseroan yang ditawarkan. Selain itu, kondisi pasar modal di Indonesia juga dapat mempengaruhi harga atau likuiditas saham Perseroan. Jika kondisi pasar modal yang cenderung turun dan dengan perdagangan saham Perseroan yang relatif kurang likuid, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa para pemegang saham Perseroan akan dapat melakukan penjualan saham Perseroan pada harga tertentu atau pada waktu yang diinginkan pemegang saham dalam pasar yang lebih likuid.

SEMUA RISIKO USAHA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA DISUSUN BERDASARKAN DAMPAK DARI MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA MATERIAL YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHANYA TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 15 Desember 2017 atas laporan keuangan tanggal 30 September 2017 dan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Juninho Widjaja, CPA dari KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (*Member Crowe Horwath International*) dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian, yang perlu diungkapkan dalam prospektus ini.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA AUDITOR INDEPENDEN

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

PT Batavia Prosperindo Finance Tbk (“**Perseroan**”) didirikan berdasarkan Akta No. 186 tanggal 12 Desember 1994 yang dibuat di hadapan Djedjem Widjaja SH. MH., Notaris di Jakarta, dengan nama PT Bira Multi Finance. Akta Pendirian ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-18791-HT.01.01.TH.94 tanggal 22 Desember 1994 dan telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah agenda No. 127/A.PT/HKM/1995/PNJAK.SEL tanggal 25 Januari 1995, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 12 tanggal 9 Pebruari 1996, Tambahan No. 1584.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan yang terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas No. 61 tanggal 5 Juni 2017, yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Perseroan pada tanggal 5 Juni 2017 dalam rangka perubahan ketentuan pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar terkait struktur permodalan Perseroan, Akta mana telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.03-0144834 tertanggal 12 Juni 2017 yang terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0074925.AH.01.11.tahun 2017.

Dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2014, Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014, anggaran dasar Perseroan telah diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 262 tanggal 30 April 2015 dari Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, Perubahan tersebut telah dilaporkan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0931398 tanggal 11 Mei 2015 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0931397 tanggal 12 Mei 2015 serta telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0935071.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal 12 Mei 2015.

Pada tanggal 29 November 2016, Perseroan telah menyelenggarakan RUPSLB yang menyetujui rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sesuai dengan dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015.

2. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Sejak Perseroan melaksanakan Penawaran Umum Terbatas II kepada Para Pemegang Saham Perseroan Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yaitu pada 20 Maret 2017 sampai dengan Prospektus ini, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

31 Desember 2017

Rincian pemegang saham Perusahaan berikut dengan kepemilikannya pada tanggal 31 Desember 2017 berdasarkan catatan yang dikelola oleh PT Adimitra Jasa Korpora (dahulu PT Adimitra Transferindo), Biro Administrasi Efek, adalah sebagai berikut:

MODAL SAHAM
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama dengan
Nilai Nominal Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham

KETERANGAN	Nilai Nominal per Saham Rp. 100,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.200.000.000	220.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
PT Batavia Prosperindo Makmur	570.555.500	57.055.550.000	36,05
PT Batavia Prosperindo International Tbk	566.756.100	56.675.610.000	35,81
UOB Kay Hian Pte Ltd	100.100.000	10.010.000.000	6,33
Masyarakat	345.177.500	34.517.750.000	21,81
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.582.589.100	158.258.910.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	617.410.900	61.741.090.000	

PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, Perseroan diurus oleh Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris yang anggota-anggotanya dipilih dan diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun. Kewajiban dan hak anggota Dewan Komisaris dan Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 263, tanggal 19 Desember 2016, yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH, M.Si, Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.03-0112476 tanggal 27 Desember 2016 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-0155758.AH.01.11. Tahun 2016 tanggal 27 Desember 2016, susunan terakhir dari Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama : Irena Istary Iskandar
Komisaris Independen : Desti Liliati
Komisaris : Christopher Joseph Clower

Direksi:

Direktur Utama : Markus Dinarto Pranoto
Direktur Independen : Indah Mulyawan
Direktur : Jasin Hermawan
Direktur : Hady Sutiono

Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat telah memenuhi kriteria sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006, dan Peraturan OJK No.30/POJK.05/2014 Pasal 9 ayat 1 tentang rangkap jabatan Direksi Perusahaan Pembiayaan, seluruh Direksi Perseroan menetap di Indonesia dan tidak merangkap jabatan sebagai direksi pada perusahaan pembiayaan lain.

Berikut adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

KOMISARIS



Irena Istary Iskandar

Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, umur 44 tahun.

Beliau meraih gelar *Master of Business Administration & Master of Arts in Public Relations* dari European University, Switzerland pada tahun 1996.

Beliau mengawali karir sebagai Manajer Pemasaran di PT Bira Aset Manajemen (1996–1998) sebelum menjabat sebagai Direktur PT Omegatama Internasional Luas (1998–2003).

Beliau juga menjabat sebagai direksi dan komisaris di beberapa perusahaan, antara lain sebagai Komisaris PT Batavia Aset Manajemen (2000–sekarang), Komisaris PT Batavia Prosperindo Internasional (2003–sekarang), Komisaris PT Omegatama International Luas (2003–sekarang), Direktur PT Prima Multi Rasa (2005–sekarang), Komisaris di PT Metalindo Sumber Tani (2009–sekarang) dan Komisaris Utama Malacca Trust Ltd. (2011–sekarang). Beliau adalah Komisaris Utama PT Batavia Prosperindo Finance Tbk sejak tahun 2005.



Desti Liliati
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, lahir di Tanjung Karang, umur 38 tahun.

Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Atma Jaya, Jakarta pada tahun 2002.

Beliau mengawalikarir di perusahaan Akuntansi KAP Prasetyo Sarwoko & Sanjaya (Ernst & Young) sebagai Associate Auditor hingga tahun 2004, kemudian bergabung dengan PT Batavia Prosperindo Sekuritas sebagai Manager di Divisi Corporate Finance (2004 - 2007). Selanjutnya beliau menjabat Head of Finance di PT Strait Finance (2007-2010), Head of Finance Division di PT Karya Anugrah Kusuma (2010-2011), Head of Finance di PT Prima Cipta Jaya (2011–sekarang) serta sebagai Komisaris Independen di PT Batavia Prosperindo Finance Tbk sejak tahun 2010.



Christopher Joseph Clower
Komisaris

Warga Negara USA, lahir di Illinois, USA, umur 52 tahun.

Beliau meraih gelar MBA dari University of Chicago, USA pada tahun 2008.

Beliau mengawali karir di US Air Force, Clark Air Base, Phillipines hingga tahun 1991, kemudian bergabung dengan Bankers Trust sebagai Investment Banking Corporate Finance di Chicago (1994–1997). Selanjutnya beliau menjabat Investment Banking Corporate Finance di Deutsche Bank, Singapore (1997–1998), Investment Banking Corporate Finance di Merrill Lynch, Singapore (1998–2009), Developing Natural Resource Concessions di Jakarta, Indonesia (2009–2012) hingga menjabat sebagai Komisaris di PT Batavia Prosperindo Finance Tbk sejak tahun 2012.

DIREKSI



Markus Dinarto Pranoto
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, lahir di Semarang, umur 67 tahun.

Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Diponegoro pada tahun 1975.

Beliau mengawali karir sebagai Manajer Pemasaran di PT Bankers Trust Lippo Finance (1988 – 1994), kemudian sebagai Direktur PT Bira Multi Finance (1994 – 2000), Direktur PT ANJ Finance (2000 – 2004) dan Direktur PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. (2004–2011). Beliau ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. dan Komisaris Utama PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk. pada tahun 2011.



Indah Mulyawan
Direktur Independen

Warga Negara Indonesia, lahir di Lampung, umur 57 tahun.

Beliau menyelesaikan pendidikan dari Akademi Akuntansi Trisakti pada tahun 1983.

Beliau mengawali karir di PT Intan Nusamas Leasing di tahun 1986 dan terakhir menjabat sebagai Direktur (1992 - 1994) di perusahaan tersebut. Selanjutnya menjabat sebagai Kepala Bagian Car Financing Unit PT Bank Bira Tbk. (1994 - 1999), Kepala Divisi Akuntansi dan Keuangan PT Batavia Prosperindo Finance (1999 - 2008) dan Direktur Tidak Terafiliasi PT Batavia Prosperindo Finance Tbk sejak tahun 2008.



Jasin Hermawan

Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, umur 51 tahun.

Beliau meraih gelar Magister Manajemen dari STIE Institut Bisnis & Informatika (IBII) pada tahun 2008.

Beliau mengawali karir di PT Karunia Mobilindo sebagai staf sales dan administrasi (1988 - 1993), menjadi Kepala Pembelian di PT Katana Furindo (1991 - 1993) dan selanjutnya menjadi purchasing staf di PT Indorama Synthetics Tbk (1993 - 1996).

Beliau menjabat sebagai Manager Marketing & Operation di PT Bina Multi Finance (1996 - 2004) kemudian bergabung menjadi Kadiv Credit Review & Operation di PT Batavia Prosperindo Finance Tbk sejak tahun 2004 dan menjadi Direktur PT Batavia Prosperindo Finance Tbk sejak April 2015.



Hady Sutiono

Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, umur 52 tahun.

Beliau meraih gelar Sarjana Manajemen dari Universitas Trisakti pada tahun 1996.

Beliau mengawali karir di PT Astra Sedaya Finance sebagai marketing, survey & analisa customer (1990 - 1994), menjabat marketing head (1995), selanjutnya menjabat kepala cabang (1996 - 1997). Selanjutnya bergabung dengan PT Rama Multi Finance sebagai Direktur Finance (1998 - 2016) dan menjabat PT Ajikarya Perkasa Pratama sebagai Direktur (2001 - 2008) serta menjabat di PT Pan Pacific Oto Finance sebagai Vice Presiden (2005 - 2013). Kemudian bergabung di PT Batavia Prosperindo Finance Tbk sejak 2014 menjabat sebagai kepala divisi marketing dan sejak Desember 2016 menjadi Direktur hingga sekarang.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006, seluruh Direksi Perseroan menetap di Indonesia dan tidak merangkap jabatan sebagai direksi pada perusahaan pembiayaan lain.

Remunerasi yang telah dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp10.668.528.000,-, Rp10.514.966.600,- dan Rp9.629.442.000,- yang ditentukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan.

Komite Audit

Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance* atau GCG), Perseroan membentuk Komite Audit yang bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. BPF/KOM/03/I/2015 Tentang Perubahan Komite Audit PT Batavia Prosperindo Finance Tbk tertanggal 6 Januari 2015. Penunjukan Komite Audit Perseroan dan telah menyesuaikan Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Komite Audit tersebut terdiri dari:

- Ketua : Desti Liliati
Anggota : 1. Eddy Silalahi; dan
2. Iwan Setiawan

Tugas Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Perseroan dengan menjalankan pengendalian internal yang efektif dan memastikan bahwa Perseroan patuh terhadap GCG dan peraturan yang berlaku. Agar Komite Audit dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara efisien, efektif, transparan, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan, Komite Audit berpegang pada Piagam Komite Audit yang berisi:

Piagam Komite Audit PT Batavia Prosperindo Finance Tbk

Dokumen ini dibuat dan disesuaikan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-643/BL/2012 tertanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang:

Komite audit bertugas untuk memberikan pendapat professional dan independen kepada Dewan Komisaris dan membantu Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan, termasuk mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris. Tugas tersebut meliputi, antara lain:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada publik dan/ atau pihak otoritas.
2. Melakukan penelaahan atas tingkat kepatuhan/ketaatan Perusahaan terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan.
3. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi dan temuan auditor internal.
4. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan Direksi.
5. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan.

Untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, Komite Audit mempunyai wewenang untuk:

1. Mengakses dokumen, data dan informasi Perusahaan, termasuk informasi mengenai dana, asset dan sumber daya Perusahaan lainnya.
2. Melakukan komunikasi langsung dengan karyawan Perusahaan, termasuk Direksi, anggota internal audit dan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Komite Audit.
3. Melibatkan pihak independen diluar Komite Audit yang dipandang perlu untuk membantu melaksanakan tugasnya.

Komposisi, Struktur, dan Persyaratan Anggota Komite Audit:

- a. Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.
- b. Keanggotaan Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen yang merangkap sebagai Ketua Komite Audit dan 2 (dua) orang anggota.

Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan kegiatan perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris kecuali Komisaris Independen.
2. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Perusahaan.
3. Tidak mempunyai saham baik secara langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan.
4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha Perusahaan.

Anggota Komite Audit wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- b. Paling sedikit salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan.
- c. Memahami laporan keuangan, bisnis Perusahaan khususnya yang terkait dengan kegiatan Perusahaan, proses audit, manajemen resiko.
- d. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- e. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen.

- f. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lain kepada perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.
- g. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
- h. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan Perusahaan.
- i. Tidak mempunyai saham baik secara langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan.
- j. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
- k. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Perusahaan.

Tata Cara dan Prosedur Kerja:

Komite Audit membuat dan melaksanakan Perencanaan Pertemuan Komite Audit yang merupakan rencana dan prosedur kerja Komite Audit dan berisi jadwal pertemuan, frekuensi pertemuan dalam tahun berjalan dengan pihak-pihak terkait, antara lain dengan manajemen Perusahaan, internal auditor dan akuntan independen.

Rapat Komite Audit:

- a. Komite Audit wajib menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- b. Rapat dapat dilakukan jika dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota.
- c. Ketua Komite Audit dapat mengundang Dewan Komisaris, Direksi, Internal Auditor, Eksternal Auditor, Wakil Pemegang Saham dan pihak lain yang diperlukan untuk hadir dalam rapat.
- d. Hasil rapat Komite Audit dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan Risalah Rapat didistribusikan kepada seluruh peserta rapat untuk mendapat perhatian dan tindak lanjut.
- e. Komite Audit dapat hadir dalam rapat Dewan Komisaris atau rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris apabila diperlukan.

Sistem Pelaporan Kegiatan:

- a. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
- b. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan.
- c. Perusahaan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (dahulu disebut Bapepam dan LK) informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian.
- d. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian tersebut wajib dimuat dalam laman (website) bursa dan/ atau laman (website) Perusahaan.

Ketentuan Tentang Penanganan Pengaduan atau Pelaporan Sehubungan Dugaan Pelanggaran Terkait Pelaporan Keuangan:

Komite Audit melakukan penelaahan jika terdapat staf yang menyatakan adanya pelanggaran dalam hal-hal yang terkait dengan laporan keuangan dan hal lainnya dan memastikan bahwa investigasi yang independen telah dijalankan atas hal tersebut dan tindak lanjut telah dilakukan secara memadai.

Masa Tugas Komite Audit:

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai masing-masing Anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan:

Eddy Silalahi

Warga Negara Indonesia, lahir di Sarimatondang tahun 1960. Memulaikar sebagai Senior Auditor di Kantor Akuntan Publik Prasetio Utomo & Co (1991 – 1995) sebelum bergabung dengan PT Swadharma Indotama Finance sebagai Account Receivables Manager (1995 – 1997), Accounting Manager (1998 – 2000), Branch

Manager (2000 – 2005) dan Credit Manager (2005 –2006). Setelah itu beliau melanjutkan karirnya di PT Indoliz Marine (2009 – 2012) dan kemudian menjadi anggota Komite Audit di PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk sejak tanggal 15 April 2013.

Iwan Setiawan

Warga Negara Indonesia, lahir di Cirebon tahun 1973. Mengawali karir sebagai Supervisor Consumer, Divisi Perbankan di Bank Danamon Indonesia (2001 – 2007) kemudian menjadi Supervisor Retail, Divisi Perbankan di perusahaan yang sama (2007 – 2010) dan terakhir menjabat sebagai Manajer Portfolio dan Perencanaan, Divisi Resiko Manajemen semenjak tahun 2014. Menjadi anggota Komite Audit sejak tanggal 6 Januari 2015.

Rapat Komite Audit

Para anggota Komite Audit mengadakan pertemuan berkala sekitar tiga bulan sekali. Selain itu, Komite Audit juga mengadakan pertemuan dengan Dewan Komisaris, Direksi, Auditor Internal dan Auditor Independen. Di tahun 2017, para anggota Komite Audit telah mengadakan 4 (empat) kali pertemuan.

Unit Audit Internal

Mengacu pada Peraturan OJK Nomor 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Perseroan telah membentuk dan memiliki Piagam Audit Internal dan telah mengangkat Saudara Andre Hardi sebagai Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) terhitung sejak awal Januari 2013 sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 00005/BPF/I/2013 tentang tertanggal 2 Januari 2013.

Tim audit internal Perseroan dibentuk untuk menunjang kegiatan usaha Perusahaan. Fungsi audit tersebut berguna untuk memastikan dan menilai kegiatan usaha, dalam aspek efektivitas dan kepatuhan sesuai dengan prosedur, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Bertambahnya jumlah cabang yang beroperasi membutuhkan tim audit internal yang lebih giat dalam pengawasan dan pengecekan dilapangan agar aturan-aturan dan *Standard Operating Procedure* (SOP) Perseroan dipatuhi, sekaligus mengidentifikasi kesalahan-kesalahan prosedur atau potensi pelanggaran yang mungkin terjadi di lapangan. Penemuan dan laporan tim audit internal diserahkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi secara rutin. Hingga Prospektus ini diterbitkan, jumlah anggota dalam tim audit internal berjumlah 5 (lima) orang guna mencakup wilayah operasional Perseroan yang telah memperluas jaringannya.

Sebagai landasan dalam pelaksanaan fungsi audit intern diperlukan Piagam Unit Audit (*Internal Audit Charter*) yang berisikan visi, misi, kedudukan, tujuan, ruang lingkup, tugas dan tanggung jawab, peranan, wewenang, kode etik serta prosedur pemeriksaan.

Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*)

Dokumen ini dijadikan dasar keberadaan dan pelaksanaan tugas-tugas dan wewenang Internal Auditor dan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan Internal Auditor dan akan disosialisasikan agar diketahui oleh para karyawan dan pihak lain yang terkait agar tercapainya saling pengertian dan kerja sama yang baik dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan Perseroan.

Visi Audit Intern Perseroan

Menjadi mitra kerja strategis (*strategic partner*) yang independen, obyektif, profesional, tanggap dan terpercaya untuk mendukung tugas Direksi dalam usaha mencapai tujuan perusahaan menuju terciptanya *good corporate governance* sehingga PT Batavia Prosperindo Finance Tbk menjadi perusahaan yang efisiensi dan dapat bersaing dengan perusahaan lain.

Misi Audit Intern Perseroan

1. Melaksanakan pengawasan internal atas seluruh aktivitas perusahaan.
2. Meningkatkan kompetensi agar menjadi internal audit yang profesional.
3. Membantu pelaksanaan kegiatan penilaian secara obyektif dan independen serta melaporkan penilaian tersebut kepada Direktur Utama secara akurat, dapat diandalkan, tepat waktu, konsisten dan berguna.
4. Menjalankan peran sebagai penasihat/advisor dan fasilitator yang profesional.
5. Memberikan nilai tambah baik secara kualitas maupun kuantitas melalui pola kerja yang berfokus pada proses bisnis dan pelanggan, pro-aktif, antusias dan terpercaya, dapat berkomunikasi secara efektif, mampu menemukan akar permasalahan dan memberikan solusi yang terbaik jalan keluar dari permasalahan tersebut.

Struktur dan kedudukan Internal Audit

1. Internal Auditor adalah pelaku tugas dibidang pengawasan internal perusahaan yang berkedudukan dibawah Direktur Utama.
2. Departemen Internal Audit dipimpin oleh seorang Kepala Internal Audit (Head Internal Audit).
3. Kepala Internal Audit diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.
4. Direktur utama dapat memberhentikan Kepala Internal Audit setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris,
jika Kepala Internal Audit tidak memenuhi persyaratan sebagai Internal Audit sebagaimana diatur dalam piagam ini dan atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas.
5. Kepala Internal Audit bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
6. Auditor yang duduk dalam Departemen Internal Audit bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Internal Audit.

Tugas dan Tanggung Jawab Internal Audit

1. Menyusun dan melaksanakan rencana audit Internal tahunan berdasarkan prioritas resiko sesuai dengan tujuan perusahaan.
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem Manajemen resiko sesuai dengan kebijakan perusahaan.
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas dibidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan Manajemen.
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
6. Memantau, menganalisa dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
7. Bekerja sama dengan Komite Audit.
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Internal Audit yang telah dilakukan.
9. Melakukan pemeriksaan khusus dari Manajemen.

Wewenang Internal Audit

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris dan/ atau Komite Audit.
3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit.
4. Melakukan kordinasi kegiatannya dengan auditor eksternal.
5. Melakukan verifikasi dan uji kehandalan terhadap informasi yang diperoleh dalam kaitan dengan penilaian efektivitas sistem audit.
6. Mengalokasikan sumber daya Internal Auditor, menentukan fokus, ruang lingkup dan jadwal audit, penerapan teknik yang dianggap perlu untuk mencapai tujuan audit, mengklarifikasi dan membicarakan hasil audit, meminta tanggapan lisan/tertulis para auditee/ cabang dan pusat, memberikan resiko atas temuan, saran dan rekomendasi.
7. Menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Direktur Utama, berkordinasi dengan pimpinan lainnya dan jika diminta oleh pimpinan dapat memberikan peringatan/ warning atau teguran bila terjadi penyimpangan.

Kode Etik Internal Audit

1. Integritas

Integritas Internal Audit menghasilkan kepercayaan dan menyediakan dasar untuk kehandalan penilaian. Untuk itu Internal Auditor:

- a. Wajib bersikap jujur, obyektif, cermat, bersungguh-sungguh serta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas.
- b. Wajib memiliki integritas dan loyalitas tinggi terhadap profesi, Departemen Internal Audit dan perusahaan.

- c. Wajib mematuhi peraturan dan perundang-undangan, tidak terlibat dalam kegiatan atau perbuatan melawan hukum merugikan atau patut diduga dapat merugikan profesi Internal Audit atau perusahaan.
- d. Wajib menghormati dan mendukung nama baik perusahaan dari sisi hukum ataupun etika
- e. Mematuhi dan memberikan kontribusi terhadap tujuan perusahaan.

2. Objektivitas

Internal Auditor menjalankan objektivitas yang profesional sebaik mungkin dalam mengumpulkan, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi mengenai aktivitas atau proses yang diaudit. Internal audit membuat penilaian yang sudah diseimbangkan atas semua kondisi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau oleh pihak lain dalam membuat penilaian. Untuk itu Internal Auditor:

- a. Tidak boleh terlibat dalam kegiatan atau hubungan yang dapat mempengaruhi penilaian menjadi tidak wajar dan/atau menimbulkan pertentangan dengan kepentingan perusahaan.
- b. Tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dan dari siapapun, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengganggu penilaian/pertimbangan profesional Internal Auditor.
- c. Melaporkan semua hasil audit dengan mengungkapkan semua fakta yang harus diketahui, yang tidak diungkapkan dapat menyebabkan distorsi pelaporan dan dapat merugikan perusahaan.

3. Kerahasiaan

Internal Auditor menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diperoleh dan tidak mengungkapkan informasi tanpa otoritas yang seharusnya kecuali ada kewajiban hukum atau profesional yang mengharuskan dilakukan hal tersebut. Untuk itu Internal Auditor:

- a. Wajib menjaga kerahasiaan dan berhati-hati dalam menggunakan dan mengolah informasi atau data yang diperoleh pada saat menjalankan tugas;
- b. Tidak boleh memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan maupun bertentangan dengan hukum.

4. Kompetensi

Internal Auditor menerapkan pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan tugas. Untuk itu Internal Auditor:

- a. Hanya bertugas dibidang atau jasa dimana mempunyai ilmu, keterampilan dan pengalaman yang sesuai.
- b. Melakukan jasa Internal Audit mengacu kepada peraturan auditing yang berlaku
- c. Wajib meningkatkan kemampuan, efektivitas dan kualitas profesionalismenya secara berkesinambungan.

Persyaratan Auditor yang duduk dalam Departemen Internal Audit

- a. Memiliki integrasi dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya.
- b. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya.
- c. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif.
- d. Wajib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Internal Audit.
- e. Wajib mematuhi kode etik Internal Audit
- f. Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/ atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Internal Audit kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/ putusan pengadilan.
- g. Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) maupun manajemen resiko
- h. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.
- i. Memiliki loyalitas terhadap perusahaan dan tidak terlibat dalam kegiatan yang menyimpang atau melanggar hukum.

Pertanggungjawaban Internal Audit Departemen

Kepala Internal Audit harus mempertanggungjawabkan dan tugas dan kewajiban kepada Direktur Utama dan Komite Audit, yaitu untuk:

1. Melaporkan hasil penilaian mengenai kecukupan dan efektifitas dari proses mengendalikan kegiatan dan mengelola resiko perusahaan sebagaimana disebutkan dalam misi dan cakupan tugas diatas.
2. Melaporkan isu penting yang bertalian dengan proses pengendalian kegiatan perusahaan mencakup perbaikan kegiatan dimaksud yang disajikan dalam laporan khusus
3. Menyajikan informasi mengenai status dan hasil pelaksanaan rencana audit tahunan berikut kecukupan sumber daya departemen Internal Audit.
4. Berkordinasi dengan fungsi lain yang juga melakukan tugas pengendalian dan pemantauan fungsi (manajemen resiko, kepatuhan, legal, etika dan eksternal auditor) termasuk memberikan pendapat mengenai fungsi-fungsi tersebut.

Metode Pengawasan Internal Audit

Secara garis besar ada tiga alat Internal Audit Departemen didalam melakukan proses audit, antara lain: menelaah internal control, operasional audit dan audit laporan keuangan.

Metode yang digunakan Internal Audit Departemen dalam menilai internal control adalah dengan mengimplementasikan *Control Self Assessment* (CSA). Metode CSA ini telah terbukti sangat efektif di beberapa perusahaan besar dan diharapkan juga akan diterapkan di Perseroan.

Hasil dari CSA tersebut akan digunakan oleh Internal Audit Departemen sebagai dasar dalam penyusunan rencana audit tahunan. Dalam rencana audit tahunan tersebut akan tersusun susunan cabang-cabang yang akan diaudit dan bidang-bidang mana yang akan diaudit. Berikut ini merupakan tahapan- tahapan yang dilakukan oleh Internal Audit Departemen sehubungan dengan struktur pengawasan terhadap Perseroan yaitu:

Tahap 1 - Menentukan objek audit secara umum atau populasi audit

Dalam tahap ini, Internal Audit Departemen melakukan inventarisasi atau populasi audit yang akan diaudit.

Tahap 2 - Penyusunan questioner CSA

Setelah Internal Audit menyusun daftar populasi audit, selanjutnya Internal Audit Departemen merancang questioner yang meliputi pertanyaan-pertanyaan yang memuat control yang minimal harus ada atas setiap populasi audit yang telah ditentukan dalam tahap 1. Pertanyaan ini disusun dengan melakukan observasi dan wawancara terhadap masing-masing departemen untuk memahami prosedur yang dilakukan oleh manajemen cabang atau kepala departemen.

Tahap 3 – Uji Coba CSA

Setelah pertanyaan-pertanyaan yang meliputi seluruh populasi audit tersebut disusun, langkah selanjutnya adalah melakukan uji coba terhadap salah satu cabang yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang disusun dapat dimengerti oleh masing-masing cabang. Dari uji coba ini, Internal Audit Departemen akan merevisi CSA sebelumnya sesuai dengan masukan-masukan dari cabang. Sehingga setelah uji coba tersebut, CSA tersebut akan lebih sempurna.

Tahap 4 – CSA Workshop

Dalam CSA, sudah termasuk penjelasan mengenai tata cara pengisian pertanyaan-pertanyaan yang ada, form yang disediakan dan pengambilan CSA ke Internal Audit Departemen. Namun, untuk menghemat waktu para Manajemen cabang dalam mempelajari tatacara pengisian CSA dan diharapkan diantara para manajemen cabang dapat saling tukar pikiran, maka CSA workshop dipandang perlu untuk diadakan.

Workshop ini merupakan sarana untuk menjelaskan kepada semua pihak yang akan terlibat dalam pengisian CSA tersebut. Untuk memperlancar pengimplementasian CSA tersebut, dalam workshop ini, Internal Audit Departemen akan menjelaskan secara keseluruhan mengenai CSA dan juga mekanisme pengisian CSA tersebut.

Tahap 5 – Implementasi CSA

Tahap ini merupakan proses pendistribusian CSA sampai dengan pengumpulan jawaban dari masing-masing pihak yang terlibat terhadap pengisian CSA tersebut. Pendistribusian dapat dilakukan secara manual dengan mengirimkan hard copy questioner yang akan diisi oleh masing-masing kepala cabang atau kepala departemen.

Tahap 6 – Penentuan Resiko Audit

Penentuan resiko audit merupakan tahapan untuk menyusun resiko audit untuk masing-masing populasi audit telah disusun dalam tahap 1.

Dalam menentukan *risk* (resiko) atas masing-masing populasi audit, ada 3 faktor yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan resiko, antara lain:

- Hasil dari CSA
- Materiality
- Hasil audit terakhir

Berdasarkan ketiga faktor ini, Internal Audit Departemen akan menentukan *risk* (resiko) masing-masing audit populasi yang ada dalam tahap 1. Ada 3 kategori risk (resiko) audit, yaitu: high, medium dan low.

Pada tahun pertama pengimplementasian CSA, tingkat kontrol (kuat, marginal dan lemah) akan dipakai sebagai indikasi awal *risk* (resiko) audit yang ada di cabang atau kantor pusat perusahaan.

Tahun selanjutnya, tingkat kontrol atas hasil penilaian mutu CSA dan selanjutnya atas dasar regular audit dan permintaan audit Manajemen akan menggantikan hasil dari CSA tersebut diatas sebagai dasar penentuan *risk* (resiko).

Tahap 7 – Rencana dan Strategi Audit Tahunan

Dari masing-masing kategori *risk* (resiko) audit diatas, Internal Audit Departemen akan menyusun rencana audit. Rencana audit yang disusun akan dibuat sesuai dengan *risk* (resiko) audit yang telah ditetapkan tersebut. Untuk populasi audit yang resiko auditnya high akan diaudit sekali setahun, medium sekali dua tahun dan low sekali tiga tahun.

Setiap tahun akan dilakukan evaluasi untuk masing-masing populasi audit tersebut. Jika *risk* (resiko) auditnya masih tinggi maka Internal Audit Departemen masih akan melakukan audit dan jika telah bergeser ke medium, maka audit akan dilakukan untuk 2 tahun kemudian. Demikian juga sebaliknya, jika tahun lalu risk auditnya medium akan tetapi apada tahun ini bergeser menjadi tinggi, maka audit akan dilakukan pada tahun ini.

Dalam menyusun annual audit, harus dicadangkan juga untuk audit yang diminta oleh Manajemen. Internal Audit Departemen mencadangkan waktunya kira-kira 20% untuk melayani permintaan Manajemen atau tugas khusus lainnya.

Berikut ini merupakan prosedur pelaksanaan audit yang dilakukan oleh Internal Audit Departemen,

Sebelum audit dilaksanakan, terlebih dahulu dikirimkan surat yang berisi mengenai pemberitahuan audit ke cabang atau kepala departemen yang akan diaudit. Isi dari pemberitahuan tersebut minimal harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- Alasan dilakukan audit (misalnya sesuai dengan regular audit yang telah direncanakan oleh Internal Audit, permintaan Manajemen atau spesial audit).
- Bidang atau fungsi yang akan diaudit.
- Nama staff audit yang akan ditugaskan.
- Rung lingkup audit.
- Usulan tanggal pembahasan temuan audit.
- Daftar laporan atau dokumen yang dibutuhkan oleh Audit.

Dalam proses pemeriksaan sedang berjalan, Internal Audit diharapkan untuk mengkomunikasikan temuan sementara kepada kepala cabang dan kepala departemen yang diaudit. Tujuannya adalah agar kepala

cabang atau kepala departemen sudah mengikuti permasalahan yang ada dari awal. Sehingga pada saat pembahasan dan penyampaian laporan, kepala cabang atau kepala departemen yang diaudit dapat memahami lebih cepat dan memiliki waktu yang lebih lama untuk mempelajari masalah yang ada.

Dalam melakukan pelaksanaan audit di lapangan, staff audit bekerja sesuai dengan audit program yang telah dibuat oleh Kepala Internal Audit.

Tahap 8 – laporan Audit

Dari audit tahunan diatas, Internal Audit Departemen akan mengeluarkan laporan atas hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap masing-masing populasi audit.

Report audit tersebut akan disampaikan kepada Direksi dan tembusan kepada kepala cabang/kepala departemen yang bertanggungjawab atas objek yang diperiksa tersebut.

Bentuk laporan yang akan disampaikan kepada manajemen, minimal memuat hal-hal berikut ini:

1. Executive Summary.
2. Temuan Audit.
3. Tanggapan Manajemen.

Executive summary terdiri dari pendahuluan, tujuan dan skope pemeriksaan, kesimpulan dan tingkat permasalahan, temuan audit dan tanggapan manajemen serta tindak lanjut. Sedangkan temuan audit, tanggapan Manajemen (sebutkan nama dan posisinya) dan tindak lanjut Manajemen.

Tahap 9 – laporan Audit

Dari hasil temuan-temuan audit telah dilaporkan kepada Manajemen tersebut akan dibuatkan ringkasan laporan audit yang berisi, tanggal dan nomor laporan audit, temuan audit dan tindak lanjut Manajemen beserta tanggal follow up temuan audit.

Database Tindak Lanjut Audit merupakan kontrol Internal Audit Departemen untuk mendapat mana temuan audit yang sudah ditindaklanjuti dan aman temuan audit yang belum ditindaklanjuti.

Berdasarkan database tersebut, Internal audit Departemen akan mengingatkan Manajemen untuk menindaklanjuti temuan yang belum ditindaklanjuti. Dan jika Manajemen mengalami kesulitan untuk menindaklanjuti temuan tersebut, Internal Audit Departemen akan turut membantu Manajemen.

Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik *juncto* Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. 00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014, maka pada tanggal 13 Maret 2009, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 00507/BPF/III/2009, Perseroan telah mengangkat Indah Mulyawan sebagai Sekretaris Perusahaan yang menjalankan tugas-tugas Sekretaris Perusahaan, sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut di atas.

Tugas-tugas Sekretaris Perusahaan antara lain sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturanyang berlaku di bidang pasar modal;
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemberi modal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan dan Perusahaan Publik;
3. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya;
4. Sebagai penghubung atau *contact person* antara Perseroan atau Perusahaan Publik dengan pihak-pihak berwenang (OJK, BEI dan lainnya), investor dan publik;
5. Menyiapkan daftar khusus yang berkaitan dengan direksi, komisaris dan keluarganya baik dalam perusahaan tercatat maupun afiliasinya;
6. Membuat daftar pemegang saham termasuk kepemilikan 5% atau lebih;
7. Menghadiri Rapat Direksi dan membuat notulen hasil rapat;

8. Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
9. Membina dan mengendalikan kepatuhan hukum, perundang-undangan dan tata kelola perusahaan yang baik.

Berikut ini adalah informasi tentang Sekretaris Perusahaan:

Nama : Indah Mulyawan.
Nomor Telepon : (021) 520 0434.
Faksimili : (021) 520 9160.
E-mail : indah@bpfi.co.id.
Alamat : Gedung Chase Plaza Lantai 12 dan 15,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21,
Jakarta 19920, Indonesia.

3. SUMBER DAYA MANUSIA

Menyadari pentingnya sumber daya manusia sebagai mitra usaha Perseroan, manajemen Perseroan menjadikan pengembangan sumber daya manusia sebagai salah satu fokus utama aktivitas Perseroan di dalam pencapaian tujuan Perseroan. Perseroan senantiasa melakukan proses pe-rekrutmen secara matang dan sistematis, serta melakukan pendidikan dan pelatihan kepada karyawan secara berkesinambungan demi terciptanya suatu atmosfer kerja yang kondusif dan tercapainya target Perseroan secara maksimal. Di samping itu, kesejahteraan karyawan merupakan salah satu hal yang terus-menerus diperhatikan oleh Perseroan demi tercapainya suatu kepuasan kerja bagi para karyawannya.

3.1. Rekrutmen, dan Program Pendidikan dan Pelatihan

Sistem Rekrutmen Perseroan:

Sistem rekrutmen dilakukan oleh pihak Perseroan sendiri dan tidak menggunakan jasa dari pihak ketiga yaitu dengan cara mencari calon-calon karyawan melalui iklan pada media-media komunikasi seperti surat kabar dan internet maupun melalui relasi-relasi dari karyawan-karyawan Perseroan yang berasal dari luar lingkungan kerja Perseroan.

Program Pendidikan dan Pelatihan :

Perseroan senantiasa aktif mengikutsertakan karyawannya untuk ambil bagian dalam berbagai program pendidikan dan pelatihan, yakni sebagai berikut:

a. Pelatihan yang diadakan di dalam lingkungan Perseroan (*in-house training*)

- *In-house training* untuk calon karyawan di mana calon karyawan diberikan *on the job training* oleh karyawan senior Perseroan.
- *In-house training* untuk calon karyawan di mana dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, diadakanlah *in-house training* dengan memanfaatkan instruktur internal maupun eksternal sesuai dengan kebutuhan.

b. Pelatihan yang di adakan di luar lingkungan Perseroan

Perseroan juga menyelenggarakan pelatihan di luar lingkungan Perseroan yang disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan. Program ini dirancang untuk mengirimkan karyawan-karyawan potensial guna mengikut seminar, loka karya atau pendidikan singkat lainnya yang diselenggarakan oleh pihak-pihak eksternal, seperti misalnya pelatihan perpajakan, manajemen kepemimpinan, otomotif, dunia pembiayaan, dan lain-lain yang dapat memberikan kontribusi positif bagi Perseroan.

3.2. Kesejahteraan Karyawan

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan karyawan, Perseroan memberikan berbagai fasilitas seperti tunjangan hari raya, tunjangan akhir tahun, Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), upah karyawan di atas upah minimum regional dan pemberian jaminan kesehatan dalam bentuk penggantian biaya pengobatan dan perawatan rumah sakit sampai dengan batas tertentu.

Dalam rangka meningkatkan loyalitas dan motivasi karyawan, Perseroan memberikan kesempatan kepada seluruh karyawan tetap untuk memperoleh pinjaman karyawan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan notulen rapat tanggal 12 Mei 2009, pemegang saham Perseroan telah menyetujui pemberian pinjaman karyawan.

3.3. Serikat Pekerja

Hingga 30 September 2017, Perseroan tidak memiliki Serikat Pekerja.

3.4. Komposisi Jumlah Karyawan

Seiring dengan perkembangan usaha Perseroan, sumber daya manusia yang ada terus mengalami peningkatan baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Per 30 September 2017, jumlah karyawan Perseroan adalah sebanyak 1.366 orang yang terbagi atas karyawan tetap sebanyak 599 orang dan karyawan kontrak berjumlah 767 orang.

Adapun komposisi karyawan tetap Perseroan berdasarkan jenjang jabatan, pendidikan dan usia disajikan dalam tabel-tabel di bawah ini:

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Jabatan

Kategori	30 September 2017			31 Desember 2016			31 Desember 2015			31 Desember 2014		
	Tetap	Kontrak	Total	Tetap	Kontrak	Total	Tetap	Kontrak	Total	Tetap	Kontrak	Total
Direksi	4	0	4	3	0	3	3	0	3	2	0	2
Manajer	90	0	90	60	6	66	47	20	67	49	8	57
Supervisor	73	37	110	49	10	59	41	11	52	41	8	49
Pelaksana	432	730	1162	386	344	730	366	313	679	392	237	629
Jumlah	599	767	1.366	498	360	858	457	344	801	484	253	737

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Kategori	30 September 2017			31 Desember 2016			31 Desember 2015			31 Desember 2014		
	Tetap	Kontrak	Total	Tetap	Kontrak	Total	Tetap	Kontrak	Total	Tetap	Kontrak	Total
Sarjana (S1)	303	316	619	266	186	452	230	182	412	250	121	371
Sarjana Muda(D3)	114	165	279	79	57	136	81	59	140	89	50	139
Non Sarjana	182	286	468	153	117	270	146	103	249	145	82	227
Jumlah	599	767	1.366	498	360	858	457	344	801	484	253	737

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia

Kategori	30 September 2017			31 Desember 2016			31 Desember 2015			31 Desember 2014		
	Tetap	Kontrak	Total	Tetap	Kontrak	Total	Tetap	Kontrak	Total	Tetap	Kontrak	Total
<21	2	10	12	1	2	3	0	8	8	3	3	6
21 - 30	169	299	468	131	116	247	127	133	260	147	115	262
31 - 40	296	387	683	253	197	450	232	174	406	244	115	359
41 - 50	109	67	176	98	45	143	87	28	115	79	20	99
51 - 60	18	3	21	13	0	13	8	1	9	8	0	8
>60	5	1	6	2	0	2	3	0	3	3	0	3
Jumlah	599	767	1.366	498	360	858	457	344	801	484	253	737

Dalam hal pemberhentian karyawan, Perseroan selalu mengikuti dan mematuhi peraturan Departemen Tenaga Kerja.

4. PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Penerapan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance* atau GCG) dengan baik yang telah dijalankan oleh jajaran Direksi, manajemen dan Perseroan secara keseluruhan terus ditingkatkan. Langkah-langkah Perseroan guna meningkatkan penjualan, mencetak laba dan bertumbuh harus dilaksanakan lewat cara-cara yang sehat dengan penuh tanggung jawab, akuntabilitas dan transparansi. Penerapan GCG oleh Perseroan diharapkan dapat terus menjaga kepercayaan para pemegang sahamnya, serta para mitra kerja Perserpan. Pelaksanaan GCG Perseroan meliputi kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan setahun sekali, Rapat Bulanan oleh Dewan Komisaris dan Direksi, Pertemuan Komite Audit yang dilaksanakan empat kali dalam setahun, dan Audit Internal Perseroan yang melaksanakan tugasnya setahun penuh. Selain itu, setiap tahun diadakan rapat kerja (raker) yang wajib dihadiri oleh setiap kepala kantor cabang dan tim manajemen kantor pusat. Sesi ini berguna untuk koordinasi, peninjauan, dan pembahasan hasil serta rencana kerja Perusahaan secara keseluruhan.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Tugas utama Dewan Komisaris adalah mengawasi dan memantau kegiatan Direksi dalam mengelola Perseroan, melaksanakan tugas dan menerapkan rencana kerja. Dewan Komisaris juga dapat memberi petunjuk atau arahan dalam pelaksanaan strategi usaha Perseroan.

Direksi

Direksi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Tugas utama Direksi adalah melaksanakan rencana usaha yang telah diterapkan dan menjalankan aktivitas Perseroan yang sesuai dengan rencana usaha tersebut. Direksi dituntut untuk memimpin, mengelola serta mencapai semua objektif dan tujuan Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi secara rutin menyelenggarakan pertemuan atau rapat guna membahas kegiatan, kinerja dan rencana ke depan Perseroan.

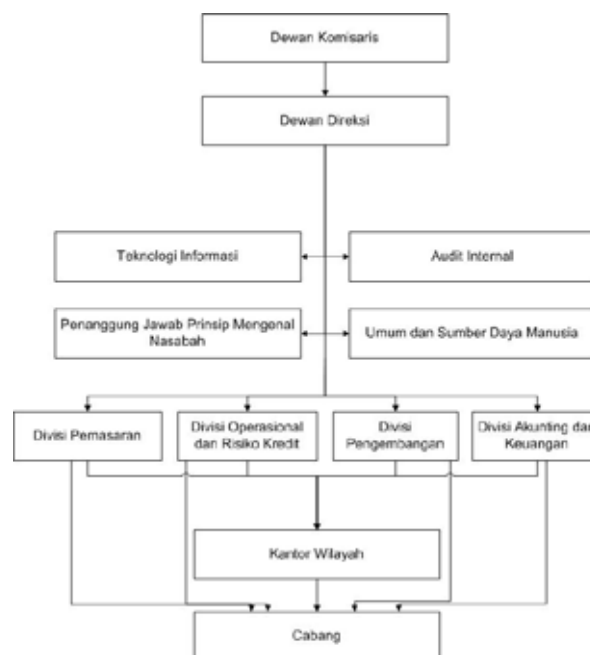
5. PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN

Sebagai bagian dari komunitas, Perseroan juga memiliki tanggung jawab kepada masyarakat yang juga telah berperan bagi pertumbuhan perusahaan. Tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*) Perseroan diwujudkan melalui berbagai kegiatan sosial seperti donasi untuk panti asuhan dan orang kurang mampu. Di samping itu, Perseroan juga telah mendukung penelitian dari sejumlah perguruan tinggi yang terkait dengan aktivitas perusahaan pembiayaan.

Di tahun 2014, Group Batavia Prosperindo membentuk Yayasan Batavia Prosperindo Peduli. Yayasan menaungi sebuah sekolah yaitu sekolah Misi Bagi Bangsa di Tanjung Ugang, Batu Aji, Batam, yang membangun sekolah Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD), diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Perseroan berpartisipasi dalam program-program yang meningkatkan akses pendidikan bagi generasi muda bangsa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Partisipasi Perseroan ini mencerminkan kepedulian dan komitmen nyata Perseroan untuk turut mencerdaskan kehidupan bangsa.

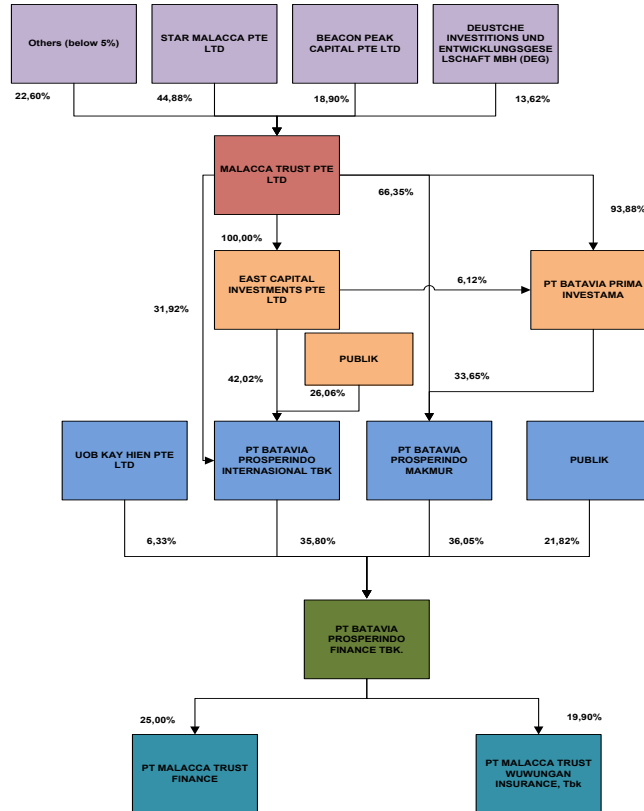
Selain itu di tahun 2016, melalui Yayasan Batavia Prosperindo Peduli bersama dengan anak perusahaan lain dalam Group Batavia Prosperindo, dimana yayasan ini menaungi program-program Sekolah Misi Bagi Bangsa (SMBB) di Tanjung Ugang, Batu Aji, Batam. Proses pembangunan gedung sekolah SMBB yang telah selesai di tahun 2015 dan diresmikan di tahun 2016, serta program anak asuh murid-murid sekolah tersebut yang juga melibatkan Perseroan, merupakan program utama bakti sosial Perseroan.

6. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN PER 31 DESEMBER 2017



7. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN DAN PENGURUSAN

STRUKTUR PEMEGANG SAHAM PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK PER 31 DESEMBER 2017



Pengendali hingga pemegang saham individu (*Ultimate Beneficiary Owner*) Perseroan adalah Kartini Jusup melalui Star Malacca Pte Ltd.

Tabel Hubungan Kepengurusan, Pengawasan, Kepemilikan Dan Afiliasi Antara Perseroan Dan Pemegang Saham Perseroan:

NAMA	PERSEROAN	BPM	BPI
Irena Istarly Iskandar	Komut	-	Komut
Christopher J. Clower	Kom	-	-
Desti Liliati	Komin	-	-
Markus Dinarto Pranoto	Dirut	-	-
Indah Mulyawan	Dirin	-	-
Jasin Hermawan	Dir	-	-
Hady Sutiono	Dir	-	-
Rudi Setiadi Tjahjono	-	Dir	Dirut
Luo Xude	-	-	Dirin
Rudy Johansen	-	Kom	Kom
Eveline	-	-	Komin

Keterangan:

Komut : Komisaris Utama
 Komin : Komisaris Independen
 Kom : Komisaris
 BPM : PT Batavia Prosperindo Makmur
 Dirut : Direktur Utama
 Dir : Direktur
 Dirin : Direktur Independen
 BPI : PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, pemegang saham perseroan yang berbentuk badan hukum dan kepemilikan sahamnya di atas 5% (lima persen) atau lebih adalah PT Batavia Prosperindo Makmur, PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk, dan UOB Kay Hian Pte Ltd.

8. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

8.1. PT Batavia Prosperindo Makmur (“BPM”)

Riwayat Singkat

BPM didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Batavia Prosperindo Makmur No.1 tanggal 5 April 2016 dibuat dihadapan Notaris Lady Ita Larosa Boru Simanihuruk, SH, MKn, Notaris di Tangerang dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0017718.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 6 April 2016 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0043340.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 6 April 2016.

Anggaran dasar BPM telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Batavia Prosperindo Makmur No. 2 tanggal 2 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Humberg Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0023599.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 8 Desember 2016 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0147455.AH.01.11.Tahun 1016 tanggal 8 Desember 2016.

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Batavia Prosperindo Makmur No. 2 tanggal 2 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Humberg Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara, maksud dan tujuan BPM adalah bergerak dalam bidang jasa konsultasi bisnis dan manajemen. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, BPM dapat melakukan kegiatan usaha utama yaitu menjalankan usaha-usaha di bidang jasa yang meliputi jasa konsultasi bidang bisnis, manajemen, dan administrasi kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.

Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Batavia Prosperindo Makmur No. 2 tanggal 2 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Humberg Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT Batavia Prosperindo Makmur adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	9.000.000	900.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Malacca Trust Pte Ltd	2.847.900	284.790.000.000	66,97
PT Batavia Prima Investama	1.404.710	140.471.000.000	33,03
Total	4.252.610	425.261.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	4.747.390	474.739.000.000	

Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Batavia Prosperindo Makmur No. 2 tanggal 2 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Humberg Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan PT Batavia Prosperindo Makmur adalah sebagai berikut :

Komisaris : Rudy Johansen
Direktur : Rudi Setiadi Tjahjono

Ikhtisar Data Keuangan

Data keuangan pokok di bawah ini diambil dari laporan keuangan PT Batavia Prosperindo Makmur untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2016 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Kosasih, Nurdiaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (*Member Crowe Horwath International*) dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian.

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 SEPTEMBER	31 JULI
	2016 (TIDAK AUDIT)	2016 (AUDIT)
Total Aset	1.275.207	1.200.292
Total Liabilitas	640.516	570.672
Total Ekuitas	634.691	629.620
Penghasilan	79.722	23.881
Laba (Rugi) Usaha	6.430	(808)
Laba (Rugi) Bersih	4.076	(935)

8.2. PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk (BPI)

Riwayat Singkat

BPI didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 78 tanggal 12 November 1998, akta mana telah diubah melalui Akta Perubahan No. 108, tanggal 25 Maret 1999, Akta Perubahan No. 15, tanggal 19 April 1999, dan Akta Perubahan No. 18 tanggal 5 Oktober 1999, yang seluruh akta tersebut dibuat di hadapan Irawan Soerodjo, S.H., Notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C-18678.HT.01.01TH99 tanggal 10 November 1999 dan telah didaftarkan di Daftar Perusahaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 279/BH09.03/IV/2000 dengan Tanda Daftar Perusahaan No. 090317429517 tanggal 5 April 2000 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 4522.

Anggaran dasar BPI telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk No. 265 tanggal 30 April 2015 dibuat di hadapan Doktor Irawan Soerodjo, S.H., MSi., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.03-0931268 dengan Daftar Perseroan No. AHU-3503662.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 11 Mei 2015.

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk No. 265 tanggal 30 April 2015 dibuat di hadapan Doktor Irawan Soerodjo, S.H., MSi., Notaris di Jakarta, maksud dan tujuan BPI adalah berusaha dalam bidang jasa konsultasi bisnis dan manajemen. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, BPI dapat melakukan kegiatan usaha utama yaitu menjalankan usaha-usaha di bidang jasa konsultasi bisnis dan manajemen, serta usaha penunjang yaitu menjalankan usaha-usaha lain yang berkaitan dan menunjang kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk melakukan perencanaan dan pembuatan desain dalam rangka pengembangan bisnis dan manajemen.

Permodalan

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora (dahulu PT Adimitra Transferindo) per tanggal 31 Desember 2017, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	1.750.000.000	175.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
East Capital Investment Pte Ltd	215.990.000	21.599.000.000	42,02
Malacca Trust Pte Ltd	164.061.300	16.406.130.000	31,92
UOB Kay Hian Pte Ltd	74.341.300	7.434.130.000	14,46
Rudy Johansen	100.000	10.000.000	0,02

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Masyarakat	59.518.300	5.951.830.000	11,58
Total	514.010.900	51.401.090.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.235.989.100	123.598.910.000	

Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk No. 37 tanggal 4 April 2014 dibuat dihadapan Doktor Irawan Soerodjo, S.H., Msi., Notaris di Jakarta, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris : Irena Istarly Iskandar
 Komisaris : Rudy Johansen
 Komisaris Independen : Eveline

Direksi

Direktur Utama : Rudi Setiadi Tjahjono
 Direktur Independen : Luo Xude

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah 5 tahun.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Data keuangan pokok di bawah ini diikhtisarkan dari laporan keuangan konsolidasian PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Juninho Widjaja, CPA dari KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (*Member Crowe Horwath International*) dengan opini Wajar Tanpa Modifikasi.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2017 (Tidak diaudit)	2016 (Audit)	2015 (Audit)
Total Aset	1.272.267	513.704	550.900
Total Liabilitas	781.807	86.232	184.943
Total Ekuitas	490.459	427.472	365.957
Penghasilan	225.878	246.711	228.944
Laba usaha	76.152	75.297	66.146
Laba (Rugi) Bersih	71.052	68.460	58.817

8.3. UOB Kay Hian Pte Ltd

Riwayat Singkat

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan No. 0047/1970, UOB Kay Hian Pte Ltd merupakan perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum Singapura. Kantor UOB Kay Hian Pte Ltd merupakan salah satu perusahaan pialang saham terbesar di Asia yang berkedudukan di Singapura.

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan No. 0047/1907, maksud dan tujuan UOB Kay Hian Pte Ltd adalah berusaha dalam bidang jasa transaksi jual beli saham. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, UOB Kay Hian Pte Ltd melakukan kegiatan usaha utama yaitu menjalankan bisnis sebagai pialang saham, pemegang saham, dealer (sebagai prinsipal atau lainnya), pemborong saham, surat hutang, saham debenture, dana, obligasi, surat-surat berharga, dan segala bentuk investasi dengan memberikan layanan perantara perdagangan efek dan terkait dengan institusi dan klien ritel.

Permodalan

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan No. 0047/1970-W, susunan struktur modal dan pemegang saham UOB Kay Hian Pte Ltd adalah sebagai berikut :

Struktur Modal

Modal Dasar Perusahaan adalah sebesar S\$ 20.000.000 (dua puluh juta Dollar Singapura) yang terbagi menjadi 1.000.000 (satu juta) saham preferen kumulatif seharga S\$1 (satu Dollar Singapura) per saham dan 19.000.000 (sembilan belas juta) saham biasa seharga S\$1 (satu Dollar Singapura) per saham.

Susunan Pemegang Saham

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham
Mr. Khoo Hock Choo	1
Mrs. Doris Khoo	1
Mr. Ng Soo Peng	1
Total	3

Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Data Perseroan UOB Kay Hian Pte Ltd yang didapat melalui sistem *Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA)*, susunan anggota Direksi UOB Kay Hian Pte Ltd adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	: Wee Ee Chao
Direktur	: Kok Heng Loong
Direktur	: Oh Whee Mian
Direktur	: Tan Kheng Chye Gary
Direktur	: Esmond Choo Liong Gee
Direktur	: Tan Chek Chek
Direktur	: Lim Seng Bee

9. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan melakukan transaksi usaha dan keuangan dengan pihak berelasi. Sifat hubungan dan sifat transaksi Perseroan dengan pihak berelasi per tanggal 30 September 2017 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Transaksi	Jangka Waktu
1	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk.	Entitas Sepengendali	Asuransi Kendaraan No 1002210217000068	7-2-2017 s.d. 7-2-2019
2	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk.	Entitas Sepengendali	Asuransi Kendaraan No 1002210217000067	7-2-2017 s.d. 7-2-2019
3	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk.	Entitas Sepengendali	Asuransi Kendaraan No 1002210217000070	14-2-2017 s.d. 14-2-2019
4	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk.	Entitas Sepengendali	Asuransi Kendaraan No 1002210217000071	17-2-2017 s.d. 17-2-2019
5	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk.	Entitas Sepengendali	Asuransi Kendaraan No 1002210217000069	11-2-2017 s.d. 11-2-2019
6	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk.	Entitas Sepengendali	Asuransi Kendaraan No 1002210317000050	9-3-2017 s.d. 9-3-2018
7	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk.	Entitas Sepengendali	Asuransi Kendaraan No 1002210517000127	2-5-2017 s.d. 2-5-2018
8	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk.	Entitas Sepengendali	Asuransi Kendaraan No 1002210517000309	3-5-2017 s.d. 3-5-2018
9	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk.	Entitas Sepengendali	Asuransi Kendaraan No 1002210617000498	21-6-2017 s.d. 21-6-2018

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Transaksi	Jangka Waktu
10	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk.	Entitas Sepengendali	Asuransi Kendaraan No 1002210817000575	8-8-2017 s.d. 8-8-2018
11	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk.	Entitas Sepengendali	Asuransi Kendaraan No 1002210817000241	26-8-2017 s.d. 26-8-2018
12	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk.	Entitas Sepengendali	Asuransi Kendaraan No 1002210917000175	4-9-2017 s.d. 4-9-2018
13	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk.	Entitas Sepengendali	Asuransi Kendaraan No 1002211117000326	31-10-2017 s.d. 31-10-2018
14	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk.	Entitas Sepengendali	Asuransi Kendaraan No 1002211116000263	16-11-2017 s.d. 16-11-2018

Transaksi-transaksi Perseroan dengan para pihak berelasi dapat dirinci sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September 2017	
	Transaksi Berelasi	% Terhadap Jumlah Aset/Liabilitas
Aset		
Piutang pembiayaan konsumen		
PT Batavia Prosperindo Trans	13.047	0,87
Uang muka dan beban dibayar di muka		
PT Batavia Prosperindo Properti	131	0,01
Liabilitas		
Beban Masih Harus Dibayar		
PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk.	3.447	0,37

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September 2017	
	Transaksi Berelasi	% Terhadap Jumlah Pendapatan/Beban
Penghasilan pembiayaan konsumen		
PT Batavia Prosperindo Trans	1.406	0,57
Penghasilan administrasi		
PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk.	1.048	0,42
Beban sewa		
PT Batavia Prosperindo Trans	2.914	1,34
PT Batavia Prosperindo Properti	97	0,04
Beban asuransi		
PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk.	412	0,19
Beban honorarium tenaga ahli		
PT Batavia Prosperindo Sekuritas	2.170	1,00
PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk.	90	0,04

10. PERJANJIAN DAN KONTRAK PENTING DENGAN PIHAK LAIN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan mengadakan beberapa perjanjian penting dengan beberapa pihak ketiga, yakni sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ketentuan Umum	Masa Berlaku
1.	Akta No. 3 tanggal 1 Desember 2015	1. Perseroan; 2. PT Bank Victoria Internasional Tbk	Perseroan dan Bank menandatangani Perjanjian Kredit Pinjaman Tetap Dengan Angsuran VIII (PTDA VIII) dengan limit maksimum sebesar Rp 100 miliar. Pinjaman dikenakan bunga tetap sebesar: Tenor pinjaman s.d. 1 tahun : 11,00% Tenor pinjaman > 1 - 2 tahun: 11,50% Tenor pinjaman > 2 - 3 tahun: 11,75%	1 Desember 2018
2.	Surat Persetujuan Kredit No.116/SKM-KPP/VIC/XI/15, Tanggal 23 November 2015 sebagaimana diubah dengan Surat Pengurangan Plafond Fasilitas Kredit Demand Loan No. 040/SKM-KPP/VIC/III/16 tanggal 14 Maret 2016	1. Perseroan; 2. PT Bank Victoria Internasional Tbk	Berdasarkan Perjanjian Kredit ini, Bank memberikan Fasilitas Kredit Demand Loan (Uncommitted) dengan maksimum Rp 100 miliar. Suku bunga mengikuti suku bunga pasar yang berlaku. Suku bunga fixed selama jangka waktu yang dipilih oleh Perseroan untuk jumlah yang telah ditarik. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, fasilitas ini belum digunakan. Perjanjian tersebut telah diubah dan dimuat dalam Surat Pengurangan Plafond Fasilitas Kredit - Demand Loan No. 040/SKM/KPP/VIC/III/16 tanggal 14 Maret 2016, dimana PT Bank Victoria Internasional Tbk mengurangi fasilitas kredit yang diberikan dari sebesarRp100.000.000.000 diubah menjadi Rp 50.000.000.000.	14 Maret 2020
3.	Akta No. 47 tanggal 13 April 2017	1. Perseroan; 2. PT Bank Victoria Internasional Tbk	Perseroan dan Bank menandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja dengan maksimum limit sebesar Rp 38 miliar. Pinjaman dikenakan bunga sebesar 12,00% - 15,00% per tahun.	13 April 2021
4.	Akta No.45 tanggal 9 Mei 2014	1. Perseroan; 2. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	Perseroan dan Bank menandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja dengan maksimum limit sebesar Rp 40 miliar Pinjaman dikenakan bunga sebesar 12,25% per tahun dan dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen yang diikat secara fidusia sebesar maksimum Rp 44.000.000.000.	9 Mei 2018
5.	Akta No.21 tanggal 14 April 2015	1. Perseroan; 2. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	Perseroan dan Bank menandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja dengan maksimum limit sebesar Rp 60 miliar . Pinjaman dikenakan bunga sebesar 12,50% per tahun dan dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen yang diikat secara fidusia maksimum sebesar Rp 66.000.000.000.	14 Oktober 2019
6.	Surat Persetujuan Kredit No. 026/KOM-KKU/SPPK/2016 tanggal 2 September 2016	1. Perseroan; 2. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	Perseroan dan Bank menandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja dengan maksimum limit sebesar Rp 40 miliar . Pinjaman dikenakan bunga sebesar 11,50% per tahun.	2 September 2019
7.	Akta No. 14 tanggal 8 September 2016	1. Perseroan; 2. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	Perseroan dan Bank menandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja dengan maksimum limit sebesar Rp 40 miliar. Pinjaman dikenakan bunga sebesar 11,25% per tahun dan dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen yang diikat secara fidusia maksimum sebesar Rp 44.000.000.000..	8 Desember 2019

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ketentuan Umum	Masa Berlaku
8.	Akta No. 21 tanggal 21 Juni 2017	1. Perseroan; 2. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	Perseroan dan Bank menandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja dengan maksimum limit sebesar Rp 35 miliar. Pinjaman dikenakan bunga sebesar 11,50% per tahun dan dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen yang diikat secara fidusia maksimum sebesar Rp 38.500.000.000.	21 Desember 2020
9.	Akta No.64 tanggal 17 Desember 2013	1. Perseroan; 2. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Perseroan dan Bank menandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja dengan maksimum limit sebesar Rp 75 miliar . Pinjaman dikenakan bunga sebesar 11,0% per tahun.	21 Februari 2018 Perjanjian sudah habis masa berlakunya tetapi masih ada sisa pinjaman
10.	Akta No.21 tanggal 9 Juni 2014	1. Perseroan; 2. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Perseroan dan Bank menandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja dengan maksimum limit sebesar Rp 75 miliar . Pinjaman dikenakan bunga sebesar 12,50% per tahun dan dijamin dengan piutang yang diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan maksimum sebesar Rp 78.750.000.000	9 Juni 2018
11.	Akta No.81 tanggal 26 November 2014	1. Perseroan; 2. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Perseroan dan Bank menandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja dengan maksimum limit sebesar Rp 75 miliar . Pinjaman dikenakan bunga sebesar 12,50% per tahun dan dijamin dengan piutang yang diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan maksimum sebesar Rp 78.750.000.000.	26 Juni 2019
12.	Akta No. 1 tanggal 1 September 2016	1. Perseroan; 2. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Perseroan dan Bank menandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja dengan maksimum limit sebesar Rp 75 miliar . Pinjaman dikenakan bunga sebesar 11,0%-11,5% per tahun.	31 Agustus 2022
13.	Akta Perjanjian Kredit No. 3, tanggal 8 Agustus 2014	1. Perseroan; 2. PT Bank ICBC Indonesia ("Bank")	Berdasarkan Perjanjian Kredit ini, Bank memberikan Pinjaman Tetap dengan maksimum pinjaman sampai dengan Rp. 50 miliar. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 12,5% per tahun.	8 Agustus 2017 (Sedang dalam proses pengurusan) Perjanjian sudah habis masa berlakunya tetapi masih ada sisa pinjaman
14.	Akta No. 8 tanggal 4 April 2014.	1. Perseroan; 2. PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Bank")	Berdasarkan Perjanjian Kredit ini, Bank memberikan fasilitas Pinjaman Berjangka dengan batas maksimum pinjaman sampai dengan Rp 100 miliar. Pinjaman dikenakan bunga berkisar antara 12%-12,5% per tahun dan fasilitas-fasilitas pinjaman ini dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen yang diikat secara fidusia sebesar maksimum Rp 125 miliar.	4 April 2017 (Sedang dalam proses pengurusan) Perjanjian sudah habis masa berlakunya tetapi masih ada sisa pinjaman
15.	Akta No. 19 tanggal 25 November 2016	1. Perseroan; 2. PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Bank")	Berdasarkan Perjanjian Kredit ini, Bank memberikan fasilitas Pinjaman Berjangka dengan batas maksimum pinjaman sampai dengan Rp 200 miliar. Pinjaman dikenakan bunga berkisar antara 11,00% per tahun dan fasilitas-fasilitas pinjaman ini dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen yang diikat secara fidusia sebesar maksimum Rp 210 miliar.	25 November 2020

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ketentuan Umum	Masa Berlaku
16.	Akta Perjanjian Kredit No. 19, tanggal 18 Desember 2013, sebagaimana diubah Perubahan Perjanjian Kredit No. 6430/PPK/SLK/2016 tanggal 7 Desember 2016	1. Perseroan; 2. PT Bank Central Asia Tbk ("Bank")	Berdasarkan Perjanjian Kredit ini, Bank memberikan Kredit Lokal dengan maksimum pinjaman sampai dengan Rp. 7 miliar dan Kredit Investasi I maksimum sebesar Rp 7,4 miliar. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 11,75% per tahun.	31 Desember 2017 (Sedang dalam proses pengurusan) Perjanjian sudah habis masa berlaku.
17	Akta Perjanjian Kredit No. 20, tanggal 18 Desember 2013, tanggal 18 Desember 2013, sebagaimana diubah Perubahan Perjanjian Kredit No. 6430/PPK/SLK/2016 tanggal 7 Desember 2016	1. Perseroan; 2. PT Bank Central Asia Tbk ("Bank")	Berdasarkan Perjanjian Kredit ini, Bank memberikan Fasilitas Kredit Installment Loan 3 maksimum sebesar 52 miliar. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 11,75% per tahun.	31 Desember 2017 (Sedang dalam proses pengurusan) Perjanjian sudah habis masa berlakunya tetapi masih ada sisa pinjaman
18.	Akta No. 822 tanggal 26 Mei 2017	1. Perseroan; 2. PT Bank Sinarmas Tbk	Berdasarkan Perjanjian Kredit ini, Perseroan dan Bank menandatangani Perjanjian Kredit <i>Term Loan Non Revolving</i> dengan batas maksimum sebesar Rp 100 miliar. Pinjaman dikenakan bunga berkisar antara 11,00% per tahun dan dijamin dengan piutang yang diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan maksimum sebesar Rp 105 miliar.	26 Mei 2021
19.	Akta No. 18 tanggal 27 Maret 2017	1. Perseroan; 2. PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	Berdasarkan Perjanjian Kredit ini, Perseroan dan Bank menyetujui Perjanjian Kredit Pinjaman Tetap dengan batas maksimum sebesar Rp 100 miliar. Pinjaman dikenakan bunga berkisar antara 12,00% per tahun dan dijamin dengan piutang yang diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan maksimum sebesar Rp 100 miliar.	27 Maret 2021
20.	Akta No. 82 tanggal 29 September 2016	1. Perseroan; 2. PT Bank MNC International Tbk	Berdasarkan Perjanjian Kredit ini, Perseroan dan Bank menandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja dengan batas maksimum sebesar Rp 25 miliar. Pinjaman ini dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen yang diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan maksimum sebesar Rp 25 miliar. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 14,00% per tahun.	29 September 2022
21.	Akta No. 20 tanggal 21 April 2017	1. Perseroan; 2. PT Bank MNC International Tbk; 3. PT Magna Finance Tbk	Berdasarkan Perjanjian Kredit ini, Perseroan, PT Magna Finance Tbk dan Bank menandatangani akta pengalihan fasilitas pinjaman PT Magna Finance Tbk kepada Perseroan sehubungan dengan transaksi akuisisi aset dan liabilitas. Fasilitas pinjaman berupa pinjaman transaksi khusus dengan limit maksimum sebesar Rp 47 miliar. Pinjaman ini dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen yang diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan maksimum sebesar Rp 45 miliar. Pinjaman ini dikenai bunga sebesar 11,25%-14,50% per tahun.	(Sedang dalam proses pengurusan) Perjanjian sudah habis masa berlakunya tetapi masih ada sisa pinjaman
22.	Surat Persetujuan Kredit No. 288/BWSI/LN/IX/2017 tanggal 15 September 2017	1. Perseroan; 2. PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	Berdasarkan Perjanjian Kredit ini, Perseroan dan Bank menyetujui Perjanjian Kredit Modal Kerja dengan batas maksimum sebesar Rp 50 miliar. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 11,00% per tahun dan dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen yang diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan sebesar 110% dari jumlah pinjaman yang ditarik. Sampai dengan tanggal laporan keuangan, Perusahaan belum menggunakan fasilitas ini.	15 September 2020

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ketentuan Umum	Masa Berlaku
23.	Credit Facility Agreement No. C2017 – 376 Tanggal 15 September 2017	1. Perseroan; 2. PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	Berdasarkan Perjanjian Kredit ini, Perseroan dan Bank menyetujui Perjanjian Kredit Modal Kerja dengan batas maksimum sebesar Rp 50 miliar. Bunga: 11% per tahun	15 September 2020

Tidak ada satupun dari perjanjian-perjanjian sebagaimana disebutkan di atas yang dapat menghalangi Perseroan untuk dapat melaksanakan Penawaran Umum. Seluruh perjanjian-perjanjian sebagaimana disebutkan di atas masih berlaku dan mengikat Perseroan, meskipun beberapa perjanjian kredit telah berakhir, namun sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan masih memiliki kewajiban sebagai Debitur kepada bank.

11. PERKARA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan tidak sedang terlibat dalam perselisihan, sengketa, somasi, panggilan menyangkut permasalahan hukum di luar pengadilan maupun perkara hukum, baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing atau dalam perselisihan administratif dengan pbadan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan atau diajukan untuk kepailitan oleh pihak ketiga atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tidak terlibat suatu perkara yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan, yaitu: (i) suatu sengketa atau perkara perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri; (ii) perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI); (iii) pengajuan Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang terdaftar pada Pengadilan Niaga; (iv) perkara Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) maupun perkara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melalui Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat; dan (v) sengketa tata usaha negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara serta; (vi) sengketa atau perkara perpajakan pada Pengadilan Pajak yang berwenang.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris tidak menerima somasi dari pihak manapun.

12. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP

Jumlah nilai buku aset tetap yang dimiliki Perseroan per tanggal 30 September 2017 adalah Rp76.087 juta. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki aset tetap dengan rincian sebagai berikut:

a. Bidang Tanah Berikut Bangunan Status Dimiliki atau dikuasai Perseroan:

1. Sebidang Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3111 tanggal 25 Agustus 2011 di Kelurahan Sidokare, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur yang berlaku sampai dengan 1 Juni 2029 dengan Surat Ukur No. 00023/12100804/2011 seluas 80 m² (delapan puluh meter persegi), berlokasi di Citra Indah Blok RE-11;
2. Sebidang Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 820 tanggal 23 April 2009 di Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, Sumatera Selatan yang berlaku sampai dengan 19 September 2042 dengan Surat Ukur No.98/LorokPakjo/2009 seluas 71 m² (tujuh puluh satu meter persegi);
3. Sebidang Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 13 tanggal 15 Agustus 2009 di Kelurahan Marga Rahayu, Kecamatan Lubuk linggau Selatan II, Kabupaten Lubuk linggau, Sumatera Selatan yang berlaku sampai dengan 10 Oktober 2042 dengan Surat Ukur No. 361/Mg.Rahayu/2009 seluas 59 m² (lima puluh sembilan meter persegi), dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 14 tanggal 15 Agustus 2009, terletak di Kelurahan Marga Rahayu, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II, Kabupaten Lubuklinggau, Sumatera Selatan dengan Surat Ukur No. 362/Mg.Rahayu/2009 seluas 58 m² (lima puluh delapan meter persegi);

4. Sebidang Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01096 Karangtempel, Semarang tertanggal 26 Desember 2012, masa berlaku sampai dengan 26 Pebruari 2043, seluas 144 m² (seratus empat puluh empat meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No. 00019/Karangtempel/2012 tertanggal 10 Desember 2012, setempat dikenal dengan Jl. Brigjend Katamso.
5. Sebidang Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1423 tanggal 26 Juni 2013 di Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kabupaten Kota Tegal, Jawa Tengah, yang berlaku sampai 5 Juni 2043 dengan Surat Ukur No. 360/Mintaragen/2013 seluas 101m² (seratus satu meter persegi).
6. Sebidang Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00329 tanggal 9 Mei 2014 di Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta yang berlaku sampai 1 April 2044 dengan Surat Ukur No. 01298/2014 seluas 136m² (seratus tiga puluh enam meter persegi).
7. Sebidang Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 363 tanggal 17 Februari 2014 di Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar, Daerah Tingkat I Bali, berlaku sampai 13 Desember 2043 dengan Surat Ukur No. 409/1999 seluas 57 m² (lima puluh tujuh meter persegi), dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 364 tanggal 22 Juli 1999, terletak di Kelurahan Penatih, Denpasar, Bali berlaku sampai 13 Desember 2043 dengan Surat Ukur No. 412/1999 tertanggal 20 Juli 1999 seluas 93 m² (sembilan puluh tiga meter persegi).
8. Sebidang Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 114 tanggal 30 Juli 2012 di Kelurahan Nganguk, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, berlaku sampai 16 Maret 2045 dengan Surat Ukur No. 363/2012 seluas 82 m² (delapan puluh dua meter persegi).
9. Sebidang Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 726 tanggal 20 September 2001 di Kelurahan Tanjung Baru, Kecamatan Sukarame, Kotamadya Bandar Lampung, Lampung yang berlaku sampai 4 Maret 2034 dengan Surat Ukur No. 490/Tj. B/2001 seluas 130m² (seratus tiga puluh meter persegi).
10. Sebidang Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 273 tanggal 22 September 1997 di Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat yang berlaku sampai 24 September 2033 dengan Surat Ukur No. 12572/1997 seluas 68m² (enam puluh delapan meter persegi).
11. Bangunan yang berdiri di atas sebidang tanah hak sewa kota Surabaya berdasarkan Surat Ijin Pemakaian Tanah No. 188.45/2887P/436.6.18/2013 tanggal 11 November 2013 di Kelurahan Pancang Sewu, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur dengan Surat Ukur No. 2304/SP/2003 seluas 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi).
12. Sebidang Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 730 tanggal 22 November 2015 di Kelurahan Tanjung Baru, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, Lampung yang berlaku sampai 26 November 2035 dengan Surat Ukur No. 84/Tanjung Baru/2015 seluas 233m² (dua ratus tiga puluh tiga meter persegi).
13. Sebidang Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 4810 tanggal 06 Mei 2014 di Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta dengan Surat Ukur No. 00021/Petukangan Utara/2014 seluas 211m² (dua ratus sebelas meter persegi). Sertifikat Hak Milik belum dibalik nama menjadi nama Perseroan.
14. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 55 tanggal 30 April 2015 di Kelurahan Bahu, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara yang berlaku sampai 24 September 2028 dengan Surat Ukur No. 47/Bahu/1999 seluas 120m² (seratus dua puluh meter persegi) atas nama Perseroan.
15. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 713 tanggal 7 Mei 2004 di Kelurahan Temindung Permai, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dengan Surat Ukur No. 47/Bahu/1999 seluas 120m² (seratus dua puluh meter persegi) atas nama Perseroan.
16. Sertifikat Hak Milik No. 01195/Tanjung Baru dan 01194/Tanjung Baru tanggal 31 Maret 2015 Kelurahan Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan atas nama Hendra Halim, berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 14 tanggal 5 Februari 2016 dibuat di hadapan H. Iqbal Amputra, S.H., M.kn., Notaris di Ogan Komering Ulu, dimana harga pembelian telah dilunasi oleh Perseroan.
17. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00033 tanggal 31 Juli 2003 di Kelurahan Karang Mekar, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dengan Surat Ukur No. 31/KRMR/2003 seluas 120 m² (seratus dua puluh meter persegi) atas nama Perseroan.

18. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 8/Cilinaya tanggal 21 Maret 2017 di Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Surat Ukur No. 455/Cilinaya/2015 seluas 141 m² (seratus empat puluh satu meter persegi) atas nama Perseroan, berdasarkan Akta Perjanjian Pelepasan Hak No. 10 tanggal 14 Februari 2017 dibuat di hadapan Heni Hapsari, S.H., Notaris di Mataram, dimana harga pelepasan telah dilunasi oleh Perseroan.
19. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00068 tanggal 8 November 2016 di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur No. 1307/Tj.Baru/2015 seluas 134 m² (seratus tiga puluh empat meter persegi) atas nama Perseroan.
20. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00069 tanggal 8 November 2016 di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur No. 1308/Tj.Baru/2015 seluas 134m² (seratus tiga puluh empat meter persegi) atas nama Perseroan.
21. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 273 tanggal 10 November 2014 di Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan Surat Ukur No. 12572/1997 seluas 68m² (enam puluh delapan meter persegi) atas nama Perseroan.
22. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 20120/Balla Parang tanggal 24 Desember 2014 di Kelurahan Balla Parang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Surat Ukur No. 01348/Balla Parang/2014 seluas 133m² (seratus tiga puluh tiga meter persegi) atas nama H. Ady Rachmat, berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 603 tanggal 4 September 2017 dibuat di hadapan Yenni Saleh, S.H., M.kn., Notaris di Makassar, dimana harga pembelian telah dilunasi oleh Perseroan.
23. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1990/Asam Kumbang tanggal 3 Oktober 2014 di Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dengan Surat Ukur No. 00249/Asam Kumbang/2014 seluas 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi) atas nama PT A. Residence, berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 108 tanggal 21 April 2017 dibuat di hadapan Henry Tjong, S.H., Notaris di Medan, dimana harga pembelian telah dilunasi oleh Perseroan.

b. Kendaraan:

Daftar kendaraan yang saat ini dimiliki oleh Perseroan sebanyak 149 unit dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Kendaraan	Tahun	Nomor Polisi	No. BPKB	A/N
1	Toyota Avanza	2006	D 1472 IL	E 2346479 H	Perseroan
2	Toyota Avanza	2008	B 1297 SH	F 0746024 G	Perseroan
3	Toyota Avanza	2006	B 1503 IG	E 2892000 G	Perseroan
4	Toyota Avanza	2008	DA 7757 TT	F 1791452 G	Perseroan
5	Toyota Avanza	2005	B 8704 GP	D 6277905 G	Perseroan
6	Toyota Avanza	2008	B 1575 XV	F 4241210 G	Perseroan
7	Daihatsu Grand Max/ S401	2008	BK 1990 KK	I-03224234	Perseroan
8	Toyota Avanza	2008	BG 1524 QK	I-07703357	Perseroan
9	Toyota Avanza	2008	B 1134 RZ	F 0401202 G	Perseroan
10	Toyota Avanza	2007	B 1393 MH	E 2959011 F	Perseroan
11	Toyota Avanza	2007	B 8311 NQ	H-06633627	Perseroan
12	Toyota Avanza 1300 G	2006	BN 2075 LC	H-09209286	Perseroan
13	Toyota Avanza	2008	B 2678 AE	F 5048387 G	Perseroan
14	Toyota Innova	2011	B 1905 SOE	H-10676773	Perseroan
15	Honda Revo Solo	2010	B 6743 SVR	H 09910062	Supriyadi
16	Toyota Innova G Diesel	2013	B 1704 SRK	J-06032779	Perseroan
17	Toyota Innova G Diesel	2013	B 1452 SRK	J-06021622	Perseroan
18	Toyota Avanza	2009	B 1047 SFU	G 1348819 G	Perseroan
19	Toyota Avanza	2008	B 1763 TF	F 1119855 G	Perseroan
20	Toyota Avanza	2006	B 2166 ES	E 1441480	Perseroan
21	Toyota Avanza	2006	BG 1306 FL	I-03123469	Perseroan
22	Toyota Avanza G	2007	B 1764 GK	E 6518564 G	PT Mulia Sasmita Bhakti
23	Toyota	2008	DM 1186 AD	H-05728955	Perseroan
24	Toyota Avanza	2008	B 1615 SS	F 1119855 G	Perseroan
25	Toyota Avanza	2009	B 1037 SFU	G 1348816 G	Perseroan

No.	Jenis Kendaraan	Tahun	Nomor Polisi	No. BPKB	A/N
26	Suzuki APV	2008	BA 1867 RD	J-00674491	Perseroan
27	Toyota Avanza G	2009	KH 1172 AE	H 02541370 M	Muhammad Supiani
28	Daihatsu Xenia	2007	B 1443 FU	E 4679481 G	Perseroan
29	Toyota Avanza G 1.3	2005	B 2310 LB	I-04822624	Perseroan
30	Kijang Innova G AT DSL	2012	B 1774 SRJ	J 05886660	Perseroan
31	Toyota Avanza	2005	B 8874 GD	D 3838011	Perseroan
32	Toyota Avanza	2010	KB 1734 CE	H-07979414	Ronny Perdana Saputra
33	Toyota Avanza	2008	B 8178 RP	K-06176633	Perseroan
34	Toyota Avanza	2005	L 1142 DN	H-06373211	Perseroan
35	Daihatsu Xenia	2006	B 2421 RV	K-06305791	Perseroan
36	Daihatsu Xenia	2009	B 1901 UFI	K-10659936	Perseroan
37	Toyota Avanza	2013	B 1628 SYQ	K-10602423	Perseroan
38	Toyota Avanza	2013	B 1553 SYQ	K-10602266	Perseroan
39	Toyota Avanza	2013	B 1566 SYQ	K-10602190	Perseroan
40	Toyota Avanza	2013	L 1638 BK	K-06697532	Perseroan
41	Toyota Avanza	2013	B 1108 SYS	K-10621304	Perseroan
42	Toyota Avanza	2013	B 1110 SYS	K-10621306	Perseroan
43	Toyota Avanza	2013	B 1109 SYS	K-10621305	Perseroan
44	Toyota Avanza	2008	H 8547 GF	K-03125661	Perseroan
45	Toyota Avanza	2004	BH 1180 CL	J-01553558F	Perseroan
46	Toyota Avanza	2012	KB 1202 HQ	I-09650275	Mariana Mulyana Tjhay
47	Honda Supra X	2013	B 3379 SJL	K-00929822	Perseroan
48	Honda Supra X	2013	B 3527 SJL	K-00936330	Perseroan
49	Toyota Avanza	2008	DD 1090 AU	F 2153845 R	Yusri
50	Mazda CX-5	2012	B 1958 SRN	J 06673308	Perseroan
51	Toyota Avanza	2008	DN 434 YN	E 8281059	Perseroan
52	Honda Supra	2013	B 3814 SLA	K 04174137	Perseroan
53	Daihatsu Xenia	2008	B 2886 FI	M 02110141	Perseroan
54	Toyota Avanza	2008	DN 381 AE	F2655600	Eddy Hosan
55	Toyota Avanza	2009	B 1257 SFS	K-106523213	Perseroan
56	Honda Supra X	2014	L 4813 FV	K-13087989	Perseroan
57	Toyota Avanza	2010	R 9288 MH	L-13359626	Perseroan
58	Honda Supra X	2006	B 6204 SHP	E-2189811G	Perseroan
59	Toyota Avanza	2006	B 2414 AB	F 5048487 G	Perseroan
60	Toyota Avanza	2010	DD 1291 RL	L-12055925	Perseroan
61	Toyota Avanza	2007	BA 1398 AL	K-05968903	Perseroan
62	Toyota New Avanza	2013	DA 8187 AT	K-06844584	Perseroan
63	Toyota Avanza	2007	N 1871 BC	J 02181933	Perseroan
64	Toyota Avanza	2008	L 1190 EY	E 9820973	Perseroan
65	Toyota Avanza	2012	KT 1872 NC	L 04290225 N	Perseroan
66	Honda City	2009	B 2603 XV	F9244802 G	Perseroan
67	Toyota Avanza	2010	BN 1711 TL	L 03531859	Perseroan
68	Toyota Avanza	2008	L 1543 BR	E 9820973 J	Perseroan
69	Toyota Avanza	2006	L 1087 QE	DB34061	Perseroan
70	Toyota Avanza	2012	DB 4603 FB	H-04284469	Perseroan
71	Toyota Avanza	2008	BL 1873 NS	F 2555615	Perseroan
72	Toyota Avanza	2010	DB 4091 QB	H 06184839	Perseroan
73	Toyota Alphard	2009	B 8388 DB	M 07368577	Perseroan
74	Toyota Avanza	2010	K 8632 DK	M 06543602	Perseroan
75	Toyota Avanza	2011	KB 1818 EA	L 11501352	Perseroan
76	Toyota Avanza	2006	BL 832 PC	J 05785259	Perseroan
77	Toyota Rush	2011	B 1577 SGZ	N 00383806	Perseroan
78	Ford Ranger	2008	BK 1151 HU	E 5081531	Perseroan
79	Daihatsu Xenia	2011	KT 1498 LA	I 07128300	Perseroan
80	Toyota Avanza	2011	BK 1076 KQ	N 09296470	Perseroan
81	Toyota Avanza	2010	BK 1549 KK	H-0 3698161	Perseroan

No.	Jenis Kendaraan	Tahun	Nomor Polisi	No. BPKB	A/N
82	Toyota Avanza	2013	BG 1433 ZV	M 10881758	Perseroan
83	Toyota Avanza	2012	KH 1035 HC	DK13326	Perseroan
84	Toyota Avanza	2009	B 1925 SGZ	N-05103759	Perseroan
85	Daihatsu Luxio	2010	B 1016 SVE	L-13945944	Perseroan
86	Toyota Avanza	2011	B 1994 UKR	L-13909025	Perseroan
87	Yamaha Vega R	2006	B 6407 SUX	N-05203203	Perseroan
88	Toyota Avanza	2009	B 1764 SGY	L-08513174	Perseroan
89	Daihatsu Xenia	2012	B 1728 SGY	N-06624435	Perseroan
90	Suzuki Carry	2005	B 8242 TE	H-11355162	Perseroan
91	Toyota Avanza	2010	B 1176 TKB	H-00123567	Perseroan
92	Honda Supra X 125	2007	B 6398 UGT	N-04783125	Perseroan
93	Toyota Avanza	2008	D 1202 KC	E-9338421	Perseroan
94	Yamaha Jupiter	2006	B 6048 SII	N-06608995	PT Magna Finance
95	Daihatsu Xenia	2012	B 1716 EKF	J-05226462	Perseroan
96	Suzuki APV	2011	E 1168 2011	J-05259271	Perseroan
97	Toyota Avanza	2010	B 1373 SVE	M-03504280	Perseroan
98	Suzuki APV	2011	BM 1740 ME	I-05874952	M. Ridwan
99	Honda Supra X 125	2006	B 6600 TJW	J-06923457	Perseroan
100	Toyota Avanza	2011	D 1271 OX	I-03667747	PT Magna Finance
101	Yamaha Jupiter Z	2007	B 3159 SYX	J-06884507	Perseroan
102	Toyota Avanza	2010	B 1456 BVG	N-04703987	Perseroan
103	Suzuki FD	2004	B 6939 PAS	N-04799316	Perseroan
104	Suzuki Katana	2003	B 2859 QV	K-00159124	Perseroan
105	Daihatsu Xenia	2003	BM 1339 LB	H-06114858	Perseroan
106	Toyota Avanza	2011	KT 1845 CH	I-04320463	Isransyah
107	Daihatsu Grandmax	2008	B 1102 SGZ	N-05207297	Perseroan
108	Toyota Avanza	2008	B 1237 TWK	N-05454810	Perseroan
109	Toyota Avanza	2009	B 1028 SVB	N-05005569	Perseroan
110	Toyota Avanza	2006	B 1736 SVG	M-13259797	Perseroan
111	Daihatsu Terios	2010	B 1195 SVE	N-05207298	Perseroan
112	Daihatsu Xenia	2010	R 9438 LD	H-07330521	PT Magna Finance
113	Toyota Avanza	2009	B 1759 UFG	F-7372950 G	PT Magna Finance
114	Suzuku Futura	2006	BG 1831 LB	N-07529725	Perseroan
115	Daihatsu Luxio	2010	B 1665 TKH	N-04803981	Perseroan
116	Toyota Avanza	2013	B 1389 UZH	J-05925988	Perseroan
117	Toyota Avanza	2004	B 1377 SCY	M-03979757	Perseroan
118	Toyota Avanza	2005	B 8211 AU	N-04812188	Perseroan
119	Toyota Avanza	2010	B 1404 TFX	L-13899608	Perseroan
120	Toyota Avanza	2010	B 1558 SVC	L-09373743	PT Magna Finance
121	Toyota Avanza	2011	B 1699 UKG	M-07366553	Perseroan
122	Suzuki APV	2010	BG 1118 FB	H-06106296	Bindo
123	Daihatsu Luxio	2010	BM 1773 QZ	L-11073790	PT Magna Finance
124	Toyota Avanza	2011	B 1327 UKP	M-07367620	Perseroan
125	Suzuki APV	2008	B 1021 ON	N-04805917	Perseroan
126	Honda NF 100	1999	B 3395 JK	N-00017360	Perseroan
127	Honda Supra X	2006	B 6079 FKM	-	Perseroan
128	Honda Supra X	2007	B 6517 UGY	N-05197110	Perseroan
129	Mio Soul	2011	B 3007 THJ	L-13593973	Perseroan
130	Yamaha Mio	2012	B 3457 TOQ	N-04799320	Perseroan
131	Daihatsu Terios	2007	B 2795 MP	N-04810590	Perseroan
132	Toyota Rush	2014	B 1149 SIS	N-05308406	Perseroan
133	Toyota Avanza	2013	B 1381 GFG	N-05097896	Perseroan
134	Mitsubishi	2015	D 8646 XW	L-12862650	Rio Sukmarizal
135	Honda BRV	2016	B 2348 SKK	M-07431729	PT Magna Finance
136	Toyota Avanza	2013	BK 1498 IP	M-11623272	Henry Joy
137	Toyota Avanza	2006	D 1135 PW	N-03124861	Bambang H.

No.	Jenis Kendaraan	Tahun	Nomor Polisi	No. BPKB	A/N
138	Toyota Avanza	2007	B 8886 CG	E4885869G	Yuliana Noor
139	Toyota Avanza	2011	B 1632 BOH	I00911377	Perseroan
140	Suzuki GC145	2008	BM 1309 QF	K05995798	Permai Hayati
141	Toyota Avanza	2009	D 1449 AP	N-05658465	Perseroan
142	Toyota Avanza	2006	B 8123 NI	L08450087	Slamet R.
143	Honda CRV	2012	B 1909 SLO	N-04703982	Perseroan
144	Daihatsu F601RV	2011	BG 1210 WK	I04894911	Agusman SH.
145	Suzuki YL6	2011	H 8751 EH	I-06559944	Sutamzis
146	Toyota Avanza	2011	B 1430 SVK	N-06624439	Tjarkum
147	Toyota Avanza	2012	BE 2846 YG	L-05889523	Perseroan
148	Honda CRV	2012	D 117 PF	F7209269H	Perseroan
149	Toyota Avanza	2012	B 1811 POM	I11354626	Rikma Arliyani

13. ASURANSI

Perseroan telah mengasuransikan seluruh aset yang dimilikinya termasuk bangunan, kendaraan dan uang tunai terhadap musibah kebakaran dan musibah umum lainnya dalam jumlah pertanggungan yang memadai melalui beberapa perusahaan asuransi seperti PT Asuransi Multi Artha Guna (“Asuransi MAG”), PT Asuransi Sinarmas (“Asuransi SIMAS”) dan PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk. (“Asuransi MTI”). Perseroan telah mengasuransikan aset yang dimiliki/ dikuasai/ digunakan Perseroan sebagai berikut :

Asuransi Aset Kendaraan

No.	Nomor Polisi	Jangka Waktu	Penanggung	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan
1	36020118006327	3-2-2018 s/d 03-2-2019	Asuransi MAG	Toyota Avanza Nomor Polisi: B 1108 SYS	Rp 135.000.000
2	36020117020243	28-04-2017 s/d 28-04-2018	Asuransi MAG	Honda CRV Nomor Polisi: B 1909 SLO	Rp 280.000.000
3	36020117005858	3-2-2017 s/d 3-2-2019	Asuransi MAG	Toyota Avanza Nomor Polisi: B 1110 SYS	Rp 135.000.000
4	36020118009252	3-2-2018 s/d 3-2-2019	Asuransi MAG	Toyota Avanza Nomor Polisi: B 1109 SYS	Rp 135.000.000
5	1002210617000498	21-06-2017 s/d 21-06-2018	Asuransi MTI	Toyota Rush Nomor Polisi: B 1149 SIS	Rp 160.000.000
6	2002210218000029	7-2-2017 s/d 7-2-2019	Asuransi MTI	Toyota Kijang Innova Nomor Polisi: B 1452 SRK	Rp 190.000.000
7	1002210917000175	04-09-2017 sd 04-09-2018	Asuransi MTI	Daihatsu Xenia Nomor Polisi: B 2886 FI	Rp 90.000.000
8	36020117040008	08-09-2017 s/d 08-09-2018	Asuransi MAG	Suzuki APV Nomor Polisi: AB 1889 RS	Rp 65.000.000
9	2002210218000028	7-2-2018 s/d 7-2-2019	Asuransi MTI	Toyota Kijang Innova Nomor Polisi: B 1704 SRK	Rp 190.000.000
10	2002210218000030	11-2-2018 s/d 11-2-2019	Asuransi MTI	Toyota Avanza G1300 Nomor Polisi: BG 1524 QK	Rp 100.000.000
11	2002210218000031	14-2-2018 s/d 14-2-2019	Asuransi MTI	Toyota Kijang Innova Nomor Polisi: B1774 SRJ	Rp 170.000.000
12	02.059.2018.06187	14-2-2018 s/d 14-02-2019	Asuransi Sinarmas	Toyota Avanza Nomor Polisi: KH 1172 AE	Rp 90.000.000
13	2002210218000032	17-2-2018 s/d 17-2-2019	Asuransi MTI	Toyota Avanza G 1300 Nomor Polisi: DD 1090 AU	Rp 100.000.000
14	1002211117000483	07-03-2017 s/d 07-03-2018	Asuransi MTI	Daihatsu Avanza Nomor Polisi: BG 1393 MH	Rp 110.000.000
15	36020118009241	18-03-2018 s/d 18-03-2019	Asuransi MAG	Toyota Avanza Nomor Polisi: B 1134 RZ	Rp 100.000.000

No.	Nomor Polis	Jangka Waktu	Penanggung	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan
16	36020117017102	02-04-2017 sd 02-04-2018	Asuransi MAG	Toyota Avanza Nomor Polisi: B 1297 SH	Rp 100.000.000
17	15022117000746	20-05-2017 s/d 20-05-2018	Asuransi MPM	BG 1433 ZV	Rp 140.000.000
18	36020117017146	09-04-2017 s/d 09-04-2018	Asuransi MAG	Toyota Avanza Nomor Polisi: B 8874 GD	Rp 90.000.000
19	1002210317000050	09-03-2017 s/d 09-03-2018	Asuransi MTI	Toyota Velfire Nomor Polisi: B 8388 DB	Rp 400.000.000
20	36020117017556	17-04-2017 s/d 17-04-2018	Asuransi MAG	Toyota Avanza Nomor Polisi: B 1615 SS	Rp 95.000.000
21	36020117032043	13-07-2017 s/d 13-07-2018	Asuransi MAG	Toyota Avanza Nomor Polisi: BK 1549 KK	Rp 110.000.000
22	36020117017009	18-04-2017 s/d 18-04-2018	Asuransi MAG	Toyota Avanza Nomor Polisi: L 1190 EY	Rp 90.000.000
23	36020117017179	20-04-2017 s/d 20-04-2018	Asuransi MAG	SUZUKI APV Nomor Polisi: BA 1867 RD	Rp 80.000.000
24	36020117020961	2-5-2017 s/d 2-5-2018	Asuransi MAG	Toyota Avanza Nomor Polisi: H 8547 GF	Rp 110.000.000
25	36020117035731	30-08-2017 s/d 30-08-2018	Asuransi MAG	Mazda CX5 Nomor Polisi: B 1958 SRN	Rp 335.000.000
26	1002210517000127	2-5-2017 s/d 02-5-2018	Asuransi MTI	Toyota Innova G Nomor Polisi: B 1905 SOE	Rp 160.000.000
27	1002210517000309	3-5-2017 s/d 3-5-2018	Asuransi MAG	Toyota Avanza G Nomor Polisi: BH 1180 CL	Rp 80.000.000
28	36020117020879	06-05-2017 s/d 06-05-2018	Asuransi MAG	Daihatsu Xenia Nomor Polisi: B 1443 FU	Rp 85.000.000
29	36020117020892	08-05-2017s/d 08-05-2018	Asuransi MAG	Toyota Avanza Nomor Polisi: B 1763 TF	Rp 100.000.000
30	36020117051002	21-11-2017 sd 21-11-2018	Asuransi MAG	Toyota Avanza Nomor Polisi: B 2166 ES	Rp 90.000.000
31	02.039.2018.00158	09-02-2018 s/d 09-02-2019	Asuransi SIMAS	Toyota Avanza Nomor Polisi: DN 434 YN	Rp 100.800.000
32	02.045.2018.00585	11-02-2018 s/d 11-02-2019	Asuransi SIMAS	Toyota Avanza Nomor Polisi: H 9140 AF	Rp 100.000.000
33	05020517000424	20-5-2017 s/d 20-5-2018	Asuransi MAG	HONDA SUPRA X Nomor Polisi: L 4813 FV	Rp 10.000.000
34	12020117000828	21-05-2017 s/d 21-05-2018	Asuransi MAG	Toyota Avanza, 1.3 G Nomor Polisi: KB 1202 HQ	Rp 130.000.000
35	36020117021461	05-05-2017 sd 05-05-2018	Asuransi MAG	Daihatsu Xenia Nomor Polisi: KT 1498 LA	Rp 90.000.000
36	36020117020868	22-05-2017 s/d 22-05-2018	Asuransi MAG	Toyota Avanza Nomor Polisi: DA 7757 TT	Rp 90.000.000
37	36020517001157	22 05 2017 s/d 22-05-2018	Asuransi MAG	Honda Supra X Nomor Polisi: B 3379 SJL	Rp 9.000.000
38	36020517001168	22-05-2017 s/d 22-05-2018	Asuransi MAG	Honda Supra X Nomor Polisi: B 3527 SJL	Rp 9.000.000
39	02.041.2017.00497	07-07-2017s/d 07-07-2018	Asuransi SIMAS	Toyota Avanza Nomor Polisi: BA 1398 AL	Rp 84.150.000
40	36020117029106	14-07-2017 s/d 14-07-2018	Asuransi MAG	Toyota Avanza Nomor Polisi: KB 1734 CE	Rp 100.000.000

No.	Nomor Polis	Jangka Waktu	Penanggung	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan
41	36020117030495	25-07-2017 s/d 25-07-2018	Asuransi MAG	Toyota Avanza Nomor Polisi: B 8178 RP	Rp 100.000.000
42	36020117035935	02-08-2017 s/d 02-08-2018	Asuransi MAG	Toyota Avanza Nomor Polisi: B 1575 XV	Rp 100.000.000
43	1002210817000575	08-08-2017 s/d 08-08-2018	Asuransi MTI	Toyota Avanza 1300 Nomor Polisi: B 2310 LB	Rp 90.000.000
44	36020117035753	14-08-2017 s/d 14-08-2018	Asuransi MAG	Honda CITY Nomor Polisi: B 2603 XV	Rp 135.000.000
45	1002210817000241	26-08-2017 s/d 26-08-2018	Asuransi MTI	Toyota Avanza Nomor Polisi: DD 1291 RL	Rp 130.000.000
46	36020517002125	28-08-2017 s/d 28-08-2018	Asuransi MAG	Honda Revo Nomor Polisi: B 6743 SVR	Rp 6.000.000
47	36020117039917	17-09-2017 s/d 17-09-2018	Asuransi MAG	Toyota Avanza Nomor Polisi: B 2414 AB	Rp 90.000.000
48	36020117040123	17-09-2017 s/d 17-09-2018	Asuransi MAG	Toyota Avanza Nomor Polisi: B 2678 AE	Rp 90.000.000
49	36020517002386	18-09-2017 s/d 18-09-2018	Asuransi MAG	Honda Supra Nomor Polisi: B 6204 SHP	Rp 3.500.000
50	36020117040112	18-09-2017 s/d 18-09-2018	Asuransi MAG	Toyota Avanza Nomor Polisi: D 1472 IL	Rp 80.000.000
51	36020117039941	22-09-2017 s/d 22-09-2018	Asuransi MAG	Toyota Avanza Nomor Polisi: B 8704 GP	Rp 85.000.000
52	36020117050411	16-11-2017 sd 16-11-2018	Asuransi MAG	Toyota Avanza Nomor Polisi: B 1257 SFS	Rp 90.000.000
53	1002211116000263	16-11-2017 s/d 16-11-2018	Asuransi MTI	Toyota Avanza Nomor Polisi: N 1871 BC	Rp 90.000.000
54	1002211117000326	31-10-2017 s/d 31-10-2018	Asuransi MTI	Toyota Avanza Nomor Polisi: BG 1306 FL	Rp 90.000.000
55	36020117050386	16-11-2017 s/d 16-11-2018	Asuransi MAG	Toyota Avanza Nomor Polisi: KB 1818 EA	Rp 115.000.000
56	36020117039952	26-09-2017 s/d 26-09-2018	Asuransi MAG	Daihatsu Xenia Nomor Polisi: B 2421 RV	Rp 80.000.000
57	36020517002375	30-09-2017 s/d 30-09-2018	Asuransi MAG	Honda Supra X Nomor Polisi: B 3814 SLA	Rp 8.000.000
58	36020117045312	11-10-2017 s/d 11-10-2018	Asuransi MAG	Toyota Avanza Nomor Polisi: DM 1186 AD	Rp 95.000.000
59	36020117045298	11-10-2017 s/d 11-10-2018	Asuransi MAG	Toyota Avanza Nomor Polisi: B 1764 GK	Rp 95.000.000
60	36020117020254	28-04-2017 s/d 28-04-2018	Asuransi MAG	Toyota Avanza Nomor Polisi: B 1632 BOH	Rp 120.000.000
61	36020116046399	10-11-2017 s/d 10-11-2018	Asuransi MAG	Toyota Avanza Nomor Polisi: B 1503 IQ	Rp 95.000.000
62	36020116046424	17-11-2017s/d 17-11-2018	Asuransi MAG	Toyota Avanza Nomor Polisi: DN 381 AE	Rp115.000.000
63	36020117029139	14-07-2017 s/d 14-07-2018	Asuransi MAG	Toyota Avanza Nomor Polisi : R 9288 MH	Rp 110.000.000
64	36020117045083	08-10-2017 s/d 08-10-2018	Asuransi MAG	Toyota Avanza Nomor Polisi: BN 1711 TL	Rp 110.000.000
65	36020117051024	10-11-2017 s/d 10-11-2018	Asuransi MAG	Toyota Avanza Nomor Polisi: B 1503 IQ	Rp 90.000.000

No.	Nomor Polis	Jangka Waktu	Penanggung	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan
66	36020117051013	17-11-2017s/d 17-11-2018	Asuransi MAG	Toyota Avanza Nomor Polisi: DN 381 AE	Rp115.000.000

Asuransi Aset Bangunan Ruko

No.	Nomor Polis	Jangka Waktu	Penanggung	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan
1	36010917001531	14-04-2017 s/d 14-04-2018	Asuransi MAG	BUILDING + property (RUKO) Perseroan Cabang Denpasar, JL. Gatot Subroto Timur No.105. Kel. Penatih, Kec. Denpasar Timur, Bali 80238	Rp 2.375.000.000
2	36010917001622	14-04-2017 s/d 14-04-2018	Asuransi MAG	BUILDING + property (RUKO) Perseroan Cabang Yogyakarta, Jl. HOS Cokroaminoto No. 96, Kel. Tegal Rejo, Kec. Tegal Rejo, Yogyakarta 55244	Rp 2.400.000.000
3	36010917001633	14-04-2017 s/d 14-04-2018	Asuransi MAG	BUILDING + property (RUKO) Perseroan Cabang Bandar Lampung, Jl. P. Antasari No. 106, Tanjung Baru, Sukarame, Bandar Lampung 35131	Rp 2.000.000.000
4	36010917000676	13-12-2017 s/d 13-12-2018	Asuransi MAG	BUILDING + property (RUKO) Perseroan Cabang Kudus, Ruko Sudirman Square kav. B. 14, Jl. Jend. Sudirman Kav. B14, Kudus 59312	Rp 1.800.000.000
5	36010917000654	13-12-2017 s/d 13-12-2018	Asuransi MAG	BUILDING + property (RUKO) Perseroan Kantor Perwakilan Bekasi, Komp. Perkantoran Grand Mall Blok A 21, Jl. Jend. Sudirman, Kel. Kranji, Kec. Bekasi Barat, Bekasi 17135	Rp 1.600.000.000
6	36010917001952	06-05-2017 s/d 06-05-2018	Asuransi MAG	BUILDING + property (RUKO) Perseroan Cabang Sidoarjo. Komp. Ruko Citra Indah, Blok RE No. 11, Jl. KH. Mukmin, Sidokare, Sidoarjo 61214	Rp 900.000.000
7	36010917001939	06-05-2017 s/d 06-05-2018	Asuransi MAG	BUILDING + property (RUKO) Perseroan Cabang Lubuklinggau, Jl. Yos Sudarso No. 109 A-B Rt. 05, Marga Rahayu, Lubuklinggau Selatan II, Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31621	Rp 1.900.000.000
8	36010917001894	06-05-2017 s/d 06-05-2018	Asuransi MAG	BUILDING + property (RUKO) Perseroan Vabang Tegal, Komp. Ruko Nirmala Estate No. 22, Jl. Yos Sudarso No. 20, Kel. Mintaragen, Kec. Tegal Timur, Tegal 52121	Rp 1.225.000.000
9	36010917001941	06-05-2017 s/d 06-05-2018	Asuransi MAG	BUILDING + property (RUKO) Perseroan Cabang Palembang, Jl. Angkatan 45 RL 42112, Lorok Pakjo, Ilir Barat I, Palembang, Sumatera Selatan 30137	Rp 1.850.000.000
10	36010917001917	06-05-2017 s/d 06-05-2018	Asuransi MAG	BUILDING + property (RUKO) Perseroan Cabang Semarang, Jl. Brigjen Katamsno No. 52 B. Majapahit, Kel. Karang Temepel, Kec. Semarang Timur, Semarang 50125	Rp 4.100.000.000
11	36010917002612	10-07-2017 s/d 10-07-2018	Asuransi MAG	BUILDING + property (RUKO) Perseroan Cabang Surabaya, Jl. Ngagel Jaya Selatan No. 39, Kel. Pucang Sewu, Kec. Gubong, Surabaya 60283	Rp 4.800.000.000

No.	Nomor Polis	Jangka Waktu	Penanggung	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan
12	36010911002064	31-05-2017 s/d 31-05-2018	Asuransi MAG	BUILDING + property (RUKO) Perseroan Cabang Manado, Komp. Bahu Mall Blok S No. 17, Kel. Bahu, Kec. Malalayang, Manado 95115	Rp 3.600.000.000
13	36010917002075	31-05-2017 s/d 31-05-2018	Asuransi MAG	BUILDING + property (RUKO) Perseroan Cabang Banjarmasin, Jl. A. Yani Km 4.5, Kel. Karang Mekar, Kec. Banjarmasin Timur, Kalimantan S elatat 70234	Rp 3.700.000.000
14	36010917002109	31-05-2017 s/d 31-05-2018	Asuransi MAG	BUILDING + property (RUKO) Perseroan Cabang Samarinda, Komp. Ruko Mitra Mas 8 No. 29, Jl. Achmad Yani I, Samarinda, Kalimantan Timur 75 119	Rp 1.000.000.000

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan yang dimiliki oleh Perseroan, telah cukup untuk kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungan.

Antara Perseroan dengan perusahaan-perusahaan asuransi yang disebutkan pada tabel di atas tidak terdapat hubungan afiliasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

14. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Perseroan tidak memiliki hak kekayaan intelektual.

15. KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN PADA PT. MALACCA TRUST WUWUNGAN INSURANCE Tbk.

Pada tahun 2015 Perseroan melakukan penjualan atas investasi saham pada PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk. Kepemilikan saham Perseroan pada PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk. per 30 September 2017 sebesar 19,90%.

PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk.

Riwayat Singkat

PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk. (dahulu bernama N.V Maskapai Asuransi Umum Wuwungan) didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 76 tanggal 15 Desember 1952, yang kemudian dirubah berdasarkan Akta No. 133 tertanggal 21 Januari 1953 keduanya dibuat dihadapan R.M Soerojo, S.H. Notaris di Jakarta. Akta mana telah mendapat Penetapan dari Menteri Kehakiman J.A.5/11/24. tertanggal 30 Januari 1953 serta telah didaftarkan dalam buku register Pengadilan Negeri Jakarta No. 343 tertanggal 24 Maret 1953 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 79 tanggal 2 Oktober 1953 Tambahan No. 627. Kemudian akta tersebut dirubah melalui Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 187 tanggal 26 Agustus 2011 dibuat dihadapan Humbergh Lie SH., Notaris di Jakarta Utara, Akta tersebut telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No.AHU-44615.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 12 September 2011 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kantor Pendaftaran Perusahaan No. AHU-0073449.AH.01.09.Tahun 2011. Tanggal 12 September 2011 Akta tersebut merubah pasal 1 mengenai perubahan nama perseroan.

Terakhir Akta tersebut dirubah melalui Akta Notaris No. 1 tanggal 12 November 2015 dibuat dihadapan Lady Ita Larosa Boru Simanihuruk, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, akta tersebut telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0980610 tanggal 17 November 2015 dengan Daftar Perseroan No. AHU-3580393.AH01.11.TAHUN 2015 tanggal 17 November 2015. Akta merubah pasal 4 tentang permodalan.

Pada tanggal 29 September 2017, PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk. memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat No. S-422/D.04/2017 untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sejumlah 310.000.000 saham baru dengan nilai nominal Rp 100 per saham dengan harga penawaran Rp 100 per saham. Seluruh saham ini telah tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11 Oktober 2017.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk. adalah bergerak dalam bidang asuransi umum.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk. dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut memberi jasa dalam penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

Permodalan

Susunan para pemegang saham PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk. berdasarkan pada Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Malacca Trust Wuwungan Insurance No. 130 tanggal 12 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi., Notaris di Jakarta Barat, akta tersebut telah memperoleh persetujuan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0013868.AH.01.02.TAHUN 2017, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0150347 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0150348, seluruhnya tertanggal 5 Juli 2017, serta dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0082657.AH.01.11. TAHUN 2017 tanggal 5 Juli 2017 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp 100,00		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	4.863.000.000	486.300.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Batavia Prima Investama	700.336.083	70.033.608.300	45,90
Perseroan	241.938.250	24.193.825.000	15,86
PT Ilthabi Rekatama	79.722.302	7.972.230.200	5,22
UOB Kay Hian Pte Ltd	135.000.000	13.500.000.000	8,85
Masyarakat	368.822.481	36.882.248.100	24,17
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.525.819.116	152.581.911.600	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.337.180.884	333.718.088.400	

Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT Malacca Trust Wuwungan Insurance No. 09 tanggal 27 Oktober 2016 yang dibuat di hadapan Youke Reinata, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, akta ini telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.03-0093657 tanggal 27 Oktober 2016 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dengan Daftar Perseroan No. AHU-0127776.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 27 Oktober 2016, susunan Komisaris dan Direksi PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk. adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Markus Dinarto Pranoto
Komisaris	:	Ilham Akbar Habibie
Komisaris Independen	:	Suwarna
Komisaris Independen	:	Rini Setiawati

Direksi:

Direktur Utama	:	Vientje Harijanto
Direktur	:	Iis Syarifuddin
Direktur	:	Harijanto
Direktur	:	Iwan Semiawan

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Dibawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk. berdasarkan laporan keuangan PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir

30 September 2016 (tidak diaudit); laporan keuangan PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk. untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 yang diaudit oleh Akuntan Publik Juninho Widjaja, CPA dari KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (*Member Crowe Horwath International*) dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian.

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 September	31 Desember	
	2017 (Tidak Diaudit)	2016 (Audit)	2015 (Audit)
Total Aset	259.600	266.557	172.293
Total Liabilitas	163.624	163.750	64.011
Total Ekuitas	95.976	102.807	108.283
Penghasilan	11.929	70.237	49.558
Laba (Rugi) Kotor	3.081	22.301	10.765
Laba (Rugi) Usaha	(6.796)	(8.332)	(17.0158)
Laba (Rugi) Bersih	3.219	(5.080)	(9.082)

16. KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN PADA PT MALACCA TRUST FINANCE

Pada tahun 2014 Perseroan melakukan investasi dengan menempatkan saham pada PT Malacca Trust Finance. Kepemilikan saham Perseroan pada PT. Malacca Trust Finance per 31 Januari 2018 sebesar 25,00%.

PT Malacca Trust Finance

Riwayat Singkat

PT. Malacca Trust Finance didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 5 tanggal 5 Februari 2014 dari Chandra Lim, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-07129.AH.01.01.Tahun 2014 tanggal 19 Februari 2014 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 13 Juni 2014, Tambahan No. 15352.

Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah di bidang pembiayaan dan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan melakukan kegiatan usaha diantaranya di bidang sewa pembiayaan, pembiayaan konsumen, anjak piutang, dan kartu kredit. Pada saat ini, Perseroan terutama bergerak dalam bidang sewa pembiayaan. Sampai dengan 30 September 2017, Perseroan tidak bergerak dalam bidang pembiayaan konsumen, anjak piutang, dan kartu kredit.

Permodalan

Susunan para pemegang saham PT Malacca Trust Finance berdasarkan pada Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Malacca Trust Finance No. 13 tertanggal 15 Juni 2016 yang di buat dihadapan Lady Ita Larosa Boru Simanihuru, S.H., M.kn., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp 1.000.000,00		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Batavia Prosperindo Makmur	43.000	43.000.000.000,00	43,00
PT Oscarmas	32.000	32.000.000.000,00	32,00
Perseroan	25.000	25.000.000.000,00	25,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100.000	100.000.000.000,00	100,00

Manajemen dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 30 September 2017 berdasarkan Akta Notaris No. 2 tanggal 9 September 2017 dari Yoke Reinata, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Indah Mulyawan
 Komisaris : Ariyono Oscar

Direksi

Direktur Utama : Mugi Setiawan
 Direktur : Rudolf Rudijanto Leman
 Direktur : Yufra Zaldi

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Data keuangan pokok di bawah ini diikhtisarkan dari Laporan Keuangan PT Malacca Trust Finance untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2017 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (*Member Crowe Horwath International*) dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian.

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 September	31 Desember	
	2017 (Tidak Diaudit)	2016 (Audit)	2015 (Audit)
Total Aset	206.093	200.003	149.033
Total Liabilitas	78.503	80.855	39.732
Total Ekuitas	127.590	119.148	109.302
Total Penghasilan	25.867	29.960	17.924
Laba (Rugi) Bersih	8.432	9.550	7.563

B. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. UMUM

Sebagaimana termaktub dalam pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan Perseroan adalah di bidang pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, kegiatan usaha pembiayaan lain atas persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan melakukan sewa operasi. Perseroan memiliki izin usaha meliputi bidang multiguna, infrastruktur, investasi dan pembiayaan berbasis *fee*.

Saat ini Perseroan mengkonsentrasikan kegiatannya kepada pembiayaan konsumen, yaitu pembiayaan kendaraan bermotor, khususnya kendaraan roda empat baru dan bekas, baik berupa kendaraan *passenger* maupun kendaraan komersil.

2. JARINGAN KANTOR OPERASIONAL

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, jumlah Kantor Operasional Perseroan adalah sebanyak 1 (satu) kantor pusat, 2 (dua) kantor perwakilan dan 68 (enam puluh delapan) kantor cabang yang tersebar di pulau Jawa, Sumatera, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Kantor-kantor operasional yang dimiliki oleh Perseroan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Kantor Pusat

No.	Alamat Kantor Pusat	Lokasi	Status	Periode Sewa	Keterangan Alas Hukum
1.	Gd. Chase Plaza Lt.15, Jl. Jend Sudirman Kav.21 Jakarta 12920	Jakarta	Sewa	8-12-2015 s/d 7-12-2018	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 88 tertanggal 01/12/2015 dibuat dihadapan Sindian Osaputra, S.H., M.kn, Notaris di Jakarta

Kantor Perwakilan

No.	Alamat Kantor Perwakilan	Lokasi	Status	Periode Sewa	Keterangan Alas Hukum
1.	Ruko Financial Blok BA 2 No.22 Jl.Raya Boulevard Gading Serpong, Tangerang	Tangerang	Sewa	01-03-2017 s/d 01-03-2018	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 7 tanggal 11 Maret 2009 dibuat di hadapan Unik Setyawati, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang sebagaimana yang telah di addendum melalui Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 29, tanggal 20 Februari 2012, dibuat di hadapan Unik Setyawati, S.H. Notaris di Kabupaten Tangerang
2.	Ruko Grand Mall Blok D/35, Kranji, Bekasi, JL. Raya Sudirman, Kramji Bekasi 1700	Bekasi	Milik		Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 273 tanggal 22 September 1997

Kantor Cabang

No.	Alamat Kantor Cabang	Lokasi	Status	Periode Sewa	Keterangan Alas Hukum
1.	Jl. Peta-Lingkar Selatan, Ruko Kopo Plaza Kav. C No. 8 Bandung 40232	Bandung	Sewa	19-05-2016 s/d 19-05-2018	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 18, tanggal 8 Agustus 2012, dibuat di hadapan Endang Usman, S.H., Notaris di kabupaten Bandung sebagaimana diubah dengan (i) Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No. 657 tanggal 19 Mei 2014 dibuat dihadapan Dr. Teddy Chandra, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bandung dan diubah dengan Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No. 13 tanggal 28 April 2016 dibuat di hadapan Hj Merry Nurmaryah, S.H., Notaris di Bandung.
2.	Jl. Ngagel Jaya Selatan No. 39, Kel. Puncang Sewu, Kec. Gudeng, Surabaya - 60271	Surabaya	Milik		Akta Jual Beli Bangunan Disertai Pemindahan Hak No. 3 tanggal 1 Juli 2014, dibuat dihadapan Swartana Tedja, SH., Notaris & PPAT di Surabaya
3.	Jl. Angkatan 45 No.2 , Kel. Lorok Pakjo, Kec.ilir Barat I, Palembang - 30137	Palembang	Milik		Sertifikat HGB No.820, tanggal 23 April 2009
4.	Jl. Gatot Subroto Timur No. 105 Penatih, Denpasar-Bali 80239	Denpasar	Milik		Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 363 tanggal 22 Juli 1999

No.	Alamat Kantor Cabang	Lokasi	Status	Periode Sewa	Keterangan Alas Hukum
5.	Jl. Sultan Agung No. 08, RT/ RW: 007 / 003, Kel. Murni, Kec.Telanaipura, Jambi - 36121	Jambi	Sewa	1-8-2013 s/d 1-8-2018	Akta Perjanjian Sewa Menyewa no. 102 tanggal 15 Juli 2013, dibuat dihadapan M. Zen, S.H.
6.	Jl. Ring Road kompleks Ruko OCBC Bo. 76 Lingkungan II, Kel. Asam Kumbang, Kec. Medan Selayang Kota Medan - Sumatera Utara	Medan	Sewa	1-12-2014 s/d 1-12-2018	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 66 tanggal 2 Desember 2014, dibuat dihadapan Sugati. S.H.
7.	Jl. Riau No 188 A, Tampan, Payung Sekaki Pekanbaru	Pekanbaru	Sewa	15-12-2015 s/d 15-12-2020	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 11 tanggal 15 Desember 2015, dibuat dihadapan Pritta Melanie, SH.
8.	JL. Letjend S. Parman 102A Purwantoro, Blimbing, Malang - Jawa Timur 65122	Malang	Sewa	21-6-2017 s/d 21-6-2020	Akta No. 13 tanggal 25 April 2017 tentang Perjanjian Sewa dibuat di hadapan Syafril Hidayat, SH., Notaris di Malang.
9.	Jl. Achmad Yani Km 5, Banjarmasin, Kalimantan Selatan- 70233	Banjarmasin	Milik		Sertifikat Hak Milik No. 1543/Kelurahan Karang Mekar tanggal 31 Juli 2003 di Kelurahan Karang Mekar, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dengan Surat Ukur No. 37/KRMR/2003 seluas 140 m ² (seratus empat puluh meter persegi) atas nama Sjaifur Rachman. Berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No 50 Tanggal 18 Mei 2016 dibuat di hadapan Hj Rahmaniah, Notaris di Banjarmasin, dimana harga pembelian telah dilunasi oleh Perseroan
10.	Jl. Ahmad Yani 1. Komplek Ruko Mitra Mas 8 No 31	Samarinda	Milik		Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 713 tanggal 7 Mei 2004
11.	Jl. Pangeran Antasari No. 106, Kel. Kedamaian, Kec. Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung - 90141	Lampung	Milik		Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 726 tanggal 20 September 2001

No.	Alamat Kantor Cabang	Lokasi	Status	Periode Sewa	Keterangan Alas Hukum
12.	Jl. Pelita raya Blok A 22 No.1 C Kel. Balla Parang, Kec. RappociniMakassar - 90141	Makassar	Milik		SHGB No. 20120/ Balla Parang tanggal 24 Desember 2014 dengan Surat Ukur No. 01348/2012 seluas 133 m2 (seratus tiga puluh tiga meter persegi) atas nama Hj. Ady Rachmat, SE. Berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No 603 Tanggal 4 September 2017 dibuat di hadapan Yenni Saleh, SH., M.kn., Notaris di Makassar, dimana harga pembelian telah dilunasi oleh Perseroan
13.	KompleksBahu Mall, Jl. Wolter Mongonsidi, Blok S No. 3, Kel.Bahu, Kec.Malalayang, Kota Manado	Manado	Milik		Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 55 tanggal 30 April 2015
14.	Komplek Ruko Balikpapan Baru Blok. AB 7 No. 35	Balikpapan	Sewa	5-4-2017 s/d 4-4-2020	Perjanjian Sewa Menyewa pada tanggal 13 Maret 2017 untuk kantor cabang Balikpapan.
15.	Komplek Ruko Pontianak Mall Blok. AA. No. 6, A I Gusti Sulung Lelanang, Pontianak, KalimantanBarat - 78117	Pontianak	Sewa	7-8-2017 s/d 7-8-2020	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 85 tanggal 7 Juni 2011, dibuat di hadapan Budi Prasetyono, S.H., Notaris di Pontianak.
16.	Jl. Yos Sudarso RT. 05, Margarahayu, Lubuk Linggau Selatan II, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan	Lubuk Linggau	Milik		SHGB No. 13 tanggal 15 Agustus 2009.
17.	Jl. Depati Amir (Jl. Mentok) Rt / RW: 001 / 001, Kel. Gajah Mada Kec. Rangkui, Pangkal Pinang- Bangka Blitung 33171	Pangkal Pinang	Sewa	1-10-2012 s/d 1-10-2018	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 56 tanggal 12 Oktober 2012, dibuat di hadapan Wahyu Dwicahyono, S.H., M.Kn.
18.	Jl. Tengku Imum Luengbata No. 90, Banda Aceh	Banda Aceh	Sewa	1-12-2015 s/d 1-12-2020	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 4 tanggal 8 Oktober 2012, dibuat di hadapan Salimah, S.H., M.Kn. Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 30 tanggal 23 November 2015 dibuat dihadapan Salimah, S.H, M.Kn.
19.	Jl. Brigjen Katamso No. 52 B Majapahit , Semarang (Samping Dealer Kawasaki) Jl. Majapahit Kel. Karang Tempel, Kec. Semarang Timur	Semarang	Milik		SHGB No. 01096 tanggal 26 Desember 2012.

No.	Alamat Kantor Cabang	Lokasi	Status	Periode Sewa	Keterangan Alas Hukum
20.	Jl. Abunawas No. 38A, RT / RW : 004 / 002, Kel. Bende, Kec. Baruga, Kendari Sulawesi Tenggara	Kendari	Sewa	1-7-2015 s/d 1-7-2020	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 122 tanggal 27 Mei 2010, dibuat di hadapan Asbar Imran, S.H., Notaris di Kendari sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Sewa Menyewa No. 01 tanggal 1 Juli 2014 dibuat dihadapan Asbar Imran, SH., Notaris di Kendari. Akta perjanjian Sewa Menyewa tanggal 01 Juli 2015 dihadapan Notaris Frederik Taka Waron, SH., Notaris di Makassar.
21.	Jl. HOS Cokroaminoto, RT/ RW:042 / 012, Ruko 1 No. 96, Kel. Tegalrejo Kec. Tegalrejo, Yogyakarta	Yogyakarta	Milik		SHGB No. 00329 tanggal 9 Mei 2014.
22.	Jl. HB Yasin (ex. Agus Salim) No. 218	Gorontalo	Sewa	27-10-2016s/d 26-10-2019	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 1 tanggal 1 November 2016, dibuat di hadapan Femy Nento, SH., M.Kn.
23.	Jl. A. Yani Rt, 02 Dusun VII Karang Sari Desa Tanjung Baru Baturaja Timur Ogan Komering Ulu (32113)	Baturaja	Milik		SHGB No. 00068/ Tanjung Baru tanggal 29 Oktober 2015 di Ogan Komering Ulu dengan Surat Ukur No. 1307/Tanjung Baru/2015 seluas 134 m ² (seratus tiga puluh empat meter persegi) atas nama Hendra Halim. Berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No 14 Tanggal 5 Februari 2016 dibuat di hadapan Hj Iqbal Amputra, SHM., M.Kn., Notaris di Sumatera Selatan, dimana harga pembelian telah dilunasi oleh Perseroan.
24.	Jl. P Natadirja KM. 7, No. 42B, RT / RW: 004 / 001, Kel. Jalan Gedang, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu	Bengkulu	Sewa	1-12-2015 s/d 1-12-2020	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 21 tanggal 20 Oktober 2015, dibuat di hadapan Irawan, S.H., Notaris di Bengkulu
25.	Jl. Basuki Rahmat No. 44 B, Kel. Tatura Selatan, Kec. Palu Selatan	Palu	Sewa	25-4-2016 s/d 25-4-2019	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 4 tanggal 5 April 2011, dibuat di hadapan Hasnah, S.H., Notaris di Palu.

No.	Alamat Kantor Cabang	Lokasi	Status	Periode Sewa	Keterangan Alas Hukum
26.	Jl. Darusalam No. 2, Kec. Banda Sakti	Lhoksumawe	Sewa	16-5-2016 s/d 16-5-2018	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 13 tanggal 16 Juni 2016 dibuat dihadapan Nila Rufaida S.H.
27.	Jl. Ir. Soekarno Ruko Saraswati No.4 Solo Baru, Jawa Tengah - 57552	Solo	Sewa	1-8-2016 s/d 31-7-2019	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 13 tanggal 24 Juni 2016 dibuat dihadapan Asih Sari Dewanti S.H.
28.	Jl. Kawedanan No. 1 (Belakang Bank Bukopin/ Sebelah AIA Finance) Purwokerto	Purwokerto	Sewa	20-11-2016 s/d 20-11-2019	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 20 tanggal 17 Juni 2016 dibuat dihadapan Dewi Rubijanto S.H.
29.	Jl. Raya Tajur No. 79A, Muara Sari - Bogor Selatan, Bogor	Bogor	Sewa	13-10-2017 s/d 12-10-2020	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 56 tanggal 27 November 2015, dibuat di hadapan Thomas Rudy Hartawan Widjojo, S.H., Notaris di Bogor.
30.	JL. Andalas No 2D (Pasar Simpang Haru), Padang	Padang	Sewa	21-1-2015 s/d 20-1-2018	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 137 tanggal 27 Desember 2011, dibuat di hadapan Hajjah Eli Satria, S.H. Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 44 tanggal 16 Januari 2015 dibuat dihadapan Hajjah Eli Satria S.H.
31.	JL. Sangnawaluh Komp. Megaland Blok B No. 15, Kel. Siopat Suhu, Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar	Pematang Siantar	Sewa	5-2-2015 s/d 5-2-2020	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 30 tanggal 5 Februari 2015 dibuat dihadapan Asido Sihombing S.H.
32.	Jl. G.Obos No. 79B Rt, 04/02 Kel, Menteng Kec, Jekan Raya Palangkaraya Kalimantan Tengah 73112	Palangkaraya	Sewa	6-2-2017 s/d 6-2-2022	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 01 tanggal 1 Februari 2017 dibuat dihadapan Jessica, S.H., M.Kn., Notaris di Palangkaraya
33.	Ruko Citra Indah Blok RE-11 Jl. KH Mukmim - Sidoarjo	Sidoarjo	Milik		SHGB No. 3111 tanggal 25 Agustus 2011

No.	Alamat Kantor Cabang	Lokasi	Status	Periode Sewa	Keterangan Alas Hukum
34.	Jl. Sriwijaya No.136A Lingkungan Karang Tapen Cilinaya Cakranegara Mataram	Lombok	Milik		SHGB No. 8/Cilinaya tanggal 21 Maret 2017 dengan Surat Ukur No. 445/Cilinaya/2015 seluas 141 m ² (seratus empat puluh satu meter persegi) atas nama Andy Shindunata. Berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No 10 Tanggal 2 Februari 2017 dibuat di hadapan Heni Hapsari, SH., Notaris di Mataram, dimana harga pembelian telah dilunasi oleh Perseroan.
35.	Jl. Margonda Raya Ruko ITC No.12B Kota Depok Jawa Barat	Depok	Sewa	1-10-2015 s/d 30-9-2018	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 2 tanggal 8 Maret 2012, dibuat di hadapan Dr. Fransiscus Xaverius Arsin, S.H. Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 62 tanggal 9 Maret 2015, dibuat di hadapan H Kusnandar, S.H., Notaris di Jakarta
36.	Jl. Bau Massepe No. 23, Kel. Cappa Galung, Kec. Bacukiki Barat Sapare Sulawesi Selatan - 91122	Pare-pare	Sewa	1-10-2015 s/d 30-9-2018	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 207 tanggal 23 Mei 2012, dibuat di hadapan Lany, S.H. Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 23 September 2015, untuk cabang Perseroan di Pare-pare.
37.	Jl. Jenderal Sudirman Komplek Ruko Sudirman Square B14, Desa Nganguk, Kec. Kota, Kab. Kudus - 59311	Kudus	Milik		Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 114 tanggal 30 Juli 2012
38.	Jl. Laksda Yos Sudarso Komp. Nirmala Estate No. 22, Tegal - Jawa Tengah	Tegal	Milik		Sertifikat Hak Guna Bangunan No, 1423 tanggal 26 Juni 2013.
39.	Jl. Lintas MelawiNo. 214, RT / RW: 007 / 002, Kel. Ladang, Kab. Sintang Kalimantan Barat	Sintang	Sewa	20-4-2016s/d 20-4-2019	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 20 tanggal 24 Maret 2016 dibuat di hadapan Dodon Almury Baron Jatan, S.H., M.Kn.
40.	Jl. D.I Panjaitan No. 41C, RT / RW: 026 / 005, Sampit - Kalimantan Tengah	Sampit	Sewa	1-7-2016 s/d 1-7-2019	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 79 tanggal 1 Juli 2016 dibuat dihadapan Fransiska Kartini Rizal, S.H., M.kn.

No.	Alamat Kantor Cabang	Lokasi	Status	Periode Sewa	Keterangan Alas Hukum
41.	Jl. Mayjend Ryacudu Pojokan Gg. Melati, RT / RW: 040 / 007, Kel. Metro Pusat, Kodya Metro Provinsi Lampung	Metro	Sewa	15-5-2017 s/d 15-5-2020	Akta Sewa Menyewa No. 62 tanggal 27 April 2017 dibuat di hadapan Yeremia Edwin Laksamana, S.H., M.Kn.
42.	Jl. Diponegoro No. 39, RT / RW: 045 / 019, Kel. Pasiran Kec. Singkawang Barat	Singkawang	Sewa	15-6-2014 s/d 15-6-2020	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 33 tanggal 18 April 2017, untuk kantor cabang Perseroan, dibuat di hadapan Iskandar, S.H., Notaris di Kota Singkawang.
43.	Jl. Jenderal Sudirman No. 03 C, RT/ RW: 016 / 003, Kel. Tanjung Pandan Kota, Kec. Tanjung Pandan Belitung	Belitung	Sewa	1-Agus-2016 s/d 31-Juli-2019	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 10 tanggal 12 September 2017, untuk kantor cabang Perseroan, dibuat di hadapan Mersi Yasmin, S.H., Notaris di Kabupaten Belitung.
44.	Jl. A.Yani KM 2, RT / RW: 018A / 006 (Samping Auto 2000), Kel. Baru, Kec. Arut Selatan, Kota Waringin Barat - Kalimantan Tengah	Pangkalan Bun	Sewa	25-6-2017 s/d 25-6-2020	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No 3 tanggal 7 Juni 2017, dibuat di hadapan Noviani Ardjan, S.H., Notaris di Kabupaten Kotawaringin Barat.
45.	Jl. A. Yani No 8 Kel Payabujuk Seuleumak Kec Langsa Baru Kota Langsa Aceh	Langsa	Sewa	1-3-2015 s/d 1-3-2018	Akta Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 9 Januari 2015, dibuat di hadapan Riza Octariana, S.H., Notaris di Kota Langsa.
46.	Jl. SM Raja No 121D Simpang Mangga Atas Rantau Prapat Kel. Bakaran Batu Kec Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu	Rantau Prapat	Sewa	15-4-2015 s/d 15-4-2020	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No 25 tanggal 28 Januari 2015, dibuat di hadapan Pramita Salazar, S.H., Notaris di Kabupaten Labuhanbatu.
47.	Jl. A. Yani (Batu Meja) No 39 RT 001/ RW 006, Kel. Batu Meja, Kel. Sirau – Ambon	Ambon	Sewa	1-12-2015 s/d 1-12-2018	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 1 tanggal 8 Oktober 2015, dibuat di hadapan Lady Ita Larosa Boru Simanihuruk, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang.
48.	Jl. Basuki Rahmat KM 9,5 RT 02/ RW 02, Kel. Sawah Gumo, Gestik, Sorong-Papua Barat (Sebelah Kantor BLK)	Sorong	Sewa	1-12-2015 s/d 31-11-2018	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 240 tanggal 12 November 2015, dibuat di hadapan Abdul Rouf, S.H., Notaris di Kota Sorong.
49.	Jl. Raya Kelapa Dua, Kec. Entrop, Kec. Jayapura Utara, kota Jayapura-Papua	Jayapura	Sewa	1-12-2015 s/d 1-12-2018	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No 15 tanggal 20 November 2015, dibuat di hadapan Helien Somalay, S.H., Notaris di Kabupaten Kota Jayapura.

No.	Alamat Kantor Cabang	Lokasi	Status	Periode Sewa	Keterangan Alas Hukum
50.	Jl. Andi Djemma No 67 (Komp. Ruko Depan SDN 30 Mattirowalie) RT 04 RW 05, Kel. Tompotikka Wara, Kodamadya Palopo	Palopo	Sewa	1-1-2016 s/d 1-1-2021	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 27 tanggal 25 November 2015, dibuat di hadapan Rahmawati Abdullah, S.H., Notaris di Palopo.
51.	Jl Kopo No 246B RT 001 Rw 002 Kel Sukaasih	Bandung	Sewa	1-3-2016 s/d 1-3-2018	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 1 tanggal 1 Maret 2016, dibuat di hadapan Susyana Herlawati, SH., M.Kn.
52.	Jl Ahmad Yani KM 8 Kel Manarap Lama	Banjarmasin	Sewa	29-1-2015 s/d 29-1-2018	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 66 tanggal 29 Januari 2015, dibuat di hadapan Sri Siswani, SH., M.Kn.
53.	Ruko Grand Boulevard Blok AT 16 No 9 Harapan Indah	Bekasi	Sewa	20-12-2015 s/d 19-12-2018	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 30 tanggal 30 November 2015, dibuat di hadapan Hj, Tuti Alwiyah, SH.
54.	Jl. Sudirman No. 132 Komplek Pertokoan Malahayati Duri Riau	Duri	Sewa	29-11-2016 s/d 20-11-2018	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 1 tanggal 10 November 2016, dibuat di hadapan Hj, Tuti Alwiyah, SH.
55.	Ruko IBC Blok A No 30, Jl Guntur, Garut, Jawa Barat	Garut	Sewa	11-3-2016 s/d 18-3-18	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 1 tanggal 1 Maret 2016, dibuat di hadapan Nenden Anne Handriyani, SH.
56.	Ruko PGC Blok B No 60 Jl Raya Bekasi KM 21	Jakarta	Sewa	20-5-2015 s/d 20-5-2018	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 1 tanggal 6 Mei 2015, dibuat di hadapan Hariyanti Poerbiantari, SH.,M.Kn.
57.	Ruko Broadway III No.25 Perum Galuh Mas Desa Sukaharja Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang	Karawang	Sewa	5-Okt-17 s/d 15-Okt-20	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 01 tanggal 28 Agustus 2017, dibuat di hadapan Vita Tris Murniyanti, SH., M.Kn
58.	Jl. S. Parman No. 239 C Kel, Purwokerto Kulon Kec, Purwokerto Selatan Purwokerto Jawa Tengah (53141)	Purwokerto	Sewa	15-5-2015 s/d 15-5-2018	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 12 tanggal 6 Mei 2015, dibuat di hadapan Emelia Widyanti Iskandar, SH.
59.	Jl. Jenderal Sudirman No. 88 C Air Molek II Kec, Pasir Penyu Rt, 001/01 Air Molek Indragiri Hulu Riau (29354)	Rengat	Sewa	1-3-2016 s/d 1-3-2019	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 13 tanggal 29 Februari 2016, dibuat di hadapan Antoni Yoseph, SH., M.Kn.
60.	Jl. A. Yani Komplek Ruko Cendrawasih Blok B-3 Kel, Temindung Permai Kec, Samarinda Utara Samarinda Kaltim (75117)	Samarinda	Sewa	12-5-2016 s/d 12-5-2018	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 38 tanggal 10 Mei 2016, dibuat di hadapan Eva Purnawati, SH.,M.Kn.

No.	Alamat Kantor Cabang	Lokasi	Status	Periode Sewa	Keterangan Alas Hukum
61.	Ruko Jl Ir H Juanda No 83 By Pass	Tasikmalaya	Sewa	10-1-2017 s/d 10-1-2020	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 149 tanggal 12 Januari 2017, dibuat di hadapan Nia Trenawati, SH.
62.	Jl. Demang Lebar Daun No. 05 Rt, 43 Rw, 11 Kel, Demang Lebar Daun Kec, Ilir Barat I Palembang (30131)	Palembang	Sewa	1-11-2016 s/d 31-10-2021	Perjanjian Pinjam Pakai Ruangan, PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk. dengan PT Batavia Prosperindo Finance Tbk.
63.	Jl. Pasar Satu Ring Road No. 26 Kel, Tanjung Sari Kec, Medan Selayang	Medan	Sewa	1-12-2012 s/d 1-12-2018	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 66 tanggal 2 Desember 2014, dibuat di hadapan Eben Heiser, SH.
64.	Ruko Workshop Blok Nike Ardila No. 02 Jl. Imbanagara Dusun Imbanagara Kel, Imbanagara Kec, Imbanagara Ciamis Jawa Barat	Ciamis	Sewa	1-8-2017 s/d 1-8-2020	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 52 tanggal 21 Juni 2017, dibuat di hadapan Tri Helita Rahayu, SH.
65.	Jl. Arifin Ahmad No. 20 Rt, 003 Rw, 011 Kel, Sidomulyo Timur Kec, Marpoyan Damai Pekanbaru Riau	Pekanbaru	Sewa	2-Apr-17 s/d 1-Apr-20	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 03 tanggal 2 Maret 2017, dibuat di hadapan Rina Hamzah, SH. MH., M.Kn., Notaris di Pekanbaru
66.	Komplek Tuparev Super Blok Jl. Tuparev Blok B No. 3 Cirebon Jawa Barat	Cirebon	Sewa	1-6-2017 s/d 30-6-2020	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 192 tanggal 21 Juli 2017, dibuat di hadapan Arie Prawira Sholeh, SH., M.Kn.
67.	Jl. S. Parman Blok A No. 43-45 Rt, 01/05 Kel, Parakancanggih Kec, Banjarnegara Kab, Banjarnegara Jawa Tengah	Banjarnegara	Sewa	7-6-17 s/d 6-6-2020	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 387 tanggal 29 September 2017, dibuat di hadapan Galuh Pitaloka, SH.
68.	Jl. Jenderal Sudirman Desa Ujungbatu Timur Kec, Ujungbatu (samping RS Doa Bunda) Riau	Ujung Batu	Sewa	21-6-2017 s/d 21-6-2022	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 141 tanggal 21 Juni 2017, dibuat di hadapan Yamolala Harefa, SH.

3. KEGIATAN USAHA

Tabel berikut ini menunjukkan perkembangan penjualan mobil yang dibiayai oleh Perseroan berdasarkan nilai kendaraan:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Jenis Kendaraan	30 September	31 Desember 2016		31 Desember 2015	
	2017	Pertumbuhan (%)	Rp.	Pertumbuhan (%)	Rp.
Mobil Baru	27.912	47,70	45.506	7,6	30.881
Mobil Bekas	708.712	(2,0)	547.828	(13,4)	559.143
Jumlah Pembiayaan	736.624	(0,6)	593.334	0,6	590.024

Tabel berikut ini menunjukkan perkembangan penjualan mobil yang dibiayai oleh Perseroan berdasarkan jumlah unit:

(dalam unit, kecuali dinyatakan lain)

Jenis Kendaraan	30 September	31 Desember 2016		31 Desember 2015	
	2017	Pertumbuhan (%)	Unit	Pertumbuhan (%)	Unit
Mobil Baru	215	19,6	286	147,3	230
Mobil Bekas	8.455	(10,1)	7.383	0,6	8.217
Jumlah Pembiayaan	8.670	(9,2)	7.669	2,2	8.447

Tabel berikut ini adalah perincian Piutang Pembiayaan Konsumen - Kotor berdasarkan jatuh temponya (*maturity profile*):

(dalam jutaan Rupiah)

Tahun Jatuh Tempo	30 September	31 Desember	
	2017	2016	2015
2015	-	-	9.637
2016	-	21.141	381.675
2017	181.314	369.339	234.663
2018 dan selanjutnya	1.166.851	364.862	110.192
Total	1.348.165	755.342	736.167

Tabel berikut ini adalah perincian penghasilan Perseroan berdasarkan jenis Penyaluran Kredit:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Penghasilan dari Penyaluran Kredit Berdasarkan Jenis	30 September	31 Desember 2016		31 Desember 2015	
	2017	Pertumbuhan (%)	Rp	Pertumbuhan (%)	Rp
Sewa Pembiayaan	3.980	(27,41%)	5.483	(70,24%)	18.424
Pembiayaan Konsumen	138.331	4,44%	132.444	5,75%	140.518
Anjak Piutang	19.860	22,59%	25.657	54,99%	16.554
Tidak Dapat Dialokasikan	86.502	(8,77%)	94.816	27,37%	74.443
Jumlah Pembiayaan	248.673	(9,15%)	258.400	17,87%	249.939

Tabel berikut ini adalah tingkat kolektibilitas yang mencerminkan kualitas Piutang Pembiayaan Konsumen – Kotor yang dikelola oleh Perseroan:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2017	2016	2015
Belum jatuh tempo	1.310.931	734.201	726.530
Telah jatuh tempo			
1 - 30 hari	8.790	3.983	3.371
31 - 60 hari	4.864	3.250	2.195
61 - 90 hari	2.454	1.620	1.806
>90 hari	21.126	12.288	2.265
Jumlah	1.348.165	755.342	736.167

(dalam persentase)

Jatuh Tempo	30 September	31 Desember	
	2017	2016	2015
Belum jatuh tempo	97,23	97,20	98,69
Telah jatuh tempo			
0-30 hari	0,65	0,53	0,46
31-60 hari	0,36	0,43	0,30
61-90 hari	0,18	0,21	0,25
> 90 hari	1,58	1,63	0,31
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Tabel berikut ini menunjukkan perkembangan sewa pembiayaan peralatan yang dilakukan oleh Perseroan berdasarkan nilai kendaraan:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Jenis Kendaraan	30 September	31 Desember 2016		31 Desember 2015	
	2017	Pertumbuhan (%)	Unit	Pertumbuhan (%)	Unit
Peralatan Baru	-	(65,5)	2.122	(86,4)	6.157
Peralatan Bekas	11.056	(709,2)	2.040	(85,5)	16.508
Jumlah Sewa Guna Usaha	11.056	(81,6)	4.162	(85,8)	22.665

Tabel berikut ini menunjukkan perkembangan sewa pembiayaan peralatan yang dilakukan oleh Perseroan berdasarkan jumlah unit:

(dalam unit, kecuali dinyatakan lain)

Jenis Kendaraan	30 September	31 Desember 2016		31 Desember 2015	
	2017	Pertumbuhan (%)	Unit	Pertumbuhan (%)	Unit
Peralatan Baru	-	(4,0)	6	(85,2)	10
Peralatan Bekas	5	(84,6)	6	(78,2)	39
Jumlah Sewa Guna Usaha	5	(75,5)	12	(80,2)	49

Tabel berikut ini adalah perincian Piutang Sewa Pembiayaan-Kotor (*leasing*) Perseroan berdasarkan jatuh temponya (*maturity profile*):

(dalam jutaan Rupiah)

Tahun Jatuh Tempo	30 September	31 Desember	
	2017	2016	2015
2015	-	-	3.369
2016	-	1.877	75.801
2017	8.203	31.985	44.050
2018 dan selanjutnya	27.870	16.953	17.799
Total	36.073	50.815	141.019

3.1. Pendanaan (*Funding*)

Perseroan memiliki beberapa sumber pendanaan guna membiayai kegiatan usahanya. Disamping sumber pendanaan internal yang berasal dari Modal Disetor dan Saldo Laba, Perseroan juga memperoleh sumber pendanaan sumber Penghasilan eksternal yaitu berupa pinjaman bank, *channelling* dan *joint financing*. Pinjaman bank diperoleh dari beberapa bank nasional dengan jaminan berupa piutang pembiayaan.

Fasilitas penerusan pinjaman untuk pembiayaan atau *channeling* diperoleh Perseroan dari beberapa bank nasional swasta dan bank pemerintah, di mana Perseroan ditunjuk sebagai agen yang berfungsi meneruskan pinjaman yang telah diperoleh dari bank kepada nasabah.

Sementara fasilitas *joint financing* merupakan bentuk pembiayaan bersama antara Perseroan dengan pihak bank di mana Perseroan akan menyiapkan dana sampai dengan 10% dari fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah sedangkan sisanya disiapkan oleh bank. Berdasarkan perjanjian *joint financing*, seluruh aktivitas mulai dari seleksi konsumen, pemeliharaan piutang sampai dengan penagihan (*collection*) piutang dilakukan oleh Perseroan, sedangkan pihak bank akan menerima pembayaran sesuai dengan tanggal jatuh tempo dari masing-masing fasilitas pembiayaan yang telah dicairkan. Begitu pula dengan administrasi jaminan kredit yang berupa Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), dikelola sepenuhnya oleh Perseroan di mana pihak bank memberikan kuasa khusus kepada Perseroan untuk menyimpan dan mengadministrasikan jaminan pembiayaan tersebut.

Bentuk kerjasama tersebut dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Bagi Perseroan, dengan adanya kerjasama ini memberikan kepastian tersedianya dana membiayai kegiatan usaha. Perseroan juga mendapatkan keuntungan dari selisih tingkat suku bunga yang diberikan oleh bank dengan tingkat suku bunga yang diberikan kepada nasabah. Sementara bagi bank yang memberikan fasilitas pembiayaan akan memperoleh berbagai keuntungan antara lain bank dapat meningkatkan penyaluran dana tanpa perlu mengurus hal-hal administratif, memperluas jangkauan nasabah, diversifikasi risiko dan memperoleh Penghasilan bunga.

Bank-bank yang telah menjalin kerjasama dengan Perseroan sampai dengan saat ini antara lain adalah PT Bank Victoria International Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank ICBC Indonesia, PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT Bank Central Asia Tbk dan PT Bank Permata Tbk.

Tabel berikut ini adalah perincian Penghimpunan Pendanaan Perseroan berdasarkan jenis dana:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Jenis Kendaraan	30 September	31 Desember 2016		31 Desember 2015	
	2017	Pertumbuhan (%)	Unit	Pertumbuhan (%)	Unit
Utang bank	436.780	37,84%	316.840	25,50%	229.859
Efek utang yang diterbitkan	465.123	136,93%	196.310	(14,55%)	229.737
Modal ditempatkan dan disetor penuh	158.259	16,31%	136.063	0%	136.063
Tambahan modal disetor	185.024	27,10%	145.574	0%	145.574
Saldo Laba	196.001	(1,41%)	198.795	2,68%	193.612
Jumlah	1.441.187	6,28%	993.582	1,54%	934.846

3.2. Pemasaran

Kegiatan Pemasaran memainkan peranan yang sangat penting untuk memperoleh nasabah baru, menambah jumlah nasabah yang ada, memperluas jangkauan geografis Perseroan dan menambah jumlah jaringan *dealer/showroom* kendaraan bermotor yang dapat bekerja sama dengan Perseroan.

Kegiatan Pemasaran dilakukan melalui berbagai cara, antara lain kegiatan pemasaran melalui kantor-kantor cabang Perseroan, pemasaran melalui *dealer/showroom* kendaraan bermotor, pemasaran untuk penjualan kolektif (*group customer*), pemasaran untuk nasabah lama yang ingin mendapatkan kembali fasilitas pembiayaan (*repeat order*) dan lain-lain.

Kehadiran fisik Perseroan memegang peranan kunci dalam melakukan penetrasi pasar di setiap daerah. Untuk itu strategi pertumbuhan Perseroan dilakukan dengan membuka kantor-kantor cabang dan perwakilan di berbagai kota yang memiliki aktivitas bisnis dan prospek baik di Indonesia. Sampai saat ini Perseroan telah memiliki 1 kantor pusat, 2 kantor perwakilan dan 68 kantor cabang. Di setiap kantor cabang dan perwakilan, Perseroan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan berpengalaman. Perseroan telah menerapkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi dengan kantor pusat, sehingga setiap petugas berwenang dapat segera memperoleh informasi mengenai data nasabah, piutang, tunggakan serta dapat memproses aplikasi dan persetujuan fasilitas pembiayaan dalam tempo yang singkat.

Langkah Perseroan untuk mencapai target tersebut membuahkan hasil, terbukti dengan pesatnya kemajuan Perseroan dalam beberapa tahun ini.

Adapun langkah pemasaran yang paling utama adalah melalui kerjasama dengan *dealer-dealer/showroom-showroom* mobil yang ada di tiap daerah, baik mobil baru maupun mobil bekas. Strategi pemasaran seperti ini telah memberikan kontribusi yang sangat besar pada fasilitas pembiayaan Perseroan. Untuk strategi tersebut, Perseroan mengembangkan berbagai program agar lebih mempererat hubungan kerjasama dengan para pihak.

Per 30 September 2017, Perseroan telah bekerja sama dengan lebih dari 1.000 *dealer/showroom* yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia dan telah secara rutin menyalurkan kredit mereka ke Perseroan. Dengan demikian penjualan Perseroan terdistribusi secara luas dan tidak bergantung hanya pada beberapa *dealer/showroom* saja.

Agar tetap dapat meningkatkan kegiatan pemasaran, Perseroan memberikan bunga pembiayaan yang kompetitif serta pelayanan yang cepat dan memuaskan. Perseroan akan tetap membina dan melakukan usaha-usaha nyata untuk mempertahankan dan meningkatkan hubungan yang saling menguntungkan dengan para *dealer/showroom*.

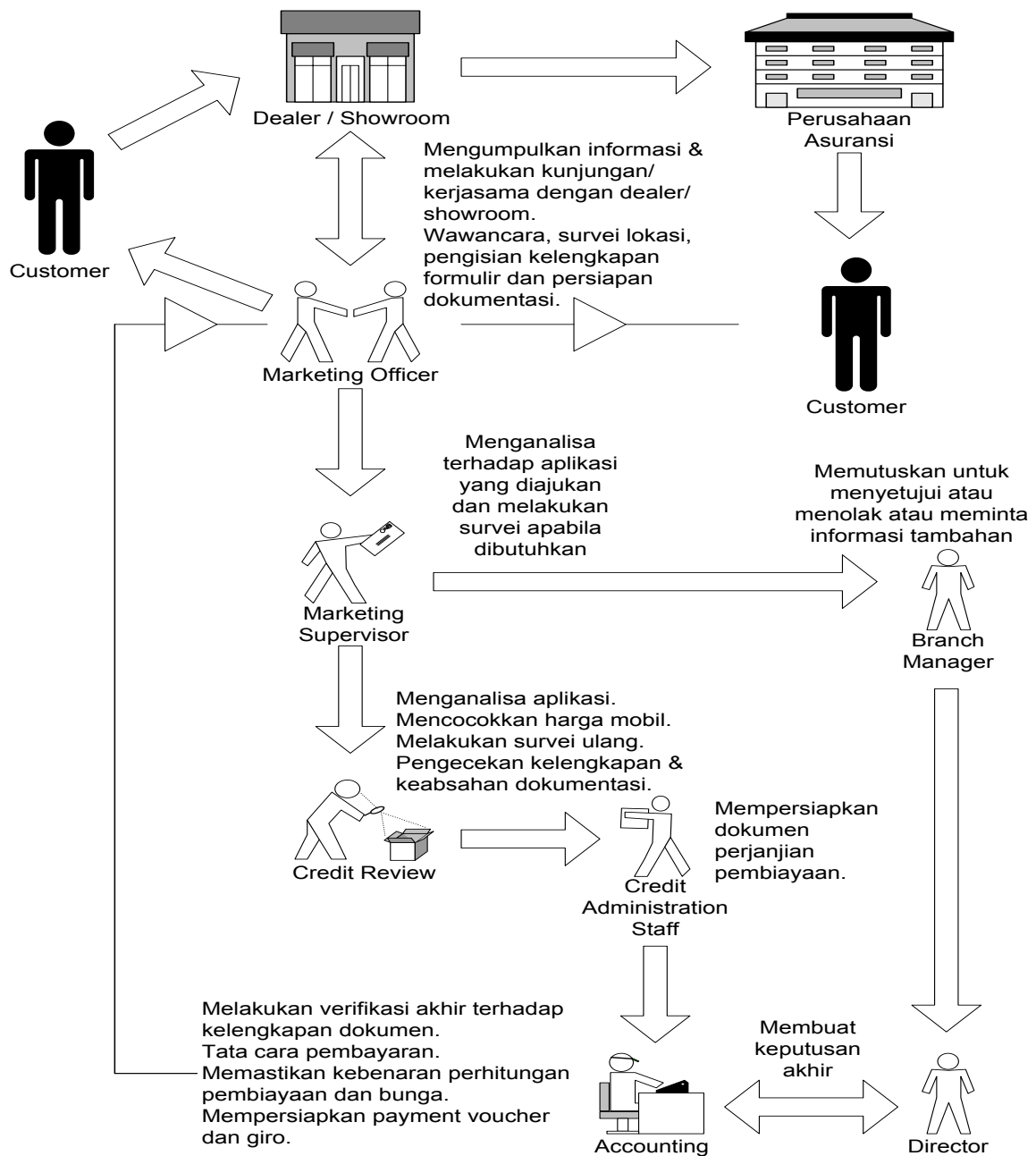
3.3. Operasional

Proses Pembiayaan

Agar dapat memberikan pelayanan yang baik kepada para konsumennya namun tanpa mengabaikan faktor risiko dan *security*, Perseroan bertumpu pada Prosedur Kerja Baku yang telah disusun secara seksama. Meskipun melibatkan banyak aspek dalam perusahaan, untuk meningkatkan kemampuan bersaing pembiayaan harus dapat dilakukan dalam waktu yang relatif singkat.

Proses pembiayaan kepada konsumen adalah sebagai berikut:

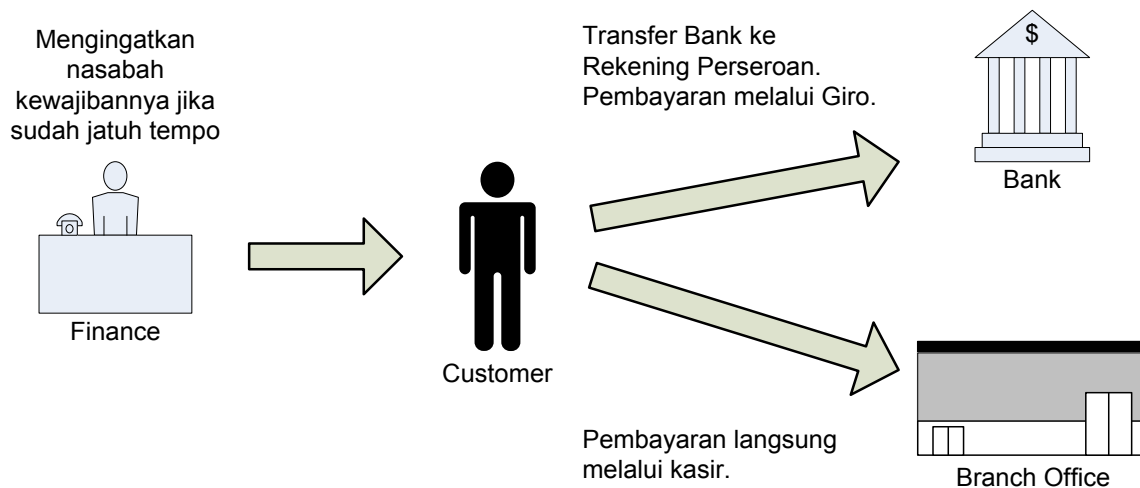
1. *Marketing Officer* mengumpulkan informasi dan melakukan kunjungan/kerjasama dengan *dealer/showroom* agar bisa mendapatkan order konsumen untuk melakukan pembiayaan dari Perseroan. Selain itu, *Marketing Officer* juga melakukan wawancara dengan konsumen, *survey* lokasi, pengisian kelengkapan formulir, dan persiapan dokumentasi yang dibutuhkan;
2. *Marketing Supervisor* akan melakukan analisa awal terhadap aplikasi yang diajukan dan melakukan *survey* apabila dibutuhkan;
3. Aplikasi disampaikan ke *Branch Manager* yang dapat memutuskan untuk menyetujui atau menolak atau meminta informasi tambahan;
4. Selanjutnya dilakukan *Credit Review* dengan melakukan analisa aplikasi, mencocokkan harga mobil dengan daftar internal Perseroan, melakukan *survey* ulang apabila dibutuhkan, pengecekan kelengkapan dan keabsahan dokumentasi;
5. Setelah pengajuan disetujui, keputusan disampaikan kepada *Marketing Officer* dan staf *Credit Administration* yang akan menyampaikan kepada *dealer/showroom* dan konsumen serta mempersiapkan dokumen perjanjian pembiayaan lalu menyerahkannya kepada *Marketing Officer*;
6. Dalam proses finalisasi, staf *Credit Administration* akan memastikan kelengkapan dokumen dan apabila ada kekurangan dokumen akan menyampaikan ke *Marketing Officer*;
7. Tahapan akhir dilakukan oleh Bagian Accounting yang akan melakukan verifikasi akhir terhadap kelengkapan dokumen dan tata cara pembayaran, memastikan kebenaran perhitungan pembiayaan dan bunga, mempersiapkan *payment voucher* dan giro, meminta persetujuan Direksi untuk melakukan pembayaran kepada *dealer/showroom*.



Proses Pembayaran

Guna memberikan kemudahan kepada nasabah dalam pembayaran angsuran, Perseroan memberikan beberapa alternatif cara pembayaran yaitu:

1. Pembayaran secara langsung melalui kasir yang telah tersedia di kantor-kantor cabang Perseroan, di mana nasabah dapat melakukan pembayaran di semua cabang Perseroan karena sistem Perseroan yang telah *Online* antar seluruh cabang;
2. Pembayaran melalui Transfer Bank ke rekening Perseroan;
3. Pembayaran melalui giro.



Guna menghindari adanya keterlambatan pembayaran, maka nasabah akan diingatkan tentang kewajibannya jika sudah jatuh tempo dengan cara menelepon. Selanjutnya, jika dalam batas waktu yang ditentukan nasabah belum memenuhi kewajibannya maka proses penagihan akan diteruskan dengan pemberian Surat Peringatan. Jika dalam batas waktu yang ditentukan tetap belum memenuhi kewajibannya, Perseroan akan melakukan penarikan kendaraan dari nasabah. Untuk penarikan kendaraan yang bermasalah, Perseroan akan memberikan pemberitahuan terlebih dahulu dan dalam pelaksanaannya, para pelaksana aktivitas ini juga dibekali dengan pemahaman mengenai etika dan hukum yang berlaku. Prinsip yang diterapkan adalah keadilan bagi pihak Perseroan maupun nasabah.

4. PERSAINGAN USAHA

Sejak September 2016, OJK sudah tidak menyediakan data Sewa Guna usaha, Anjak Piutang, Kartu Kredit dan Pembiayaan Konsumen berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, maka kegiatan usaha perusahaan pembiayaan saat ini menjadi Investasi, Modal Kerja, dan Multiguna. Hingga Oktober 2017, terdapat lebih dari 203 perusahaan pembiayaan yang beroperasi di Indonesia, yang mana menyebabkan persaingan usaha di industri pembiayaan semakin ketat. Saldo Investasi, Modal Kerja dan Multiguna adalah sebesar masing-masing Rp. 117,2 triliun, Rp. 51,2 triliun dan Rp. 242,8 triliun (sumber: Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia – Bank Indonesia).

Agar pangsa pasar yang sudah ada dapat dipertahankan bahkan dikembangkan, Perseroan menjalankan beberapa strategi usaha yang harus dilakukan untuk tetap bertahan dan berkembang di antara ketatnya persaingan usaha. Strategi usaha Perseroan yang merupakan acuan Perseroan dalam menjalankan usahanya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Sejak tahun 2010 hingga prospektus ini diterbitkan, Perseroan selalu memperoleh predikat SANGAT BAGUS dari majalah Info Bank. Majalah Infobank setiap tahunnya selalu melakukan evaluasi dan ranking pada lebih 170 Perseroan pembiayaan dengan 12 kriteria penilaian. Dari pendekatan pertumbuhan, ada 4 kriteria, yakni (1) aset; (2) pembiayaan; (3) modal sendiri; (4) laba rugi bersih. Sementara itu dari pendekatan rasio terdapat 8 kriteria, yakni (1) rasio pembiayaan terhadap aset total; (2) rasio pembiayaan terhadap kewajiban; (3) rasio kewajiban terhadap aset total; (4) rasio kewajiban terhadap modal sendiri; (5) rasio modal sendiri terhadap aset total; (6) rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BO/PO); (7) rasio *return on average aset* (ROA) dan (8) rasio *return on average equity* (ROE). Pengelolaan tersebut berdasarkan standar deviasi dari angka-angka industri perusahaan pembiayaan.

Di tahun 2017, Perseroan juga mendapat beberapa penghargaan diantaranya:

No.	Penghargaan	Lembaga	Tahun
1.	Multifinance Berpredikat "Sangat Bagus" Atas Kinerja Keuangan Selama 2016	Infobank	2017
2.	Multifinance Company with Very good Performance (Category: Asset between Rp 1 – 2.5 Triliun)	Warta Ekonomi	2017

No.	Penghargaan	Lembaga	Tahun
3.	Indonesia Multifinance Award V sebagai Peringkat Ke-1 Untuk Kategori Multifinance Terbaik di Indonesia dengan Asset Rp 500 Miliar s.d. Rp 1 Triliun	Economic Review	2017
4.	The Best Analytical CEO - Multifinance of The Year 2016	Economic Review	2016
5.	The Big Nine Multifinance Indonesia 2016	Economic Review	2016
6.	Peringkat Ke-2 Kelompok Usaha Lembaga Pembiayaan sektor Keuangan	Economic Review	2016
7.	<i>Good Corporate Governance</i> Terbaik Perusahaan Tbk (Swasta) di Indonesia	Economic Review	2016
8.	The Best Multifinance 2016 untuk Kategori Dengan Aset Rp 500 Miliar s.d. Rp 1 Triliun	Economic Review	2016
9.	The top 50 Companies for 2016	Forbes Indonesia	2016
10.	Multifinance Berpredikat "Sangat Bagus" Rating 173 Multifinance	Infobank	2016
11.	Indonesia Multifinance Consumer Choice Award 2016 sebagai the Best Financeial Performance Multifinance Company Kategori Aset Rp 500 Miliar s.d. Rp 1 Triliun	Warta Ekonomi	2016
12.	Perusahaan Multifinance Berpredikat "Sangat Bagus" Tahun 2014	Infobank	2015
13.	Perusahaan Multifinance Berpredikat " Sangat Bagus" tahun 2010 – 2014	Infobank	2015
14.	Indonesia Multifinance Award 2015 sebagai Peringkat Ke-2 Untuk Kategori Multifinance-Listed Company	Economic Review	2015
15.	Indonesia Multifinance Award 2015 sebagai Peringkat Ke-3 Untuk Kategori Corporate Social Responsibility	Economic Review	2015
16.	The Best Social CEO (Bp. Markus Dinarto Pranoto)	Economic Review	2015

a. Segmen Pasar yang dituju

Perseroan memfokuskan kegiatan pembiayaan konsumen yang dapat memberikan hasil pengembalian yang lebih tinggi. Saat ini Perseroan memfokuskan kegiatan usahanya pada pembiayaan mobil bekas yang memiliki tingkat marjin yang lebih tinggi dan memiliki nilai jual kembali (*resale value*) yang baik dibandingkan dengan mobil baru. Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, portofolio pembiayaan yang diberikan oleh Perseroan berkisar 92,33% pada pembiayaan mobil bekas sedangkan sisanya berkisar 7,67% pada pembiayaan mobil baru. Perseroan saat ini juga melakukan diversifikasi dan memperluas usaha jasa pembiayaannya ke bidang pembiayaan multiguna dan lainnya, termasuk pengembangan usaha pembiayaan rumah.

b. Jaringan Kerja

Sebagai perusahaan pembiayaan yang berorientasi kepada nasabah perseorangan, maka keberadaan perusahaan menjadi tolak ukur keberhasilan kegiatan usaha. Pada saat ini Perseroan telah memiliki 1 kantor pusat, 2 kantor perwakilan dan 68 kantor cabang. Perseroan berupaya untuk terus mengembangkan jaringan kerjanya dengan membuka cabang-cabang baru.

Setiap kantor cabang yang dikepalai oleh seorang pimpinan cabang berfungsi untuk melayani kebutuhan pembiayaan dalam wilayah kerjanya. Pimpinan cabang yang didukung oleh tenaga-tenaga marketing dan karyawan-karyawan operasional bertanggung jawab terhadap target pembiayaan yang telah ditetapkan sesuai dengan potensi wilayah kerja yang bersangkutan.

Selain beroperasi di daerah pusat kota, seperti Kemayoran, Kelapa Gading, Pecenongan, Mangga Dua dan daerah potensi lainnya di mana sentra-sentra penjualan mobil bekasnya memiliki potensi pasar yang sangat besar, Perseroan juga beroperasi di daerah-daerah pinggiran kota misalnya Bekasi, Tangerang, Depok dan Bogor.

Untuk memenuhi permintaan pasar yang ada (pasar yang dituju) tenaga marketing Perseroan dialokasikan ke wilayah-wilayah tertentu (*mapping*). Dengan cara ini, diharapkan tidak akan terjadi tumpang tindih kegiatan pemasaran di wilayah kerja yang sama sehingga tenaga marketing dapat lebih memfokuskan kegiatan pemasarannya pada wilayah kerjanya masing-masing.

Disamping itu, Perseroan juga meneruskan kebijakan pasar pembiayaan melalui pembukaan cabang di wilayah yang berpotensi.

c. Tenaga Marketing yang Handal

Perseroan selalu berupaya untuk memiliki tenaga-tenaga marketing yang profesional baik di kantor pusat maupun kantor cabang. Dengan adanya pembukaan cabang-cabang baru, Perseroan juga akan menambahkan marketing officer yang dituntut untuk memiliki komitmen yang tinggi agar memenuhi target yang telah ditetapkan. Sebagai motivasi, tenaga marketing akan diberikan insentif yang menarik atas transaksi yang berhasil dilakukannya.

d. Hubungan yang Baik dengan Mitra Bisnis

Perseroan berupaya melakukan kerjasama yang baik dengan *dealer/showroom* dan nasabah. Perseroan menyadari pentingnya hubungan baik dengan para pihak dalam pengembangan usahanya, oleh sebab itu Perseroan selalu berusaha untuk membina hubungan baik yang berkesinambungan dengan bank, lembaga pembiayaan dan kreditur lainnya, perusahaan asuransi, *dealer/showroom*, Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), serta konsumen.

Perseroan akan mengupayakan program-program yang inovatif, pemberian insentif dan bonus yang menarik kepada *dealer/showroom* serta nasabah. Contoh: *point reward* kepada *dealer/showroom* akan dibagikan sesuai dengan jumlah kontrak pembiayaan yang dapat dicapai sehingga *dealer/showroom* lebih terpacu untuk mendapatkan kontrak pembiayaan yang lebih banyak. Sedangkan *point reward* untuk nasabah dapat berupa *point undian* yang akan diundi pada waktu tertentu. Nasabah yang pernah menunggak angsuran maupun yang memiliki status pembayaran tidak lancar pada saat pengundian akan kehilangan haknya dalam pengundian hadiah.

Sebagai tambahan, jajaran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah berpengalaman di bidang usaha pembiayaan dan keuangan serta memiliki jaringan mitra bisnis yang luas. Dengan telah berkecimpungnya manajemen dalam bisnis ini sebelumnya, Perseroan telah memiliki hubungan yang baik dengan para *dealer/showroom*.

e. Pengelolaan Aset dan Liabilitas yang berhati-hati

Beberapa hal yang diterapkan dalam pengelolaan aset dan liabilitas adalah:

- Kesesuaian jangka waktu pendanaan dengan jangka waktu pembiayaan,
- Kepedulian atas tingkat suku bunga pinjaman bank/sumber dana lain dengan suku bunga pembiayaan,
- Mengembangkan kerja sama yang menguntungkan dengan pihak perbankan melalui program *joint financing* ataupun *channeling*,
- Selalu mengusahakan alternatif-alternatif baru dalam pembiayaan.

f. Pelaksanaan Prinsip Know Your Customer

Perseroan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usahanya. Prinsip ini diterapkan sejak dari awal proses pemberian pembiayaan kepada calon konsumen. *Survey* atas kemampuan dan keberadaan konsumen serta kewajiban bagi konsumen untuk memberikan uang muka (*down payment*) merupakan bentuk lain dari perwujudan sikap kehati-hatian Perseroan. *Survey* yang mendalam baik internal maupun eksternal (*outsourc*e) akan menyeleksi calon-calon konsumen yang memang layak untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Perseroan.

Perseroan berupaya menjaga kualitas piutang melalui seleksi calon nasabah secara menyeluruh serta melakukan pemantauan terhadap ketepatan pembayaran uang muka, pemilihan tipe mobil dan pengelolaan dokumen yang baik.

g. Memperkuat dan memaksimalkan Teknologi Informasi (TI)

Usaha pembiayaan yang terus tumbuh memerlukan dukungan TI yang baik dan berkualitas. Oleh karena itu, Perseroan melakukan investasi yang berkesinambungan untuk mengembangkan TI sebagai salah satu

tulang punggung pengembangan usaha Perseroan mendatang. Salah satunya adalah pengadaan dan penerapan sistem *online* yang memberikan kemudahan mendapatkan informasi atau data yang dapat diakses secara terus menerus baik data yang berada di kantor pusat maupun kantor cabang secara akurat dan *up to date*. Perseroan telah menetapkan kualitas dan standard operasional yang tinggi melalui komputerisasi *front-line* sampai *back-office* dan sistem *online* antara cabang dengan kantor pusat. Perseroan senantiasa secara terus-menerus melakukan perbaikan proses bisnis dan penyediaan sistem TI yang terkini dan andal demi meningkatkan pelayanan konsumen di masa kini dan di masa-masa yang akan datang.

h. Pengembangan Kompetensi Tenaga Kerja demi Meningkatkan Produktivitas

Demi memperkuat kompetensi dari sumber daya manusia yang dimilikinya, Perseroan senantiasa melakukan program pengembangan karyawan dengan harapan dapat meningkatkan produktivitas dan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas proses dalam kegiatannya sebagai penyedia jasa pembiayaan konsumen bagi masyarakat.

5. TINGKAT KESEHATAN PERSEROAN

Sesuai dengan peraturan yang tertuang dalam KMK No. 84/PMK. 012/2006 pada bab VII, pasal 5 ayat 3 dijelaskan bahwa tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan diukur dengan *gearing ratio* setinggi-tingginya adalah 10 kali. Perseroan telah memenuhi rasio keuangan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang yang telah diungkapkan Perseroan dalam laporan keuangan Perseroan di dalam Prospektus ini. *Gearing Ratio* (Pinjaman Yang Diterima dibagi dengan Ekuitas dikurangi Penyertaan) Perseroan berturut-turut per tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	30 September	31 Desember		31 Desember 2015	
	2017	Pertumbuhan (%)	2016	Pertumbuhan (%)	2015
Pinjaman Yang Diterima	901.904	75,76%	513.150	11,65%	459.596
Ekuitas dikurangi Penyertaan	510.295	12.44%	453.838	0,48%	451.642
<i>Gearing Ratio</i> (X)	1,77	56,64%	1,13	10,78%	1,02

Kondisi *Gearing Ratio* Perseroan masih jauh di bawah ketentuan Keputusan Menteri Keuangan, hal ini membuktikan bahwa Perseroan telah memenuhi tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan sebagaimana dipersyaratkan oleh OJK.

6. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Seiring dengan perubahan yang terjadi di dalam era globalisasi saat ini, implementasi inisiatif pengembangan dalam dunia bisnis tidak hanya dilakukan dari segi produk dan layanan kepada pelanggan, namun juga dari segi kepedulian social yang dianggap meningkatkan “nilai tambah” perusahaan bagi komunitas lokal. Perseroan juga menyadari bahwa hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan semua pihak adalah hal yang sangat penting karena merupakan kunci sukses bagi kelangsungan usaha perseroan. Oleh karena itu, sudah menjadi komitmen Perseroan untuk turut mendukung berbagai aktivitas sosial.

7. FASILITAS PEMBIAYAAN DAN KOLEKTIBILITAS PIUTANG

Dalam Menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan mengutamakan pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah ritel dan perorangan, di mana pemberian fasilitas pembiayaan diklasifikasikan dengan mempertimbangkan antara lain harga dan tipe kendaraan, jangka waktu pembiayaan, uang muka dan tingkat suku bunga. Perseroan menawarkan jangka waktu pembiayaan antara 12 bulan sampai dengan 36 bulan, tergantung kepada kemampuan calon konsumen untuk mengangsur. Hal ini juga dipengaruhi oleh uang muka yang diberikan oleh calon konsumen, semakin besar uang muka yang diberikan, maka beban konsumen untuk mengangsur tiap bulan akan semakin ringan. Sedangkan tingkat suku bunga yang dibebankan konsumen adalah tingkat suku bunga tetap selama masa kontrak dengan skema pembayaran angsuran secara tetap. Sebelum memberikan persetujuan fasilitas pembiayaan, Perseroan melakukan evaluasi atas tingkat kemampuan pembayaran berdasarkan Penghasilan konsumen dengan mempertimbangkan jumlah pokok hutang dan bunga yang harus dibayarkan oleh konsumen.

Tabel berikut ialah perincian mengenai kolektibilitas Piutang Pembiayaan Konsumen-Kotor Perseroan sepanjang tahun 31 Desember 2015, 2016 sampai dengan 30 September 2017 :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2017	2016	2015
Belum jatuh tempo	1.310.931	734.201	726.530
Telah jatuh tempo			
1 - 30 hari	8.790	3.983	3.371
31 - 60 hari	4.864	3.250	2.195
61 - 90 hari	2.454	1.620	1.806
>90 hari	21.126	12.288	2.265
Jumlah	1.348.165	755.342	736.167

Tabel berikut ialah perincian mengenai kolektibilitas Piutang Sewa Pembiayaan – Kotor Perseroan sepanjang tahun 31 Desember 2015, 2016 sampai dengan September 2017 :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2017	2016	2015
Belum jatuh tempo	35.218	48.938	137.650
Telah jatuh tempo			
1 - 30 hari	223	86	682
31 - 60 hari	275	1.433	892
61 - 90 hari	67	108	139
>90 hari	290	250	1.656
Jumlah	36.073	50.815	141.019

8. TEKNOLOGI INFORMASI (TI)

Teknologi Informasi (TI) yang ada di Perseroan adalah teknologi yang dapat menunjang pekerjaan baik yang di lini depan maupun lini belakang agar memudahkan setiap pekerjaan. Teknologi ini juga sangat bermanfaat untuk Divisi Marketing dan Divisi *Collection*. Penggunaan TI sangat dirasakan penting untuk Divisi Finance dan Accounting dalam menunjang kegiatan operasional Perseroan. Sekarang ini Perseroan telah menggunakan lebih dari 100 komputer dan 5 server.

Perseroan merancang kebijakan Teknologi Informasi (TI) online dan real time dari kantor cabang ke kantor pusat dan sebaliknya. Dengan sistem ini, maka manajemen dapat memonitor seluruh aktivitas operasional cabang secara langsung (*real time*) sehingga dengan cepat dapat mengambil keputusan strategis dan tepat guna yang menyangkut kebijakan Perseroan.

Perseroan menggunakan sistem yang dibuat oleh TelkomSigma dan dalam pengembangannya juga dikembangkan oleh tim TI internal sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan. Sistem yang digunakan yaitu Finacore & Aprova untuk Multifinance System dan Excalibur untuk sistem *General Ledger*. Dengan sistem ini semua cabang sudah terhubung secara *online*, data sudah langsung tersimpan ke dalam *database* utama dengan menggunakan SSH server untuk koneksi jaringan. Bagi nasabah, sistem ini akan mempercepat proses persetujuan pembiayaan, begitu juga dengan pembayaran angsuran yang dapat dilaksanakan dimanapun cabang Perseroan berada tanpa harus ke tempat asal cabang nasabah memperoleh pembiayaan. Ditambah dengan pembayaran angsuran yang dapat dilakukan melalui transfer perbankan, semakin membuktikan *online* sistem yang dibangun oleh Perseroan memberikan kemudahan dan nilai tambah ke Perseroan.

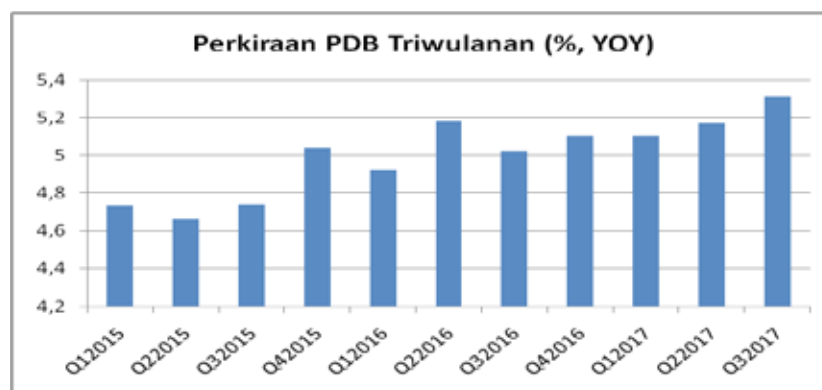
Saat ini Perseroan sedang mengembangkan system PSAK 50/55, Memiliki sistem *fire protection* khusus (FM 200) pada ruang server. Selain itu Perseroan sedang mengembangkan mail server berbasis linux dengan system 64 bit yaitu menggunakan Zimbra dan system virtual server. Untuk menjalankan operasional perusahaan sehari-hari divisi TI melakukan proses pemeliharaan data (*maintenance*) secara kontinyu,

memberikan dukungan terhadap karyawan (user) dan memonitor infrastruktur (network) baik di kantor pusat maupun kantor cabang. Sedangkan untuk *Disaster Recovery Center*, Perseroan bekerjasama dengan TelkomSigma dengan menempatkan server di Germain Center, Serpong. Perseroan percaya bahwa TI akan menjadi salah satu bagian terpenting untuk memajukan usahanya. Oleh karena itu Perseroan berkomitmen untuk memelihara dan memperbaharui sistem TI dengan baik dan tepat guna.

9. PROSPEK USAHA

Perekonomian Indonesia

Indonesia merupakan negara dengan perekonomian terbesar di ASEAN dan terbesar kesepuluh di dunia diukur dengan purchasing power parity dan merupakan satu-satunya negara ASEAN yang merupakan anggota G-20. Saat ini Indonesia juga merupakan salah satu negara dengan populasi terbesar dan termuda di dunia, dengan jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 250 juta jiwa dimana 50% dari jumlah penduduknya masih berada di bawah umur 30 tahun. Dengan bonus demografi tersebut, penduduk usia kerja Indonesia diperkirakan akan meningkat menjadi 189 juta pada tahun 2020 dibandingkan 175 juta pada tahun 2013 dan diharapkan ke depannya rasio ketergantungan Indonesia akan menurun dan mencapai titik terendahnya di tahun 2030. Menurut studi yang dilakukan oleh McKinsey Global Institute dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan PDB sebesar 5% - 6%, kelas menengah / consuming class Indonesia (Penghasilan minimal 3.600 dolar AS per tahun) diproyeksikan akan mencapai 85 juta pada tahun 2020 dan 135 juta pada tahun 2030 dari hanya sekitar 45 juta di tahun 2013, dimana jumlah tersebut berkali-kali lipat dibandingkan populasi Malaysia dan Singapura saat ini. Populasi Indonesia yang masif, produktif, dan bertumbuh diperkirakan akan terus menjadi pendorong tingkat konsumsi di Indonesia pada masa yang akan datang dimana konsumsi merupakan penyangga utama roda perekonomian Indonesia yang berkontribusi sebesar 55% terhadap PDB Indonesia.



Sumber: Gaikindo

Meskipun pertumbuhan ekonomi secara global dan negara-negara maju ada di bawah perkiraan, pertumbuhan Indonesia masih tergolong kuat. Pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah sebesar 4,92%, 5,18%, dan 5,02% pada Kuartal 1, 2, dan 3. Walaupun angka ini tidak setinggi hasil tahun 2012-2013, tetapi kondisi tahun ini menunjukkan peningkatan dibanding 2 tahun sebelumnya. Sepanjang tahun 2017, telah terjadi kejadian yang berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, seperti kebijakan moneter, investasi pemerintah di bagian infrastruktur, dan reformasi kebijakan untuk memicu kegiatan investasi. Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan PDB yaitu 5,1-5,5%, dengan pandangan positif terhadap pertumbuhan investasi swasta di tahun 2018.

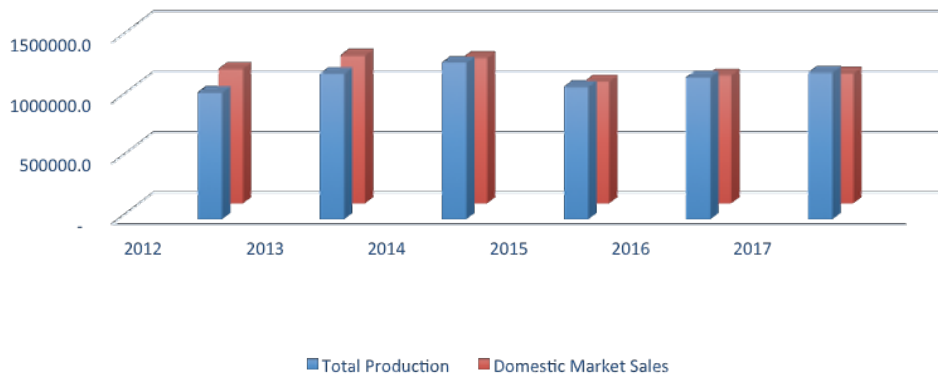
Prospek Industri Otomotif Indonesia

Industri otomotif Indonesia memiliki keterkaitan yang cukup erat dengan industri pembiayaan, pasalnya sekitar 70% - 75% dari penjualan mobil dan motor di Indonesia diperkirakan masih melalui skema kredit. Industri mobil di Indonesia berhasil mencatatkan pertumbuhan yang signifikan dalam satu dekade terakhir, mencatatkan pertumbuhan CAGR sebesar 13,7% dari tahun 2006 – 2015. Di tahun 2015, penjualan mobil di Indonesia mencapai 1.013.291 unit dibandingkan penjualan di tahun 2006 sebanyak 318.904 unit.

Pada bulan Desember 2017, secara keseluruhan pasar kendaraan bermotor mencapai 1.078.634 unit, naik 1,50% dibanding waktu yang sama tahun lalu. Bila tren ini berlanjut, maka Gaikindo memperkirakan pertumbuhan industri pada akhir tahun akan mencapai 4%, yang merupakan pertanda bagus karena industri

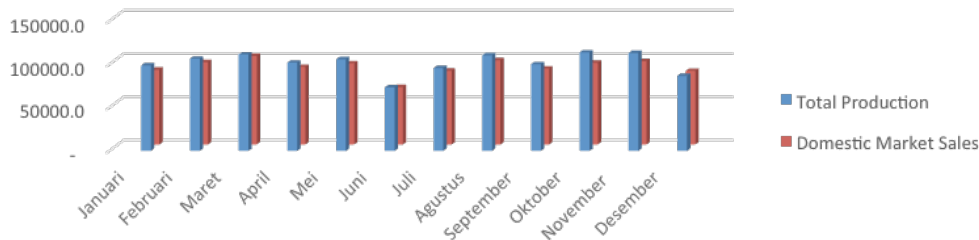
telah mengalami penurunan selama beberapa tahun terakhir. Sementara itu pertumbuhan industri motor di Indonesia mencatatkan pertumbuhan CAGR sebesar 4,32% dari tahun 2008– 2017, dimana penjualan motor di tahun 2017 mencapai 6.480.155 unit dibandingkan penjualan motor di tahun 2008 sebanyak 4.427.342 unit.

Domestic Auto Market Sales & Production



Sumber: Gaikindo

Auto Domestic Market & Production 2017



Sumber: Gaikindo

Industri otomotif merupakan sektor *cyclical* yang sensitif terhadap perubahan makro ekonomi dimana pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat suku bunga, nilai tukar Rupiah dan juga harga bahan bakar minyak sangat mempengaruhi penjualan otomotif di Indonesia. Secara historis tingkat inflasi yang juga turut berpengaruh terhadap nilai tukar Rupiah dan BI rate, memiliki efek yang negatif terhadap penjualan mobil dan motor di Indonesia dengan efek keterlambatan waktu selama 1 tahun.

Seperti pada tahun –tahun sebelumnya sampai dengan 2017, penjualan mobil masih didominasi oleh mobil-mobil buatan Jepang, yang mana penjualannya mencapai lebih dari 90% dari seluruh penjualan mobil di Indonesia. menurut GAIKINDO, penjualan mobil berdasarkan merek pada tahun 2012, Toyota masih mendominasi pasar dengan pangsa pasar yang mencapai lebih dari 33%, yang diikuti oleh Daihatsu, Honda dan Suzuki.

Di bawah ini merupakan daftar 15 merek mobil dengan penjualan nasional terbanyak sepanjang tahun 2017, seperti yang dilansir dari laporan GAIKINDO, yakni:

1. Toyota	:	371.332 unit	9. Datsun	:	10.484 unit
2. Daihatsu	:	186.381 unit	10. Wuling	:	5.050 unit
3. Honda	:	186.859 unit	11. Chevrolet	:	3.617 unit
4. Suzuki	:	111.660 unit	12. Mazda	:	3.861 unit
5. Mitsubishi	:	121.395 unit	13. Kia	:	837 unit
6. Nissan	:	14.488 unit	14. Mercedes-Benz	:	1.380 unit
7. Hino	:	29.645 unit	15. BMW	:	2.800 unit
8. Isuzu	:	20.085 unit			

Adapun jika dilihat dari jenis mobilnya, maka proporsi penjualan terbesar masih berasal dari mobil serba guna (multi purpose vehicle – MPV) diikuti mobil jenis *hatchback* dan *sport utility vehicle* (SUV).

Prospek Industri Pembiayaan Indonesia

Sejauh tahun 2017, iklim ekonomi Indonesia mendukung pertumbuhan industri kendaraan bermotor dan kredit motor. Nilai tukar Rupiah yang menstabil, pertumbuhan PDB yang sesuai target, dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang mendorong pertumbuhan infrastruktur dan ekonomi secara keseluruhan menopang pertumbuhan pemakaian kredit. Kredit konsumsi sedang berada dalam tren naik selama sekitar 5 tahun terakhir, sedangkan kredit dari sektor *leasing* mengalami penurunan. Akan tetapi, pada Oktober 2017, jumlah kredit perusahaan pembiayaan di Indonesia mencapai 411,19 triliun Rupiah, naik 8,15% dibanding waktu yang sama tahun lalu. Pembiayaan konsumen, yang umumnya merupakan pembiayaan kredit motor atau mobil masih merupakan tulang punggung bagi industri pembiayaan, berkontribusi sebesar 70% dari total kredit perusahaan pembiayaan pada Oktober 2017 dan mencatat kenaikan sebesar 5,6% dari awal tahun. Bahkan, ketika penjualan kendaraan bermotor menurun pada tahun 2014 dan 2015, kredit pembiayaan masih mencatatkan nilai yang sangat stabil, yang dikarenakan perusahaan pembiayaan tidak hanya fokus kepada pembiayaan penjualan kendaraan baru, namun juga melayani pembiayaan kendaraan bekas.

Di sisi lain, berdasarkan data dari Bank Indonesia, margin Penghasilan bunga bersih (NIM) perusahaan pembiayaan tergolong stabil dan *Non-Performing Financing (NPF)* perusahaan pembiayaan masih sangat terkendali sepanjang tahun 2016, dimana di saat yang sama *Non-Performing Loan (NPL)* dari industri perbankan mengalami tren peningkatan. Namun secara umum beban operasional perusahaan pembiayaan terus mengalami peningkatan sehingga menekan margin operasional dari perusahaan pembiayaan. Seiring dengan inflasi yang terkendali, penurunan tingkat suku bunga, perbaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia serta pertumbuhan kelas menengah Indonesia, industri pembiayaan diperkirakan masih dapat membukukan pertumbuhan yang baik di masa yang akan datang.

Sejak September 2016, OJK sudah tidak menyediakan data Sewa Guna usaha, Anjak Piutang, Kartu Kredit dan Pembiayaan Konsumen berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, maka kegiatan usaha perusahaan pembiayaan saat ini menjadi Investasi, Modal Kerja, dan Multiguna. Hingga Oktober 2017, terdapat lebih dari 203 perusahaan pembiayaan yang beroperasi di Indonesia, yang mana menyebabkan persaingan usaha di industri pembiayaan semakin ketat. Saldo Investasi, Modal Kerja dan Multiguna adalah sebesar masing-masing Rp. 117,2 triliun, Rp. 51,2 triliun dan Rp. 242,8 triliun (sumber: Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia – Bank Indonesia).

Kebijakan Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga BI Rate juga bisa menurunkan bunga kredit multifinance yang diharapkan kombinasi turunnya bunga kredit dan harga BBM dapat menggerakkan sektor *ritel* dan meningkatkan daya beli masyarakat sehingga industri multifinance dapat merealisasikan target pertumbuhan sebesar 10% seiring dengan semakin meningkatnya kualitas dari perekonomian Indonesia, baik di masa kini maupun di masa-masa yang akan datang.

IX. EKUITAS

Dibawah ini disajikan perkembangan ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan Perseroan pada tanggal 30 September 2017 dan 31 Desember 2016 dan 2015 yang diaudit oleh Akuntan Publik Juninho Widjaja, CPA dari Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (*Member Crowe Horwath International*) dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian.

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Ekuitas	30 September	31 Desember	
	2017	2016	2015
Modal saham - nilai nominal Rp 100,- per saham Modal dasar - 2.200.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1.582.589.100 saham pada tanggal 30 September 2017 dan 1.360.627.100 saham pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015	158.259	136.063	136.063
Tambahan modal disetor - neto	185.025	145.575	145.575
Saldo laba			
Telah ditentukan penggunaannya	250	250	250
Belum ditentukan penggunaannya	195.751	198.545	193.361
Penghasilan komprehensif lain			
Keuntungan revaluasi aset tetap - neto setelah pajak	23.088	23.373	23.970
Total Ekuitas	562.373	503.806	499.219
Total Liabilitas dan Ekuitas	1.498.731	1.037.602	981.723

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Berdasarkan Akta No. 61 tanggal 5 Juni 2017, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut :

Modal Dasar	:	2.200.000.000 saham
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	:	1.582.589.100 saham

Tabel Proforma Ekuitas

PUT III menawarkan sebanyak 200.074.475 saham biasa atas nama atau sebanyak-banyaknya 11,22% dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PUT III dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp500,- (lima ratus Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya bernilai Rp 100.037.237.500,- (seratus miliar tiga puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) terjadi pada tanggal 30 September 2017, maka proforma ekuitas sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahan Modal Disetor	Saldo Laba Telah Ditentukan Penggunaannya	Saldo Laba Belum Ditentukan Penggunaannya	Penghasilan Komprehensif Lain	Total Ekuitas
Posisi ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 30 September 2017	158.259	185.025	250	195.752	23.088	562.373
Perubahan ekuitas setelah tanggal 30 September 2017 jika diasumsikan pada tanggal tersebut dilaksanakan:						

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahan Modal Disetor	Saldo Laba Telah Ditetapkan Penggunaannya	Saldo Laba Belum Ditetapkan Penggunaannya	Penghasilan Komprehensif Lain	Total Ekuitas
- PUT III sebesar 200.074.475 (dua ratus juta tujuh puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) per saham dan Harga Pelaksanaan Rp 500,- (lima ratus Rupiah) per saham setelah dikurangi estimasi biaya penawaran umum terbatas yang ditanggung Perseroan	20.007	78.569	-	-	-	98.576
Proforma ekuitas pada tanggal 30 September 2017 setelah PUT III	178.266	263.594	250	195.752	23.088	660.949

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang saham baru yang berasal dari Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama Perseroan termasuk hak atas pembagian dividen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dividen yang diterima oleh pemegang saham WNA akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Untuk definisi pemegang saham WNA dan informasi mengenai perpajakan di Indonesia selanjutnya dapat dilihat pada Bab XI mengenai Perpajakan dalam prospektus ini.

Perseroan memiliki kebijakan untuk membayarkan dividen dalam bentuk uang tunai kepada seluruh pemegang saham Perseroan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dengan tetap memperhatikan posisi keuangan atau tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, serta dengan memperhatikan ketentuan bahwa pembagian dividen tidak mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan dan kewajiban Perseroan berdasarkan perjanjian-perjanjian yang ada, Perseroan memiliki kebijakan dividen minimal 25% dari laba bersih setelah pajak mulai tahun buku 2017 kecuali ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

Informasi mengenai pelaksanaan pembagian dividen Perseroan hingga saat ini adalah sebagai berikut:

No.	Tahun Buku	Jumlah Laba Bersih (Rp juta)	Jumlah Dividen (Rp juta)	Dividen Tunai per Saham (Rp)
1.	2014	40.734	5.000	3,64
2.	2015	41.742	-	-
3.	2016	33.913	30.002	22,05
4.	Periode berakhir Sep 2017	26.787	30.002	22,05

Perseroan tidak memiliki *negative covenant* sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen.

XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen saham akan dikenakan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No.7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, dividen atau bagian keuntungan yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan dengan syarat:

1. dividen berasal dari cadangan laba ditahan dan
2. bagi Perseroan Terbatas, badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK-03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan sebagai Objek dari Pajak Penghasilan, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman modal antara lain dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Penyetoran pajak penghasilan yang terhutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Untuk transaksi penjualan saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai seluruh saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana.
3. Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai dengan ketentuan di atas. Dalam hal ini, pemilik saham pendiri untuk kepentingan perpajakan dapat menghitung final atas dasar anggapannya sendiri bahwa sudah ada penghasilan. Penyetoran tambahan Pajak penghasilan yang terhutang dapat dilakukan oleh masing-masing pemilik saham pendiri selambat-lambatnya 1(satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun, apabila pemilik saham pendiri tidak memanfaatkan kemudahan tersebut maka perhitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang No. 36 tahun 2008.
4. Berdasarkan pasal 23.a.1 Undang-Undang No. 36 tahun 2008, dividen yang berasal dari saham, baik yang diperdagangkan di Pasar Modal maupun yang tidak, yang terhutang atau dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong PPh pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto.
5. Berdasarkan pasal 17.2 Undang-Undang No.36 tahun 2008, dividen yang dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri dipotong PPh pasal 4 (2) sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.

Dividen yang dibayar atau terhutang kepada wajib pajak luar negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PUT III INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, KEPEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PUT III.

KEWAJIBAN PERPAJAKAN PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi semua kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak. Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 telah sesuai dengan yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya.

XII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik :

Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan

Cyber 2 Tower lantai 20, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, Jakarta 12950

Nomor STTD atas nama Juninho Widjaja No. 26/PM.22/STTD-AP/2015 tanggal 3 Maret 2015

Keanggotaan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) atas nama Juninho Widjaja Nomor 1981.

Pedoman Kerja: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penunjukan No. 00046/BPF//2018 tanggal 9 Januari 2018.

Tugas pokok Akuntan Publik adalah melakukan audit berdasarkan Standar Auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Tugas Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

Konsultan Hukum:

Ery Yunasri & Partners

Energy Building Lantai 17

Jl. Jend.Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190

Nomor STTD atas nama Ery Yunasri No. 100/STTD-KH/PM/1996 tanggal 16 Desember 2011.

Keanggotaan Asosiasi HKHPPM Nomor 98026

Pedoman Kerja: Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor.KEP/01/HKHPPM//2014 tanggal 4 Februari 2014.

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penunjukan No. 00048/BPF//2018 tanggal 9 Januari 2018.

Tugas pokok Konsultan Hukum adalah memberikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini. Konsultan Hukum melakukan uji tuntas dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas lainnya adalah meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan Fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan disini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Notaris:

Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi.

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 2

Komp. Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 – 5, Jakarta 11140

Nomor STTDatas nama Irawan Soerodjo, SH No. 31/STTD-N/PM/1996 tanggal 4 Juli 1996

Keanggotaan Asosiasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) Nomor : 060.2.021.150152

Pedoman Kerja: Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penunjukan No. 00049/BPF//2018 tanggal 9 Januari 2018.

Tugas pokok Notaris adalah menyiapkan dan membuat akta-akta yang berhubungan dengan PUT III ini, antara lain Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, Perjanjian Pembeli Siaga dan perjanjian-perjanjian lainnya yang terkait serta akta-akta perubahannya, sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris.

Biro Administrasi Efek (BAE) :

PT Adimitra Jasa Korpora

Rukan Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III F3 No.5
Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250

Nomor Izin Usaha BAE dari Menteri Keuangan : 1400/KMK.010/1990 tanggal 3 November 1990

Pedoman Kerja: Sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penunjukan No. 00047/BPF/II/2018 tanggal 9 Januari 2018.

Tugas pokok BAE adalah menyiapkan Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas PUT III, mendistribusikan Sertifikat Bukti HMETD atau HMETD dalam bentuk elektronik ke dalam penitipan kolektif di KSEI, menerima permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan rekonsiliasi dana atas pembayaran permohonan tersebut dengan bank yang ditunjuk oleh Perseroan, melakukan proses penjatahan atas pemesanan pembelian saham tambahan, melaksanakan proses penerbitan dan pendistribusian saham dalam bentuk elektronik ke dalam penitipan kolektif KSEI serta membuat daftar pengembalian uang pemesanan pembelian saham.

XIII. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk PT Adimitra Jasa Korpora sebagai Pelaksana Pengelola Administrasi Saham (BAE) dan sebagai Agen Pelaksana, sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas III PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. No. 67 tanggal 16 Januari 2018 dan Addendum I Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas III PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. No. 81 tanggal 13 Februari 2018, yang keduanya dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi., Notaris di Jakarta.

Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham:

1. Pemesan yang Berhak

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan pada tanggal 22 Maret 2018 pukul 16.15 WIB berhak untuk membeli saham dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 791 (tujuh ratus sembilan puluh satu) saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan berhak atas 100 (seratus) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru dengan Harga Pelaksanaan Rp 500,- (lima ratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat pengajuan pemesanan pembelian.

Pemesanan yang berhak membeli saham baru adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu Pemegang Saham yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan belum menjual HMETD tersebut dan pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD, atau dalam kolom endorsemen pada Sertifikat Bukti HMETD, atau daftar pemegang HMETD yang namanya tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI.

Pemesanan dapat terdiri atas perorangan, WNI dan/atau WNA dan/atau Lembaga dan/atau Badan Hukum/ Badan Usaha, baik Indonesia atau Asing, sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan Pelaksananya.

2. Distribusi Sertifikat Bukti HMETD

- a. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam rekening efek di KSEI melalui rekening efek Anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu 23 Maret 2018.
- b. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI (pemegang saham warkat), Perseroan akan menerbitkan Sertifikat HMETD atas nama Pemegang Saham.

Para Pemegang Saham yang beralamat di Jakarta dan di luar Jakarta, termasuk pemegang saham non Indonesia dapat mengambil Sertifikat Bukti HMETD (bagi pemegang saham yang belum memasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI), Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya di BAE Perseroan pada setiap hari kerja dan jam kerja mulai tanggal 23 Maret 2018. Para pemegang saham yang memberikan kuasa kepada pihak ketiga untuk mengambil dokumen, pihak ketiga tersebut wajib menyerahkan fotokopinya serta surat kuasa asli yang ditanda tangan oleh pemegang saham yang memberikan pihak ketiga kuasa dan tanda pengenal (KTP/Paspor/KITAS) asli dan fotokopi pemegang saham.

3. Pendaftaran / Pelaksanaan HMETD

Para Pemegang HMETD yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya, termasuk pemegang HMETD yang tidak berdomisili di Indonesia wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/ Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem C-BEST sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI.

Dalam melakukan institusi pelaksanaan, Anggota Bursa/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD yang mencukupi pada saat mengajukan permohonan tersebut.
- Kecukupan HMETD dan dana tersebut harus telah tersedia di dalam Rekening Efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu hari kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening Perseroan.

Saham hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan atau Registrar selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan.

Para Pemegang saham baik Indonesia maupun non – Indonesia yang belum mencatatkan sahamnya di sistem penitipan kolektif KSEI dan ingin melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE yang ditunjuk Perseroan, yaitu:

PT ADIMITRA JASA KORPORA
Rukan Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III F3 No.5
Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250
Telepon: (021) 2936 5287 / 98
Faksimili: (021) 2928 9961

Dengan membawa dokumen sebagai berikut:

- Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditanda tangani dan diisi lengkap;
- Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindah bukaan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
- Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga/Badan Hukum);
- Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermaterai Rp 6.000,- (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari Pemberi dan Penerima Kuasa. Pemohon asing diwajibkan untuk memberikan nama dan alamat lengkap pihak ketiga yang diberi kuasa dan juga nama dan alamat lengkap pemohon asing yang berada di luar Indonesia; dan
- apabila pemilik HMETD menginginkan saham hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik, maka permohonan pelaksanaan kepada BAE melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
 - Asli Surat Kuasa dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa / Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil pelaksanaan HMETD dalam penitipan Kolektif KSEI atas nama pemberi kuasa.
 - Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap;
 - Biaya konversi ke dalam elektronik akan dikenakan biaya sebesar Rp 1.650,- (seribu enam ratus lima puluh Rupiah) per Sertifikat HMETD atau minimum Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) per Sertifikat HMETD.

Jika pemegang HMETD tidak menginginkan saham HMETD mereka dititipkan kepada penyimpanan kolektif, Perseroan akan menerbitkan HMETD dalam bentuk SKS. Pendaftaran Pelaksanaan HMETD dilakukan di kantor BAE Perseroan. Pendaftaran dapat dilakukan mulai 26 Maret 2018 hingga 9 April 2018 pada hari dan jam kerja (Senin – Jumat, 09.00 – 15.00 WIB).

Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan pembelian saham ataupun persyaratan pembayaran sebagaimana yang tercantum dalam HMETD dan Prospektus untuk pelaksanaan HMETD ini tidak dipenuhi oleh pemegang HMETD, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah diterima dengan baik (*in good fund*) di rekening Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian di Prospektus.

4. Pemesanan Pembelian Saham Tambahan

Pemegang saham yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi FPPS Tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) lembar saham atau kelipatannya.

1. Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/sertifikat bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - b. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian saham tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil penjatahan dalam penitipan kolektif KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian saham tambahan atas nama pemberi kuasa;
 - c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga/Badan Hukum);
 - d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/ giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
 - e. Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE;
 - f. Pelaksanaan tambahan ke dalam elektronik akan dikenakan biaya sebesar maksimum Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) per Sertifikat Kolektif Saham atau minimum Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu Rupiah) ditambah Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% per Sertifikat HMETD.
2. Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Instruksi pelaksanaan asli (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST);
 - b. Formulir Penyetoran Efek asli yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE;
 - c. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/ giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
 - d. Pelaksanaan tambahan ke dalam elektronik akan dikenakan biaya sebesar maksimum Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) per Sertifikat Kolektif Saham atau minimum Rp 25.000 (dua puluh lima ribu Rupiah) ditambah Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% per Sertifikat HMETD. Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada 11 April 2018, dalam keadaan baik (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.
3. Bagi pemegang HMETD yang tidak terdaftar dalam penitipan kolektif KSEI dan menginginkan saham yang dialokasikan untuk mereka (pemegang HMETD) dalam bentuk *script*, wajib mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - b. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian saham tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil penjatahan dalam penitipan kolektif KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian saham tambahan atas nama pemberi kuasa;
 - c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga/Badan Hukum);
 - d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/ giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

5. Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan Dalam PUT III

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan dilakukan pada tanggal 12 April 2018 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT III ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi;
- b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT III ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan system penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan;

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjatahan saham dalam PUT III ini sesuai Peraturan OJK No. 32 Tahun 2015 dan berpedoman pada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan terakhir.

6. Persyaratan Pembayaran

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PUT III yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah, pada saat pengajuan pemesanan secara tunai, cek, bilyet, giro dan pemindahbukuan atau transfer dengan mencatumkan Nomor Sertifikat Bukti HMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran dilakukan ke rekening Perseroan pada:

PT Bank Central Asia Tbk
Kantor Cabang Utama Sudirman
No. Rekening : 0353215199
Atas nama: PT Batavia Prosperindo Finance

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek dan wesel bank tersebut ditolak oleh bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro yang dananya telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan tersebut di atas. Untuk pemesanan pembelian saham tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 11 April 2018. Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham dalam rangka PUT III ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Pada saat penerimaan pengajuan pemesanan pembelian saham, BAE atas nama Perseroan akan menyampaikan kepada para pemohon Bukti Tanda Terima pemesanan saham yang merupakan bagian dari HMETD, yang telah dicap dan ditandatangani sebagai bukti permohonan. Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening KSEI.

8. Pembatalan Pemesanan Saham

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan saham, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan saham akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penjatahan atas pesanan. Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan saham antara lain:

1. Pengisian Sertifikat Bukti HMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/ syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus;
2. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran;
3. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan saham tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan LLG/transfer ataupun pemindahbukuan ke rekening pemegang saham yang berhak menerima pengembalian uang pemesanan tersebut. Pengembalian uang pemesanan saham tersebut dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan, yaitu tanggal 16 April 2018.

Besarnya bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan tersebut dihitung berdasarkan rata-rata tingkat suku bunga deposito satu tahun dari perbankan yang berlaku pada saat pengembalian. Perseroan tidak memberikan bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

10. Penyerahan saham Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke Rekening Efek

Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya melalui KSEI akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening Perseroan. Saham hasil pelaksanaan HMETD akan diterbitkan dalam bentuk SKS dan dapat diambil selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Perseroan. Saham hasil penjatahan atas pemesanan saham tambahan dapat diambil dalam bentuk SKS atau dapat didistribusikan secara elektronik oleh penitipan kolektif KSEI selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah proses alokasi.

11. Alokasi Terhadap HMETD yang Tidak Dilaksanakan

Apabila saham baru yang ditawarkan dalam PUT III ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham HMETD publik lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.

XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PUT III ini melalui iklan di 1 (satu) surat kabar.

1. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui rekening efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal pencatatan pada Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 23 Maret 2018. Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya akan didistribusikan oleh Perseroan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan dan dapat diperoleh pemegang saham dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham.

Para pemegang saham baik yang beralamat di Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi (Jabotabek) maupun yang beralamat di luar Jabotabek dapat mengambil sendiri Sertifikat Bukti HMETD, FPPS Tambahan dan formulir lainnya mulai tanggal 23 Maret 2018 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopinya serta asli Surat Kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri, pada BAE Perseroan:

PT ADIMITRA JASA KORPORA
Rukan Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III F3 No.5
Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250
Telepon: (021) 2936 5287 / 98
Faksimili: (021) 2928 9961

Apabila sampai dengan tanggal 11 April 2018 pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 22 Maret 2018 belum mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dan tidak menghubungi Biro Administrasi Efek Perseroan, maka segala risiko ataupun kerugian yang mungkin timbul bukan menjadi tanggung jawab Perseroan ataupun Biro Administrasi Efek, melainkan merupakan tanggung jawab para pemegang saham yang bersangkutan.

XV. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Prospektus ini atau apabila pemegang saham menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PUT III ini, para pemegang saham dipersilakan menghubungi:

PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
Gedung Chase Plaza Lantai 12 dan 15
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920, Indonesia
Telp: (021) 520 0434
Fax: (021) 520 9160
Up. Corporate Secretary

PT ADIMITRA JASA KORPORA
Rukan Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III F3 No.5
Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250
Telepon: (021) 2936 5287 / 98
Faksimili: (021) 2928 9961